

**ANALISIS MENINGKATNYA FENOMENA XENOFobia  
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PRANCIS PADA ERA  
PEMERINTAHAN FRANCOIS HOLLANDE DAN EMMANUEL  
MACRON (2012 – 2018)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**Oleh:**

**ELYANA ADE PERTIWI**

**14323047**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS MENINGKATNYA FENOMENA XENOFOBIA TERHADAP  
KEBIJAKAN PEMERINTAH PRANCIS PADA ERA PEMERINTAHAN  
FRANCOIS HOLLANDE DAN EMMANUAL MACRON**

**(2012 – 2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**ELYANA ADE PERTIWI**

**14323047**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

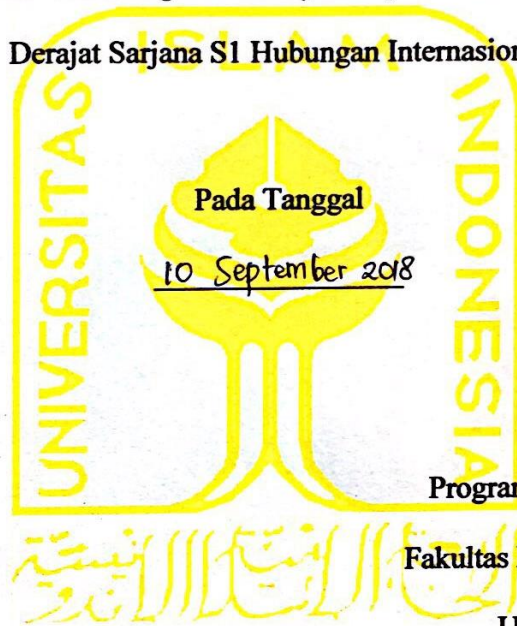
**ANALISIS MENINGKATNYA FENOMENA XENOFobia TERHADAP  
KEBIJAKAN PEMERINTAH PRANCIS PADA ERA PEMERINTAHAN  
FRANCOIS HOLLANDE DAN EMMANUAL MACRON (2012 – 2018)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

10 September 2018

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Dewan Penguji

1. Irawan Jati S.IP., M.Hum., M.S.S,
2. Geradi Yudhistira, S.sos., M.A,
3. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A,

Tanda Tangan

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Elyana Ade Periw  
No. Mahasiswa : 14323047  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Meningkatnya Fenomena Xenofobia Terhadap Kebijakan Pemerintahan Prancis pada Era Pemerintahan Francois Hollande dan Emmanuel Macron (2012 – 2018)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 September 2018

Yang menyatakan



Elyana Ade Periw

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil'alamin*



Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang paling berpengaruh di dalam hidup saya yaitu:

### **Bunda dan Abah Tercinta**

#### ***Bunda Mahmudah & Abah Marzuki Mustafa***

Tidak ada kata yang cukup untuk diekspresikan begitu berterimakasihnya anakmu atas segala air mata, keringat hingga darah yang telah tertumpah demi selesainya studi S1 ini. Terima kasih atas doa, nasehat, teladan, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada anak pertamanya selama ini. Semoga dengan selesainya studi S1 ini akan menjadi batu lompatan agar bisa menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Semoga dengan selesainya studi S1 ini juga bisa membuat Bunda dan Abah bahagia serta bangga. Penulis ingin membuktikan bahwa suatu saat nanti, Elyana bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga dan saudara. Semoga Bunda dan Abah selalu diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT.

### **Kedua Adik Tersayang**

#### ***Dimas Yuda Prasetya & Muhammad Rizki Ananda***

Untuk keduanya, terimakasih sudah selalu menjadi penyemangat sekaligus penghibur bagi mbak. Semoga mbak bisa menjadi contoh yang baik bagi kalian berdua. Kurangnya tolong jangan diikuti. Kalian berdua selalu menjadi motivasi berharga bagi mbak. Semoga kalian juga selalu dipermudah dan diberi kesuksesan dalam pendidikan dan agama oleh Allah SWT.

**HALAMAN MOTTO**

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia.”

*“Do one thing,*

*Everyday,*

*That scares you”*

**-- Anna Eleanor Roosevelt –**

*“I beg you*

*Take courage;*

*The brave soul*

*Can mend even disaster”*

**--Catherine the Great--**

*Therefore,*

*“Happines lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort.”*

**--Franklin D. Roosevelt--**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb* 

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, di sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Mashori S.Psi., M.Psi., M.Ag., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.
2. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasehat dan bimbingan yang membangun kepada penulis selama ini sehingga proses skripsi yang dapat menjadi lebih mudah dan terarah. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering membuat kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. Semoga Bapak dipermudah dan diberi kelancaran oleh Allah SWT dalam melanjutkan studi S3 serta meraih capaian-capaian lainnya.
3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat bagi segala

kebingungan dan keluhan selama menjalankan kuliah. Juga sebagai Dosen Penguji Sidang Skripsi, terimakasih untuk segala saran dan arahnya. Mohon maaf jika selama ini telah menjadi mahasiswa yang merepotkan dengan berbagai pertanyaan dan keluhan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. Semoga Bapak menjadi seorang yang amanah dan bersungguh-sungguh dalam memberikan kontribusi terutama sebagai Sekertaris Prodi. Semoga dimudahkan dalam mencapai segala tujuan baik Pendidikan maupun rumah tangga.

4. Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A. selaku dosen HI UII yang telah memberikan saran dan masukan kepada skripsi penulis sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal dan Dosen Penguji Sidang Skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. Terimakasih juga atas segala kritik yang membangun sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. Semoga segala tujuan hidup bapak diberi kelancaran oleh Allah SWT dalm pencapaiannya.
5. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Ibu Karina Utami Dewi, S.IP, M.A., Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. yang telah sabar untuk mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan. Mohon maaf apabila selama masa perkuliahan penulis banyak berbuat kesalahan. Semoga para Dosen-Dosen HI mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Semoga selalu



diberikan kesuksesan, kesehatan, umur panjang serta kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.

6. Mbak Mardiatul Khasanah cantik yang telah memberikan kemudahan dalam segala urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih sudah selalu ada untuk memberikan segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penulis kapanpun dan dimanapun.
7. Kedua orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan baik berupa material maupun moral. Terimakasih juga atas tekanan yang membangun melalui pertanyaan “skripsinya sudah sampai mana?”, “kapan wisuda?”, “kok main terus? Enggak skripsian?” sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi motivasi besar bagi penulis agar segera menyelesaikan skripsi. Doa-doa serta motivasi lainnya juga tentu menjadi pendorong terhadap selesainya skripsi ini. Kata terimakasih tidak cukup diucapkan atas jasa yang diberikan oleh orang tua dari dalam kandungan hingga saat ini. Semoga segala usaha-usaha tersebut dibalaskan dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Penulis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi agama, keluarga dan saudara sehingga akan selalu menjadi kebanggaan.
8. Keluarga Besar Mustafa dan Keluarga Besar Saleh Tohiri. Terimakasih atas segala nasehat, dukungan dan selalu ada untuk penulis dalam keadaan apapun. Terimakasih juga sudah selalu ada untuk mendengar segala keluhan penulis. Terimakasih sudah selalu mengingatkan untuk tidak lalai

dan selalu menomor satukan agama. Semoga segala kebaikan keluarga besarku dibalas sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Aamiin.

9. Terimakasih kepada Dream Ceker: Puteri Anandita, Rina Triana, Mami Suci Probo, Fairuz Abadi dan Rizky Ade yang selalu mendengarkan keluh kesah sebagai sahabat terbaik. Terimakasih atas pertanyaan dan pernyataan yang selalu diucapkan sebagai motivasi dan penenang hati dalam menjalani hidup. Terimakasih sudah selalu ada di saat yang lain pergi entah kemana. Semoga segala kebaikan kalian terbalaskan oleh Allah SWT. Semoga kita tetap selalu bisa saling memaki tanpa ada rasa termaki ya teman-temanku. Semoga mimpi kita sama-sama dari awal sampai surga bisa terwujud dengan sama-sama introspeksi diri dan saling menasehati aamiin yarobbalalamiin. Jangan ada yang “taken” kalo meninggalkan teman-teman lainnya “non-taken” wkwk.
10. Terimakasih kepada My Everglow: Devi 3 sks, Trivida tukang php, adek Vikram, Oppa Reksi, Eonni Siti yang selalu ada dari awal kuliah sampai seterusnya insyaAllah. Terimakasih sudah selalu setia dengerin curhatan, omelan, keluhan sampai tanggapan aku walaupun kadang-kadang *non-sense*. Terimakasih sudah mau jadi temen yang selalu setia dari awal sampai akhir dimanapun dan kapanpun. Terimakasih sudah selalu memberi dukungan dan motivasi dalam aktivitas baik mengenai akademik maupun hidup selalu membuat penulis lebih semangat dan ikhlas dalam menjalani kedua cobaan tersebut. Walaupun terkadang kita berbeda pendapat, tapi pendapat itu sama sekali tidak mengintervensi koneksi yang telah terbangun di antara kita sejak dini. Terimakasih sudah

selalu jadi teman yang *real no fake* dan (semoga) jarang ngomongin di belakang. Semoga segala yang kalian berikan kepada penulis senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Semoga teman-teman sekalian tetap menjadi *everglow*-nya penulis dalam perjalanan karir ke depan. Cepet nyusul ya jangan terlalu lama!

11. Terimakasih teman-teman yang sudah berpartisipasi baik dalam proses penyelesaian skripsi penulis ataupun menjadi penyemangat: Aufa, Regina, Vivid, Thalia, Della, Sausan, Bintar, Novrizal, Azeem dan Fariz yang selama proses penyelesaian skripsi ini telah memberi nasehat, dukungan hingga menjadi tempat keluh kesah penulis. Semoga dibalas sebaik-baiknya oleh Allah SWT.
12. Teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama 4 tahun ini terutama teman-teman kelas B. Terima kasih telah mau menempuh jalan bersama dengan tujuan dan nasib yang berbeda-beda.
13. Terimakasih untuk Milo dan Elyana yang sudah berjuang kemudian  
Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Terima kasih atas doa, motivasi serta dukungannya.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berperan baik yang telah disebutkan maupun tidak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Elyana Ade Pertiwi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Signifikasi.....	8
1.5 Cakupan Penelitian.....	9
1.6 Kajian Pustaka .....	9
1.7 Perspektif Teori / Konsep.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	19
1.8.1 Jenis Penelitian .....	19
1.8.2 Subjek Penelitian .....	19
1.8.3 Alat Pengumpulan Data.....	19
1.8.4 Proses Penelitian .....	20

### **BAB II PERKEMBANGAN XENOFOBIA DI PRANCIS**

2.1 Masuknya Xenofobia ke Eropa .....	21
2.2 Xenofobia di Prancis .....	22

2.3 Dinamika Xenofobia di Prancis (2012 – 2018).....	24
2.3.1 Xenofobia Terhadap Imigran.....	27
2.3.2 Xenofobia terhadap Minoritas .....	28

**BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRANCIS DALAM MENANGANI PENINGKATAN XENOFobia MASYARAKAT DI PRANCIS**

3.1 Prinsip Dasar Republik Prancis .....	38
3.2 Kebijakan Presiden Francois Hollande .....	42
3.2.1 Kebijakan Terhadap Imigran dan Minoritas .....	46
3.2.2 Usaha dalam Meredam Sikap Xenofobia Masyarakat.....	50
3.3 Kebijakan Presiden Emmanuel Macron .....	54
3.3.1 Kebijakan Terhadap Minoritas dan Imigran.....	54
3.3.2 Usaha dalam Meredam Sikap Xenofobia Masyarakat.....	60

**BAB IV FAKTOR-FAKTOR UTAMA PENYEBAB TERJADINYA PENINGKATAN XENOFobia DI PRANCIS**

4.1 Konflik Intergroup Masyarakat asli Prancis dengan Orang Asing.....	65
4.2.1 Ancaman Realistik.....	69
4.2.2 Ancaman Simbolis .....	74
4.2.3 Kegelisahan Antar Kelompok.....	80
4.2.4 Stereotip yang negatif .....	81

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran dan Rekomendasi .....	99

<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>101</b>
----------------------------	------------

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Grafik peningkatan xenofobia masyarakat asli hingga tahun 2015.....	30
Grafik 2. Grafik peningkatakan xenofobia masyarakat hingga tahun 2017 .....	36
Grafik 3. Grafik peningkatan sikap toleransi masyarakat asli .....	44
Grafik 4. Grafik serangan yang melibatkan kelompok radikal Islam.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses terbentuknya sikap xenophobia masyarakat. ....	35
Gambar 2. Tingkat ketidak puasan masyarakat Eropa terhadap kebijakan EU mengenai imigran.....	66
Gambar 3. Peta pendapat masyarakat .....	71
Gambar 4. Perbandingan bagi panggilan pekerjaan berdasarkan agama.....	73
Gambar 5. Peta penyebaran imigran dari Suriah dan Irak .....	84
Gambar 6.....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Hollande dan Macron .....	62
Tabel 2. Hasil Temuan Variabel .....	89



## DAFTAR SINGKATAN

CAI	:	Contract of Integration
CILRA	:	Inter-Ministrial Committee to Fight Racism and Anti-Semitism
EU	:	European Union
RCT	:	Rational Conflict Theory

## ABSTRAK

Sikap xenophobia masyarakat Prancis terus meningkat dari tahun 2012 hingga saat ini. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2015 disebabkan oleh arus imigran secara besar-besaran di Eropa. Pemerintah yang menjabat pada kurun waktu tersebut adalah Francois Hollande dan Emmanuel Macron. Kedua presiden telah menetapkan berbagai kebijakan dalam mengurangi sikap xenophobia masyarakat baik dari level domestic hingga internasional. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap dinamika xenophobia yang terjadi. Masyarakat justru menentang kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan imigran. Melalui *Realistic Conflict Theory* di sini akan dijabarkan factor-faktor mendasar yang menjadi alasan peningkatan xenophobia masyarakat. Prasangka masyarakat Prancis terbentuk dari peristiwa-peristiwa yang dialami ataupun diketahui dengan adanya keterlibatan orang asing yang sering menjadi tersangka. Selain itu, nasionalisme masyarakat juga telah terbentuk melalui konstitusi dan nilai-nilai negara Prancis yang tidak mengakui adanya minoritas.

**Kata Kunci:** *Prancis, Peningkatan Xenofobia, Aksi Xenofobia, Kebijakan Pemerintah, Realistic Conflict Theory*

## ABSTRACT

Xenophobic attitudes in French society continue to increase from 2012 until nowadays. The most significant increase occurred in 2015 due to largest-scale immigrant flows into Europe. The governments that served in those periods was Francois Hollande and Emmanuel Macron. These two presidents have set various policies to reduce the xenophobic attitude in France society from local level, domestic level to international level. However, these policies do not show any significant influence on the dynamics of this phenomenon. The xenophobic attitudes lead the France people to oppose their government policies, especially related to immigrants. Through *Realistic Conflict Theory* here, this thesis will explain every fundamental factor that are as the factors for the increasing of xenophobic attitudes. The prejudice of the French people is formed from every event experienced or discovered that involving foreigners who often become the suspects, especially the minorities. In addition, strong nationalism has also been formed through the constitution and the values of the French Republic that does not recognize the existence of the minority.

**Keywords:** *France, Government Policies, Realistic Conflict Theory, Xenophobia*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, fenomena xenofobia sudah menjadi hal yang umum untuk diperbincangkan di lingkup studi Hubungan Internasional terutama mengenai peningkatan protes-protes xenofobia di Eropa (Jones & Stan, 2017). Xenofobia sendiri merupakan sentimen yang dimiliki oleh seseorang karena adanya rasa takut, tidak suka atau kebencian terhadap orang asing. Masyarakat yang memiliki pemikiran xenofobia cenderung menganggap Imigran sebagai orang-orang kriminal yang kejam, jahat, miskin dan tidak berpendidikan (Espenshade & Henpstead, 1996, hal. 9). Pemikiran ini juga terjadi di kawasan yang terbilang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi yaitu Eropa.

Selama kurun waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2017, sentimen xenofobia jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah imigran di Eropa (Marozzi, 2015). Dari data statistik Uni Eropa (EU) pada tahun 2017, negara-negara di Eropa menerima sekitar 4,7 juta imigran dari arus imigrasi tahun 2015 sedangkan 2,8 juta jiwa memilih mencabut kependudukan sebagai negara anggota EU. Dari seluruh jumlah tersebut, Prancis merupakan negara ketiga setelah Jerman dan Inggris yang paling banyak menampung para imigran yaitu sebanyak 363,9 ribu jiwa (European Commission, 2017).

Masalah xenofobia sendiri bukanlah hal yang baru di Prancis. Xenofobia yang mulai muncul dari tahun 1880 tersebut mengalami kenaikan dan penurunan

(Brubaker, 1992, hal. 112). Namun dimulai dari tahun 2012 ketika Prancis diduduki oleh pemerintahan Francois Hollande dan Emmanuel Macron, angka xenofobia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017.

Walau aksi-aksi terhadap xenofobia saat ini lebih besar kepada imigran-imigran di Prancis, namun masyarakat minoritas di Prancis turut menjadi sasaran. Stereotip masyarakat mengenai imigran telah terbentuk dengan buruk bahkan, Sarkozy pernah mengatakan bahwa minoritas dan imigran yang tinggal di pinggiran kota sebagai kaum yang urakan atau pemberontak (BBC, 2012).

Dalam teorinya, keadaan ras yang heterogen dapat meninggikan angka tensi ras karena semakin besar proporsi dari kelompok minoritas maka semakin besar kompetisi yang terbentuk dalam kesempatan pekerjaan dan seluruh akses ekonomi dalam sumber daya negara. Tidak hanya dalam bentuk objek saja, namun sebagai persepsi subjek, orang-orang yang terlihat berbeda dari orang pada umumnya dapat menjadi ancaman (McClain, et al., 2006, p. 575). Sedangkan dilihat dari sistem hukum Prancis saja, tidak ada pencantuman secara eksplisit mengenai nasionalisme, ras, etnis atau agama untuk minoritas. Sistem hukum Prancis hanya menegaskan hubungan antar negara dengan individu saja. Dengan tujuan awal untuk menegakkan *absolute equality* namun, yang terjadi pada kenyataannya adalah sistem hukum tersebut menjadikan minoritas tidak terlihat di depan hukum (Republique Francaise, 1978, pp. 9-13). Hal ini juga terinterpretasikan bahwa pemerintah dilarang untuk menghitung data atau statistik mengenai ras, etnis, agama atau hal-hal yang masih belum terlihat di masyarakat Prancis serta sensus nasional tidak boleh melibatkan pertanyaan mengenai rasa atau etnis (Jansen, 2016).

Dari legal sistem saja, minoritas di Prancis sudah mengalami diskriminasi. Belum lagi bagi minoritas Muslim dibenturkan dengan nilai Prancis *laïcité* atau sekuler. Hal tersebut mengakibatkan pelarangan burka dan niqab bagi wanita Muslim di setiap tempat umum di Prancis. Wanita Muslim hanya diperbolehkan menggunakannya di rumah dan ketika keluar untuk melakukan ibadah saja (Weaver, 2017). Masyarakat minoritas dituntut untuk mempraktikkan segala nilai yang ada di Prancis namun kesulitan untuk mempertahankan nilai mereka yang sudah melekat (Inhae, 2016).

Aksi-aksi kekerasan terhadap minoritas juga turut meningkat seiring berjalannya waktu. Aksi-aksi tersebut juga bersamaan dengan teror-teror yang berhubungan dengan minoritas-minoritas di Prancis walaupun terornya terjadi di luar Prancis. Aksi-aksi diskriminasi kepada masyarakat minoritas tidak hanya berupa verbal, melainkan aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat dengan nasionalisme yang tinggi. Aksi ini dilakukan terutama kepada Muslim di Prancis karena tragedi-tragedi yang berhubungan dengan ISIS di Charlie Hebdo. Tragedi ini disusul dengan *march* mengenai kebebasan berbicara di Prancis dan hampir tidak ada Muslim yang turut serta (Birnbaum M. , 2016).

Peningkatan angka-angka xenofobia tersebut juga disusul dengan meningkatnya angka-angka protes rasis, anti-semitis, *islamophobia* yang menandakan sebagai aksi dari sikap xenofobia mereka. Bahkan banyak komunitas yang terbentuk dalam melancarkan aksi-aksi tersebut. Hal ini tentunya mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan (Chazan, 2014).

Masa jabatan Francois Hollande sebagai presiden menjadi masa awal kebijakan Prancis yang tidak anti imigran setelah Sarkozy sebagai wakil dari partai kanan berpendapat bahwa di Prancis sudah terlalu banyak orang asing dan Prancis tidak sanggup untuk berintegrasi secara penuh dengan minoritas, orang asing dan imigran-imigran yang ada (Samuel H. , 2012). Hollande sangat anti terhadap aksi kekerasan termasuk yang mengindikasikan rasisme, anti-semitis hingga xenofobia. Hollande bahkan sangat aktif dalam mempromosikan hak asasi manusia agar aksi-aksi kekerasan tersebut terhindar di Prancis (Rubin & Breeden, 2015).

Pemerintahan Hollande memutuskan berbagai kebijakan untuk diterapkan dalam merespon kenaikan angka xenofobia. Arah kebijakan Pemerintah Prancis fokus dalam proses integrasi kaum muda dengan tiga aspek yaitu aspek pendidikan seperti pengajaran Bahasa Prancis terhadap anak-anak imigran, aspek pekerjaan dengan dibukanya lapangan pekerjaan oleh pemerintah Prancis yang bekerja sama dengan Acse sebagai lembaga perlindungan hak asasi di Prancis dan aspek kohesi sosial dengan kerjasama aktor non-pemerintah dan komunitas lokal. Selain itu, pendekatan baru demi memecah ketidaksetaraan di Prancis juga menjadi target utama Prancis kala Hollande menjabat (Dublet, 2014, hal. 5).

Pemerintah tidak segan melarang segala aktivitas yang berkaitan dengan xenofobia dan yang mengancam keamanan serta perdamaian nasional agar pemikiran xenofobia tidak cepat menyebar seperti pelarangan segala aktivitas perkumpulan yang pernah dilakukan oleh kelompok Pegida yang merupakan kelompok anti-imigran 2016 lalu (Glasser, 2016). Selain itu pemerintah Prancis turut mempromosikan hak asasi manusia sesuai dengan aturan EU dengan dipermudahnya kependudukan bagi Pencari suaka. Pencari suaka bahkan diberikan

jaminan hak oleh pemerintah (The Law Library of Congress, 2016). Prancis juga banyak melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga lainnya baik dari tingkat internasional, regional maupun lokal mengenai isu ras dan diskriminasi. Prancis juga turut aktif dalam mempromosikan hak asasi manusia dan juga aktif dalam konferensi internasional mengenai hak asasi manusia (France Diplomatie, 2013).

Setelah lima tahun menjabat sebagai Presiden, Hollande kemudian digantikan oleh Emmanuel Macron yang menang dari Marie Le Pen pada Bulan Mei 2017 lalu. Emmanuel Macron mulai menjabat sebagai presiden di Prancis dengan kebijakannya yang ketat terhadap arus imigran dan Pencari suaka. Kebijakan tersebut meliputi keinginan Macron untuk mengembalikan imigran ilegal kembali ke negara asal mereka lalu membatalkan berkas Pencari suaka yang gagal dan memulangkan imigran dengan tujuan ekonomi (McGuinness, 2018). Walau kebijakan Macron dinilai ketat, tidak menjadi nilai bahwa Macron merupakan pemerintah yang tidak toleran. Sama seperti Hollande, Macron juga sangat aktif dalam melakukan tindakan yang mendukung hak asasi manusia seperti berjanji untuk melawan aksi-aksi kekerasan terutama kepada wanita apalagi wanita yang ada dalam kelompok minoritas sering mendapatkan diskriminasi. Selain itu, Macron juga memerintahkan agar dikerahkannya polisi lebih meluas dibandingkan sebelumnya hasil mencegah 30 serangan yang direncanakan. Selain itu, di bawah pemerintahannya, Macron dapat membubarkan 11 kelompok agama ekstremis dan menangkap 41 orang yang memberikan bantuan kepada simpatisan ekstremis (DW News, 2017). Macron mengatakan akan mendukung setiap gerakan yang bertujuan untuk memerangi intoleransi di manapun (Agence France-Presse, 2017).

Selain aktif dalam mendukung gerakan anti kekerasan, Macron juga tidak kalah aktif dalam membela status para imigran. Bahkan Macron mendukung kebijakan yang telah dilakukan oleh Merkel di EU dalam membuka gerbang sebesar-besarnya bagi para imigran. Selain itu, fokus yang diberikan oleh Macron kepada Pencari suaka dalam memberi perlindungan terbilang cukup baik. Namun, Macron tidak sepenuhnya setuju untuk memberikan “perlindungan” tersebut kepada seluruh Pencari suaka, beberapa dari mereka menurut Macron harus kembali ke negaranya semula (Murphy, 2017). Macron juga menunjukkan bahwa dirinya peduli dengan hak asasi manusia kepada imigran dengan tidak segan terlibat langsung dalam merelokasi para imigran di 20.000 unit penginapan. Selain itu, Macron juga berniat untuk membantu para imigran mempelajari Bahasa Prancis. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Macron ini merupakan langkah yang ketat terhadap imigran dan Pencari suaka namun tetap tidak ingin ada aksi kekerasan terjadi (Nossiter, 2018).

Usaha dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar lebih terbuka walau pada Macron kebijakan imigrasi terbilang cukup ketat namun tetap membela hak asasi imigran. Usaha-usaha tersebut justru tidak sesuai dengan harapan. Buktinya angka xenofobia di Prancis di tahun 2013 yang pada awal hanya sebanyak 22,7% masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak ingin bertetangga dengan warga asing menjadi meningkat. Bahkan aksi-aksi protes anti-imigran di Prancis juga turut meningkat (Fisher, 2013). Kebijakan pemerintah Prancis menjadi alasan terjadinya protes dan bahkan menjadi pendorong xenofobia tersebut. Sedangkan pada tahun 2014, dari survei yang dilakukan oleh Ipsos, banyak masyarakat Prancis yang tidak menyukai



masyarakat asing. Sebanyak 66% dari poling tersebut mengatakan bahwa masyarakat asing sudah terlalu banyak tinggal di Prancis sedangkan 59% menuding bahwa para imigran di sana tidak berusaha untuk berintegrasi dengan masyarakat asli. Angka tersebut meningkat sebanyak 4% dari tahun 2013 lalu. Selain itu, masyarakat yang mengatakan bahwa budaya Islam tidak dapat disatukan dengan budaya Prancis sebanyak 63% (France 24, 2014). Angka tersebut tetap meningkat di tahun-tahun selanjutnya (United Nation, 2017).

Jika dilihat dilihat dari populasi penduduk di Prancis pada tahun 2016 sebanyak 67 juta jiwa, lalu jumlah imigran kurang lebih 8 juta jiwa, maka total imigran dibandingkan jumlah penduduk adalah 6,6% (European Commission, 2017). Hal tersebut mengartikan bahwa 6,6% dari 67 juta jiwa tersebut begitu memberi pengaruh terhadap peningkatan xenofobia terutama pada survei YouGov tahun 2016 lalu, sebanyak 47% masyarakat Prancis mengaku terlalu banyak orang asing dan Prancis sudah tidak seperti rumah lagi (Osborne, 2016). Selain itu, dilihat dari fakta-fakta di atas, terdapat paradoks dimana Pemerintah Prancis telah berupaya dengan usaha dan kebijakannya dalam melawan sentimen xenofobia baik dari level internasional, regional maupun lokal namun angka xenofobia justru semakin meningkat. Persentase angka imigran yang kurang dari 10% dan paradoks tersebut membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti fakta-fakta yang ada lebih lanjut lagi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa terjadi peningkatan fenomena xenofobia di Prancis dalam periode kepemimpinan Francois Hollande dan Emmanuel Macron (2012-2018)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi peningkatan xenofobia di Prancis pada tahun 2010 hingga tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dalam meningkatnya xenofobia di Prancis.
3. Untuk mengetahui efektivitas usaha pemerintah Prancis dalam melawan sentimen xenofobia.

### **1.4 Signifikansi**

Penelitian ini penting dilakukan mengingat Prancis merupakan salah satu negara di Eropa Barat dan merupakan anggota EU yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh EU. Tingkat xenofobia yang semula rendah dan terus meningkat hingga saat ini tentu memiliki pengaruh juga ke negara-negara Eropa lainnya yang notabene Prancis menduduki tingkat ketiga dengan orang asing terbanyak di Eropa. Upaya pemerintah dalam melawan sentimen xenofobia bahkan dilakukan hingga ke tingkat internasional namun justru tingkat xenofobia semakin melonjak dari tahun ke tahun. Paradoks tersebut belum menjadi perhatian masyarakat untuk diteliti hingga saat ini terutama dalam periode kepemimpinan Francois Hollande dan Emanuel Macron. Sebagian besar penelitian hanya meneliti dalam level sosial tanpa mempertimbangkan kebijakan pemerintah (Hargreaves, 2007) atau dalam level pemerintahannya terutama sayap kanan saja (Freedman, 2004) atau bahkan membahas dari sisi kewarganegaraan (Taras, 2012). Belum ada penelitian yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Prancis sebagai pendorong dari meningkatnya sentimen xenofobia di Prancis. Penelitian ini akan mencoba untuk mendukung

penelitian-penelitian yang telah ada sebagai pelengkap dalam menyambungkan dua variabel tersebut.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam lingkup kajian Politik dan Pemerintahan Negara Prancis serta kajian sosial masyarakat Prancis pada periode kepemimpinan Francois Hollande dan Emmanuel Macron. Dengan memusatkan pada keadaan sosial domestik, kebijakan luar negeri dan hubungan dengan EU, penelitian ini hanya mengambil daerah regional Eropa Barat dengan negara-negara yang bersinggungan atau dengan aktor-aktor yang berpengaruh. Lalu, penelitian ini akan dibahas dari tahun 2012 sampai tahun 2018 saat angka xenofobia di Prancis mengalami kenaikan. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Prancis yang dilakukan baik dari level internasional, regional maupun lokal dalam melawan xenofobia. Selain itu, kelompok kepentingan, media dan keadaan sosial Prancis juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Lalu hal-hal yang mempengaruhi pemikiran masyarakat Prancis terhadap nilai yang ada pada mereka dan juga mengenai imej mereka terhadap orang asing sehingga hal-hal tersebut menjadi identitas pendukung bagi sentimen xenofobia mereka.

### **1.6 Kajian Pustaka**

Dalam penelitian pustaka mengenai sentimen xenofobia di Prancis sendiri ada beberapa buku dan jurnal yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Rogers Brubaker menjelaskan mengenai pertama kalinya istilah xenofobia dipakai dalam studi Hubungan Internasional. Istilah xenofobia berkembang pada tahun 1880

pertama kali di Amerika Serikat ketika imigran yang berasal dari Eropa Timur datang. Namun sentimen xenofobia menyebar dengan cepat hingga ke daratan Prancis yang saat itu sedang mengalami revolusi pasca depresi ekonomi. Keadaan nasionalisme masyarakat Prancis kala itu mengalami ambiguitas karena terpecah menjadi dua golongan yaitu asimilasionis atau masyarakat yang bersedia menerima budaya baru dari etnis-etnis baru yang datang dibawa imigran dan ekslusionis atau masyarakat yang tidak ingin menerima imigran karena etnis mereka berbeda. Seiring dengan revolusi di Prancis, pemerintah sedang gencar untuk meningkatkan nasionalisme, namun nasionalisme kanan juga ikut tumbuh beriringan dengan xenofobia. Dari masyarakat nasionalis yang berpikiran ekslusionis tersebut muncullah istilah *counternationalism*. Hingga saat ini pemikiran *counternationalism* tersebut semakin kuat (Brubaker, 1992, hal. 112-5). Berbeda dengan Raymond Taras yang memusatkan pembahasan mengenai fenomena *Islamophobia*-nya saja dibandingkan dengan Brubaker yang membahas xenofobia secara umum di Jerman dan Prancis. Selain itu *islamophobia* tersebut diarahkan kepada pembicaraan politik. Namun, di satu sisi *islamophobia* menjadi ancaman bagi nilai dan norma yang telah ada di Eropa selama ini, oleh karenanya hal tersebut harus diatasi melalui kebijakan imigrasi dan integrasi yang dianut oleh Prancis (Taras, 2012, hal. 51-2). Walau kedua pendapat tersebut telah mencakup sedikit masalah dari penelitian, namun penjelasan kedua penulis tersebut tidak membahas bagaimana pengaruh kelompok-kelompok yang ada di Prancis dan penerapan kebijakan yang diadopsi dari EU dalam level domestik dan lokal.

Lalu, pendapat Hervik mengemukakan saat ini fenomena xenofobia memberi peningkatan yang signifikan terhadap protes-protes yang terjadi di Eropa

terutama di Prancis. Kelompok-kelompok anti-imigran, anti-orang asing atau anti-kelompok berbeda menjadi cerminan juga terhadap peristiwa 9/11 yang telah menjadi isu dunia. Bedanya pendapat Hervik lebih mengemukakan bahwa media sangat mengambil andil terhadap penyebaran sentimen tersebut seperti yang terjadi pada krisis kartun Muhammad di Denmark pada 2005 lalu. Selain itu, terror-teror yang terjadi dengan pengakuan kelompok Islam sebagai pelaku peristiwa tersebut juga menambah angka xenofobia di Eropa. Namun, Hervik mengklaim bahwa Islamofobia merupakan bagian dari xenofobia dan nativisme yang juga berpengaruh terhadap peningkatan sentimen xenofobia di Prancis. Xenofobia merupakan reaksi natural dari masyarakat terhadap anti-imigrasi yang terjadi di Eropa yang sedang meningkat. Peristiwa ini merupakan legitimasi atas ide 'satu budaya' yang harus ada di Prancis (Hervik, 2015, hal. 796-806). Namun, berbeda dengan pendapat David Haekwon Kim dan Ronald R. Sundstrom yang mengatakan bahwa xenofobia merupakan fenomena yang berbeda dibandingkan dengan fenomena rasisme dan nativisme dalam konsepnya. Rasisme merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab terjadinya xenofobia di Prancis yang berpendapat bahwa kehadiran populasi imigran memiliki pengaruh terhadap sentimen xenofobia di Prancis. Namun dengan *Contact Theory* justru keduanya menemukan bahwa populasi imigran yang lebih besar mengurangi sikap xenofobia. Ini tentu kontradiktif dengan hasil survei yang dilakukan oleh baik Lembaga INSEE maupun Ipsos dan pendapat-pendapat lainnya (Sundstrom & Haekwon, 2014, hal. 25-31). Melengkapi pendapat Sundstorm dan Haekwon, menurut Abel Francois, fenomena xenofobia yang terbentuk di Perancis disebabkan oleh dua faktor yaitu adanya kontak dan kompetisi dengan imigran. Kedua aspek tersebut dilakukan harus

disamakan dengan adanya toleransi karena jika tidak maka akan menimbulkan xenofobia. Tetapi karena imigran dipandang sebagai kompetitor dalam mendapatkan sumber daya negara Prancis maka hal tersebut justru meningkatkan rasa intoleransi antar kedua pihak. Peningkatan juga diiringi ketika masyarakat asli merasa tersaingi dalam hal ekonomi dengan populasi imigra yang semakin bertambah di Prancis. Selanjutnya Francois meneliti keadaan tersebut dalam konteks *European Values Survey*. Francois menegaskan bahwa kontak dan kompetisi sangat memberikan efek terhadap toleransi kepada populasi imigran di Prancis. Mengikisnya toleransi juga didukung pada daerah kota-kota dengan populasi imigran yang tinggi dan angka pengangguran yang juga tinggi (Francois, Berton, & Matthews, 2013, hal. 47).

Sama halnya dengan imigran, sikap masyarakat Prancis terhadap minoritas di Prancis sendiri sudah tidak baik. Menurut Leah Bassel, minoritas wanita di Prancis dan di Inggris sangat tidak diuntungkan oleh keadaan sosial. Bassel mengatakan kekerasan dan penghinaan terhadap wanita dalam suatu kelompok minoritas. Wanita tersebut biasanya yang memiliki kulit hitam, Muslim, Latina dan lain lain. diskriminasi yang tinggi membuat terbentuknya pemikiran rasis hingga xenofobia. Hingga krisis ekonomi yang terjadi, kekerasan masih terbilang umum hingga pada tahun 2008 pasca krisis ekonomi di Eropa, pemerintah Prancis juga berusaha untuk memulihkan keadaan ekonomi sekaligus menumbuhkan rasa kesetaraan. Batu loncatan baru yang didapat adalah dengan menghapus prasangka terhadap minoritas perempuan dalam krisis ekonomi dan memusatkan perhatian terhadap kebijakan dan sumber daya agar hak-hak ekonomi siapapun dapat terealisasikan. Namun, hal tersebut tentu belum dapat membalikkan keadaan karena pemahaman yang sudah

tertanam dari generasi ke generasi mengenai minoritas utamanya adalah wanita. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas wanita masih sering terjadi hingga saat ini jika dibandingkan dengan kelompok pria dalam minoritas tersebut (Bassel & Emejulu, 2017, hal. 99-114). Penulis di sini ingin mencoba untuk melengkapi dan mengkolaborasikan antara kebijakan pemerintah dan keadaan sosial di Prancis sehingga terjadinya peningkatan xenofobia. Selain itu peneliti ingin mencari titik tengah dan menggali lebih dalam mengenai xenofobia di Prancis pada periode kepemimpinan Francois Hollande dan Emmanuel Macron.

### **1.7 Perspektif Teori / Konsep**

Penelitian ini akan diteliti melalui perspektif *Realistic Conflict Theory* (RCT). RCT diusung oleh seorang psikologis, Muzafer Sherif yang mengembangkan teorinya mengenai konflik inter-grup dalam percobaan lapangannya yang terkenal The Robbers Cave. Singkatnya, The Robbers Cave adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh Sherif bersama dengan temannya pada tahun 1954. Percobaan ini akan meneliti mengenai interaksi antar kelompok dengan melalui tiga fase. Percobaan ini melibatkan 22 orang anak yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok dari kulit putih dan kelompok kelas menengah. Kedua kelompok beranggotakan anak-anak yang berusia sekitar 12 tahun pada saat kamp musim panas di taman Robbers Cave Oklahoma selama dua minggu. Mereka memiliki latar belakang sosioekonomi, agama atau dari keluarga yang berbeda-beda dan tidak saling mengenal satu sama lainnya (Sherif M. , 1954, pp. 140-192).

**Pada fase pertama**, Sherif membagi anak-anak menjadi dua kelompok dan membiarkan interaksi hanya terjadi di dalam kelompok saja dengan tujuan untuk

membangun identitas kelompok. Melalui beberapa permainan, anak-anak akhirnya saling mengenal satu sama lain tanpa mengetahui adanya kelompok lain. Hubungan anak-anak begitu harmonis dalam satu kelompok.

**Pada fase kedua,** setelah identitas kelompok terbangun, kelompok akhirnya dikenalkan dengan kelompok lainnya. Sherif memutuskan untuk memberikan mereka permainan dengan persaingan antar kelompok. Persaingan ini dengan tujuan mendapatkan hadiah bagi kelompok yang menang dan tidak ada konsekuensi bagi yang kalah. Anak-anak mulai menunjukkan kesetiaan terhadap kelompok dan saling mencurigai terhadap kelompok lain. Pada awalnya, konflik tercipta hanya melalui aksi verbal antar kelompok seperti saling menjatuhkan dengan nama. Setelah kompetisi terjadi, konflik ini berkembang hingga terjadi vandalisme pembakaran bendera kelompok lain dan pencurian barang-barang pribadi kelompok lain yang menyebabkan orang dewasa harus menengahi. Tetapi setelah ditengahi, tetap saja tidak terbentuk rekonsiliasi antar kelompok (Sherif M. , 1954, p. 143).

**Pada fase ketiga,** Sherif menginginkan adanya *cooling down* antar kelompok. Sherif mencoba mengumpulkan kedua kelompok dalam satu ruangan dengan menonton bersama. Setelah itu, Sherif mencoba membuat situasi dimana antar kedua kelompok saling ketergantungan dalam mencapai sebuah tujuan dengan keuntungan yang setara antar kelompok. Keharmonisan tumbuh pada kedua kelompok ketika mereka sama-sama saling membutuhkan bantuan dan harus bekerja sama (Baumeister & Vohs, 2015, p. 726).



Setelah penelitian selesai, Sherif meminta kepada anak-anak untuk memberikan kesan terhadap kelompok mereka dan kelompok lainnya. Mereka rata-rata mencantumkan hal-hal baik terhadap anggota kelompok mereka dan hal buruk terhadap kelompok lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antar kelompok dapat memicu timbulnya prasangka dan perilaku diskriminasi. (Sherif M. , 1958, pp. 349-356).

RCT merupakan teori sosial psikologi yang timbul akibat adanya persaingan antara kelompok di dalam (*in group*) yang melihat bahwa kelompok pendatang (*out group*) sebagai kompetitor yang akan memanfaatkan sumber daya milik *in group* (Sherif, Harvey, White, Hood, & Sherif, 1988, hal. 25). Beberapa poin yang menjadi pemikiran inti dari RCT adalah sebagai berikut (Baumeister & Vohs, 2015, hal. 725-6):

1. Minimal terdapat dua kelompok atau lebih sebagai aktor yang memiliki tujuan berbeda dalam perebutan akses sumber daya yang terbatas.
2. Sumber daya yang diperebutkan dapat bersifat fisik (tanah, makanan atau air) dan psikologikal (status, kekuasaan atau martabat).
3. Adanya perbedaan status sosial ekonomi, etnisitas dan gaya hidup antar kelompok.
4. Memungkinkan terjadinya *zero-sum-game* jika seorang individu dari suatu kelompok merasakan kekalahan atau kemenangan mutlak dari kelompok lain.

Dari empat pemikiran inti RCT tersebut maka akan menghasilkan konflik, stereotip negatif, diskriminasi dan prasangka (*prejudice*) antar kelompok. Konflik

tersebut dapat menyebabkan meningkatnya permusuhan antar kelompok dan perseteruan yang tak kunjung usai (Dodson, 2010). Sedangkan menurut Stephan, hasil dari prasangka sendiri dapat didukung dengan ancaman-ancaman yang timbul dari *out group* terhadap *in group*. Ancaman-ancaman tersebut terdiri dari:

1. Ancaman realistik (*realistic threat*), terjadi ketika kekuasaan ekonomi dan politik *in group* dianggap tertantang oleh *out group*.
2. Ancaman simbolik (*symbolic threat*), terjadi ketika adanya perbedaan nilai, kepercayaan, moral dan sikap antara *in group* dan *out group*.
3. Stereotip yang negatif (*negative stereotype*), tercipta ketika *in group* mengalami atau menyaksikan pengalaman-pengalaman buruk yang melibatkan *out group*.
4. Kegelisahan antar kelompok (*intergroup anxiety*), terjadi karena adanya stereotip negatif sehingga *in group* memilih untuk tidak berinteraksi dengan *out group*.

Ancaman-ancaman tersebut terkait langsung dengan konflik dalam pandangan dunia jika adanya perbedaan nilai, kepercayaan dan sikap yang terancam dari pendatang baru. Ancaman-ancaman tersebut juga menimbulkan perilaku “menghindar” yang dilakukan oleh *in group* terhadap timbulnya interaksi yang tidak baik dengan *out group*. Selain itu, individu dari *in group* merasa terancam dalam hal *self-image* jika melakukan interaksi dengan individu *out group*, ancaman tersebut bisa menimbulkan kegelisahan berkelanjutan (Stephan & Stephan, 1996 hal 33).

Dari gagasan yang diusung oleh teori RCT tersebut maka penelitian ini akan menjelaskan mengenai konflik inter-group dengan masyarakat Prancis sebagai *in group* dan orang-orang asing sebagai *out group*. Jika dilihat dari penerapan teorinya, *In group* di sini dimaksudkan kepada masyarakat Prancis yang memiliki sentimen xenofobia baik sebagai individu maupun termasuk dalam suatu kelompok anti-orang asing. Sedangkan *Out group* di sini dimaksudkan kepada orang asing, minoritas dan imigran yang ada di Prancis.

Masyarakat Prancis merasa terancam oleh orang asing, minoritas dan imigran baik yang ada di Prancis maupun yang hendak datang ke Prancis dalam segi ekonomi dan politik utamanya. Kesempatan pekerjaan, status sosial maupun politik direbut oleh *out group* sehingga adanya pendapat bahwa hak mereka direnggut. Terutama pemerintah Prancis yang mengeluarkan kebijakan mengenai penyetaraan imigran atas hak-hak mereka sebagai manusia (Library of Congress, 2016). Selain itu, rasa nasionalisme yang tinggi membuat masyarakat Prancis tidak ingin *out group* datang karena identitas mereka berbeda dan hal tersebut lantas dikatakan akan mengganggu identitas masyarakat Prancis yang sudah tertanam sejak lama.

Jadi, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan pemicu terbentuknya konflik antara masyarakat Prancis dengan *out group*. Prasangka buruk yang terus meningkat juga timbul dari ancaman-ancaman yang telah dipaparkan di atas seperti:

1. Ancaman realistik, tentunya ada kecemburuan yang timbul dari *in group* dalam segi ekonomi terutama pemerintah juga mengeluarkan bantuan-bantuan ekonomi agar tercapainya kesetaraan bagi setiap golongan

masyarakat di Prancis. *In group* bisa jadi merasakan adanya “perenggutan” hak ekonomi yang seharusnya untuk mereka tetapi disalurkan kepada para pendatang. Masyarakat Prancis sendiri berpendapat pemerintah harus lebih fokus terhadap kesejahteraan mereka terlebih dahulu (French Culture, 2011). Selain itu Aspek kedua yaitu politik dimana ketakutan akan hak politik terbagi kepada masyarakat pendatang yang notabeneanya bukan keturunan Prancis (Briancon, 2017).

2. Ancaman simbolis, karena terdapatnya perbedaan nilai, kepercayaan, moral dan sikap antara masyarakat Prancis dengan pendatang tentu membuat masyarakat Prancis segan menerima pendatang karena adanya rasa nasionalisme yang kuat dan agar nilai, kepercayaan, moral dan sikap masyarakat tetap seperti sedia kala (Nossiter, 2016).
3. Kegelisahan antar kelompok, rasa tidak percaya diri bisa timbul dalam masyarakat Prancis karena adanya generalisasi yang buruk mengenai orang-orang asing.
4. Stereotip yang negatif, generalisasi yang sudah ada di masyarakat tersebut merupakan generalisasi negatif yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya dan berkaitan dengan orang-orang asing bahkan minoritas yang ada di Prancis (Stokes B. , 2016).

Selanjutnya, penelitian ini akan meneliti sejauh mana konflik yang terjadi antar kedua kelompok tersebut lebih dalam lagi dengan bukti data-data yang ada lalu bagaimana efektivitas usaha pemerintah dalam menurunkan sentimen xenofobia di Prancis telah banyak dilakukan namun tetap terjadi peningkatan angka xenofobia.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana metode yang digunakan dengan melalui studi pustaka terhadap subjek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan tentu yang berkaitan dengan studi kasus meningkatnya sentimen xenofobia yang terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah imigran yang ada di Prancis dari tahun 2010 hingga tahun 2017. Penelitian kualitatif sendiri memiliki definisi yaitu sebuah metode yang digunakan dalam suatu penelitian dengan hasil data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik secara tertulis maupun secara lisan yang didapat dari hasil penelitian literatur yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu data dapat diperoleh melalui wawancara (Yusuf, 2014, hal. 328). Dimulai dengan studi pustaka yang telah dilakukan, belum ditemukannya kajian yang membahas mengenai peningkatan sentimen xenofobia seiring dengan meningkatnya jumlah imigran di Prancis pada tahun 2010 hingga 2017. Peningkatan tersebut memiliki paradoks dengan usaha pemerintah dalam memerangi sentimen xenofobia. Paradoks tersebut belum pernah dijadikan sebagai variabel penelitian sebelumnya.

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi bahasan penelitian adalah masyarakat Prancis yang memiliki sentimen xenofobia sebagai subjek utama. Selain itu, pemerintah Negara Prancis sebagai aktor yang membuat kebijakan.

### **1.8.3 Alat Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan melalui kajian-kajian tertulis seperti buku-buku, jurnal, dokumen, artikel di internet. Setiap kajian yang

ditemukan tentunya harus berkaitan dengan topik penelitian. Penelusuran pustaka ini juga dilakukan di tempat-tempat seperti perpustakaan-perpustakaan dan toko buku yang berada di Yogyakarta sebagai referensi buku. Berdasarkan Teknik penulisan melalui penelusuran pustaka, maka data yang diperoleh merupakan data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh melalui penelusuran tulisan-tulisan dari buku, jurnal dan artikel-artikel online yang berkaitan dengan topik penulisan.

#### **1.8.4 Proses Penelitian**

Setelah seluruh data yang berkaitan dengan topik penelitian telah terkumpul, lalu data-data tersebut akan dianalisis dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu dengan mengkaji data-data yang ada agar didapat informasi yang mendetail dan pengetahuan mengenai materi yang lebih dalam sehingga ditemukan gagasan kesimpulan per pembahasan. Kesimpulan tersebut dicatat secara tersusun dan terstruktur. Kemudian, pembagian gagasan hasil kajian yang telah dilakukan berdasarkan kesimpulan per pembahasan tadi melalui beberapa sub-bab yang akan diurutkan secara berurutan sesuai waktu. Selanjutnya adalah penjelasan mendetail dengan deskripsi dari hasil pembagian dari sub-bab terkait. Lalu, tahap terakhir adalah penarikan pemikiran atau interpretasi dari temuan dan deskripsi yang telah dilakukan sehingga menjadi sebuah kesimpulan menyeluruh sebagai hasil dari penelitian (Creswell, 2003, hal. 49-50).

## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN XENOFOBIA DI PRANCIS**

#### **2.1 Masuknya Xenofobia ke Eropa**

Perpindahan imigran sudah terjadi di Eropa sebelum perang dunia ke 2 terjadi. Kemudian pada akhir abad ke 19, Eropa sangat membutuhkan pekerja imigran terutama saat masyarakat Eropa kelas menengah tidak ingin melakukan pekerjaan buruh lagi sehingga menerima imigran buruh adalah pilihan pemerintah saat itu. Negara-negara maju Eropa saat itu yang sedang ingin meningkatkan industri negara sangat mengandalkan imigran dalam prosesnya. Awalnya, arus imigran yang terjadi hanya di dalam lingkup negara-negara Eropa saja seperti Portugis, Spanyol, Italia dan Yunani yang memilih Prancis, Inggris atau Jerman sebagai negara tujuan demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun, pada pertengahan tahun 1960-an, imigran juga turut berdatangan dari Afrika Utara, Timur Tengah dan Afrika. Selain memberikan keuntungan kepada imigran yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik, negara penerima imigran juga membutuhkan pekerja imigran dengan upah rendah sehingga dapat meningkatkan ekonomi negara (Messina, 2007, p. 21).

Lambat laun, kebutuhan pekerja imigran bagi negara-negara Eropa semakin menurun terutama akibat adanya resesi. Beberapa negara Eropa yang tergolong masyarakatnya menengah ke bawah menganggap perpindahan imigran ini sebagai invasi yang mengancam gaya hidup dan budaya masyarakat Eropa asli. Bahkan anggapan ini disusul dengan tindakan kekerasan yang timbul dalam masyarakat anti-imigran. Kekerasan yang terjadi pada masa tersebut merupakan awal dari terbentuknya sikap xenofobia di kalangan masyarakat Eropa. Selain itu, persepsi

masyarakat yang selalu menghubungkan imigran dengan kriminal juga semakin meningkatkan sikap xenofobia terutama karena banyak kasus kriminal yang melibatkan imigran (Ember, Ember, & Skoggard, 2005, p. 182). Toleransi yang menurun dan pernyataan xenofobia kala itu merupakan manifestasi dari rasa takut terhadap orang asing terutama imigran.

## **2.2 Xenofobia di Prancis**

Setelah masuk ke Eropa, sentimen xenofobia menyebar luas bahkan hingga ke Prancis. Namun, pemikiran xenofobia ini sudah berkembang di Prancis sejak lama tetapi belum sebagai xenofobia. Pada tahun 1880 ketika Prancis sedang melakukan revolusi pasca depresi ekonomi dan krisis nasionalisme, masyarakat kala itu terbagi menjadi beberapa golongan pendapat mengenai kategori kewarganegaraan Prancis. Adanya perdebatan mengenai status kewarganegaraan imigran juga menjadi masalah negara kala itu. Belum lagi masalah asimilasi, masyarakat Prancis kala itu dikatakan sedikit memiliki sifat *self-understanding* karena kebanyakan mengakui sebagai warganegara Prancis dari segi politik dan sosial dibandingkan dari segi etnis. Sehingga hal tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman etnisitas Prancis yang ada di masyarakat. Langkah asimilasi dijadikan sebagai solusi agar perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap masyarakat dapat bersatu dan membantu pemulihan negara melalui revolusi. Usaha ini menimbulkan pemahaman baru di kalangan masyarakat mengenai nasionalisme.

Nasionalisme kala itu disebut dengan '*the ambiguities of nationalism*' (nasionalisme yang ambigu). Nasionalisme yang terbentuk pun masih abu-abu dan melahirkan dua sentimen gabungan baru yang dikenal dengan nasionalisme asimilasionis dan nasionalisme eksklusionis. Kedua sentimen baru ini sama-sama



memiliki fokus objek terhadap imigran. Masyarakat **nasionalisme asimilasionis** bersedia untuk memberikan kewarganegaraan bagi para imigran dan menerima budaya baru dari etnis-etnis baru yang datang dibawa oleh para imigran. **Nasionalisme eksklusionis** ini meliputi adanya keinginan dalam melakukan proses asimilasi tanpa melibatkan imigran karena adanya perbedaan etnis. Dari masyarakat nasionalis yang berpikiran eksklusionis tersebut akhirnya berkembang menjadi “counternationalism” (Brubaker, 1992, pp. 112-5).

Pemikiran counternationalism inilah yang menjadi cikal bakal xenofobia. Namun, sentimen xenofobia baru jelas berkembang ketika pasca perang dunia ke 2 berakhir. Sama halnya dengan negara-negara Eropa pada umumnya, Prancis menerima pekerja imigran merupakan rencana dalam meningkatkan infrastruktur nasional dan rehabilitasi industri. Dengan menerima imigran, ekonomi Prancis akan meningkat dengan terbentuknya industri yang kian membaik. Imigran yang menetap di Prancis berasal dari Algeria, Italia, Spanyol dan Portugis (McDonald, 1969, p. 1). Arus imigran kala itu begitu meningkat dibandingkan sebelumnya. Peristiwa ini bahkan telah disebut sebagai gerakan perpindahan imigran. Para imigran dipindahkan secara permanen yang awalnya ditempatkan di bidang pertanian dan pertambangan kemudian dalam konstruksi dan industri berat. Sedangkan imigran jangka pendek bekerja hanya di bidang pertanian.

Peningkatan imigran bukan hanya memberikan dampak kenaikan ekonomi melainkan juga aksi kriminal yang melibatkan mereka. Masyarakat mulai resah dengan hal tersebut ditambah imigran kerap kali disalahkan oleh masyarakat sebagai sebab dari kemunduran negara dan dituduh sebagai perenggut kekayaan

alam. Peristiwa ini membawa xenofobia muncul di kalangan masyarakat (Roemer, Lee, Yi, & Straeten, 2007, p. 238).

### **2.3 Dinamika Xenofobia di Prancis (2012 – 2018)**

Kata xenofobia di kalangan masyarakat pada era Presiden Francois Hollande dan Emmanuel Macron sudah tidak asing lagi. Pasalnya, Xenofobia memang telah sering menjadi perbincangan dari masa presiden sebelum Hollande yaitu Presiden Nicolas Sarkozy. Sarkozy pernah memberikan pernyataan jelas bahwa imigran dan minoritas hanya merupakan penghambat bagi perkembangan negara. Bukan hanya itu, Sarkozy juga menganggap integrasi sosial negara juga akan sulit dicapai jika melibatkan para imigran. Pernyataan tersebut tentu memberi pengaruh terhadap peningkatan xenofobia di kalangan masyarakat. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga Presiden Hollande dan Presiden Emmanuel Macron menjabat (Samuel H. , 2012).

Xenofobia bahkan telah dideklarasikan sebagai Word of the Year tahun 2016 lalu sehingga isu ini menjadi isu yang layak untuk diperbincangkan (Dictionary.com, 2016). Sebelumnya memang tingkat xenofobia di kalangan masyarakat Prancis mengalami kenaikan dan penurunan. Pada awal kepemimpinan Hollande tahun 2012, Hollande disambut dengan tindakan xenofobia masyarakat melalui Twitter. *Hashtag* rasis yang menjadi tren di Prancis seperti #AGoodJew dilakukan oleh para pelajar disertai dengan tautan foto kamp konsentrasi Yahudi masa Perang Dunia ke dua dulu. Tidak jarang para pelajar melanjutkan tren tersebut dengan kata-kata yang menjatuhkan seperti “*A good Jew can reinflate your tire with his nose*” hingga “*A good Jew is a Jew dead on the tiles*”. Kata-kata ini tersebar di dunia maya dan menjatuhkan harga diri Yahudi. Pemerintah berhasil menghapus

segala aktivitas *hashtag* ini setelah melakukan beberapa sidang dengan pihak Twitter dan pelaku yang melakukan cuitan di Twitter (Greenhouse, 2013).

Selain itu, Christiane Taubira seorang politikus Prancis tidak luput dari serangan verbal karena berkulit hitam. Serangan verbal ini dilakukan oleh seorang anak kecil yang memanggilnya dengan sebutan *guenon* (*monyet*). Sikap tersebut dilakukan karena mereka menganggap Taubira sebagai simbol perkawinan sesama jenis kala itu. Banyak masyarakat yang melakukan protes akan disahkannya perkawinan tersebut bahkan beberapa anak-anak juga turut ikut serta dalam protes yang dilakukan masyarakat. Peristiwa ini merupakan peristiwa umum yang sering terjadi di Prancis bahkan orang tua dari anak-anak tersebut tidak melarang dan justru bangga akan wujud “protes” yang dilakukan oleh anak-anak mereka (Poirier, 2013). Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa sedari awal tahun 2012, sikap xenofobia sudah melekat pada beberapa masyarakat.

Selanjutnya, tingkat xenofobia masyarakat mengalami kenaikan dan penurunan hingga tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 tingkat xenofobia mengalami peningkatan yang cukup drastis. Peningkatan ini diakibatkan oleh peristiwa arus imigrasi yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Peristiwa ini merupakan arus imigran terbesar yang masuk ke Eropa hingga dapat menyebabkan krisis imigran (Chan, 2015). Bukan hanya krisis imigran, krisis identitas juga menjadi topik yang marak diperbincangkan pada media berita mainstream akibat dari arus ini (O'Brien, 2016).

Krisis imigran ini membuat negara-negara di Eropa kesulitan dalam mengatasinya sehingga menimbulkan perpecahan pendapat dalam relokasi imigran

antar negara. Dari data statistik EU pada tahun 2017, negara-negara di Eropa menerima sekitar 4,7 juta imigran dari arus imigrasi tahun 2015 sedangkan 2,8 juta jiwa memilih mencabut kependudukan sebagai negara anggota EU. Imigran yang berdatangan berasal dari beberapa daerah terutama negara yang sedang mengalami konflik. Penduduk Suriah (38%) merupakan penyumbang terbesar imigran diikuti oleh Afganistan (12%), Irak, Kosovo, Albania, Pakistan, Eritrea, Nigeria, Iran dan Ukraina. EU memilih untuk merelokasi para imigran ke seluruh negara-negara Eropa dengan sistem kuota (BBC, 2016). Dari seluruh jumlah imigran, Prancis merupakan negara ketiga setelah Jerman dan Inggris yang paling banyak menampung para imigran yaitu sebanyak 363,9 ribu jiwa (European Commission, 2017).

Perpindahan ini tentu banyak menimbulkan pro dan kontra. Pendapat pro tidak lain karena alasan kemanusiaan, sedangkan pendapat kontra memiliki berbagai alasan. Banyak masyarakat Prancis yang kontra menganggap bahwa imigran hanya akan menjadi beban negara dan ancaman bagi hak masyarakat asli. Sikap kontra yang ditunjukkan di sini merupakan sikap xenofobia masyarakat belum lagi ditambah serangan-serangan yang terjadi sebelum krisis imigran yang menjadi bayangan ketakutan bagi masyarakat. Seperti serangan Charlie Hebdo yang terjadi pada 7 Januari 2015 dengan menewaskan 17 orang (CNN, 2017). Selain itu, Serangan Truck Di Nice yang merenggut 86 korban jiwa dan melukai ratusan orang (Human Rights Watch, 2017). Paris Attack yang terjadi pada November 2015 merenggut sebanyak 130 korban jiwa dan 413 orang luka-luka (CNN, 2018). Kedua serangan ini dilakukan oleh gerakan esktrimis yang mengaku sebagai gerakan jihad Islam. Pengakuan ini tentu menambah geram sekaligus

prasangka buruk masyarakat terhadap Muslim di Prancis. Bukan hanya Muslim, minoritas lainnyapun turut menjadi sasaran generalisasi sikap xenofobia masyarakat (Gee, 2017).

### **2.3.1 Xenofobia Terhadap Imigran**

Para imigran yang datang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak dibanding negara asal mereka justru dikatakan membawa masalah baru. Masyarakat asli menganggap bahwa imigran hanya datang untuk merenggut hak masyarakat terutama sebagian besar imigran berpindah dengan tujuan ekonomi. Selain itu, masyarakat tidak percaya sepenuhnya kepada imigran yang berasal dari negara asal yang terdapat perang, operasi diktator dan ekstremis agama (Kingsley, 2015).

Ketakutan-ketakutan tersebut menjadikan sikap xenofobia semakin mengental di kalangan masyarakat. Menurut survei Ipsos yang dilakukan secara global 2015 lalu, Prancis merupakan negara yang paling banyak memberi respon negatif terhadap perpindahan ini. Bahkan, sebanyak 57% masyarakat Prancis mengatakan bahwa Prancis sudah menampung terlalu banyak imigran. Sebanyak 6 dari 10 orang mengatakan imigran hanya akan memberikan dampak negatif terhadap negara terutama dalam segi ekonomi karena mayoritas imigran datang dengan kemiskinan. Selain itu, sebanyak 54% (rata-rata global 46%) masyarakat mengatakan imigran telah mengubah Prancis ke arah yang mereka tidak inginkan. Lalu 63% survei Ipsos menyatakan bahwa imigran tidak akan mampu untuk berintegrasi dengan budaya Prancis. Belum lagi angka pengangguran di Prancis pada tahun 2017 sebanyak 9% dari populasi yang terbilang tinggi membuat masyarakat ketakutan akan haknya direnggut oleh imigran (The Local Fr, 2016).

### 2.3.2 Xenofobia terhadap Minoritas

Sikap xenofobia masyarakat Perancis bukan hanya diperuntukkan untuk imigran saja melainkan juga minoritas yang ada di Prancis. Minoritas di Prancis terdiri dari masyarakat Muslim, Yahudi, Roma hingga Tionghoa. Minoritas di Prancis sudah mendapatkan diskriminasi dimulai dari tingkat hukum legal, verbal bahkan aksi nyata. Dari Konstitusi Prancis sendiri tidak terdapat adanya tulisan ‘minoritas’ yang menunjukkan eksistensi.

Artikel 1 tahun 1958:

“France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis.

Statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to position of professional and social responsibility”

Maksud dari artikel tersebut adalah Prancis akan selalu menjadi negara Republik yang tak terpisahkan, sekuler, demokratis dan sosial. Prancis harus menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, tanpa membedakan asal, ras atau agama. Prancis harus menghormati segala keyakinan. Harus diorganisir secara desentralisasi. Akses setara juga harus diberikan kepada perempuan dan laki-laki dalam tanggung jawab posisi profesional dan sosial.

Konstitusi ini merupakan konstitusi model Republik yang menuntut masyarakat untuk menjadi “Prancis” dan budaya hingga Bahasa yang digunakan harus merupakan identitas Prancis. Model ini sama sekali tidak dibentuk untuk terciptanya integrasi dari kelompok-kelompok yang ada di Prancis. Melainkan, hanya akan memberikan kesulitan bagi para minoritas dalam keadaan sosial Prancis.

Selain itu, pada artikel 3:

“National sovereignty shall vest in the people, who shall exercise it through their representatives and by means of referendum.

No section of the people nor any individual may arrogate to itself, or to himself, the exercise thereof.

Suffrage may be direct or indirect as provided for by the Constitution. It shall always be universal, equal and secret.

All French citizens of either sex who have reached their majority and are in possession of their civil and political rights may vote as provided for by statute”.

Artikel 66:

“No one shall be arbitrarily detained.

The Judicial Authority, guardian of the freedom of the individual, shall ensure compliance with this principle in the conditions laid down by statute.” . (Assemblée Nationale, n.d.)

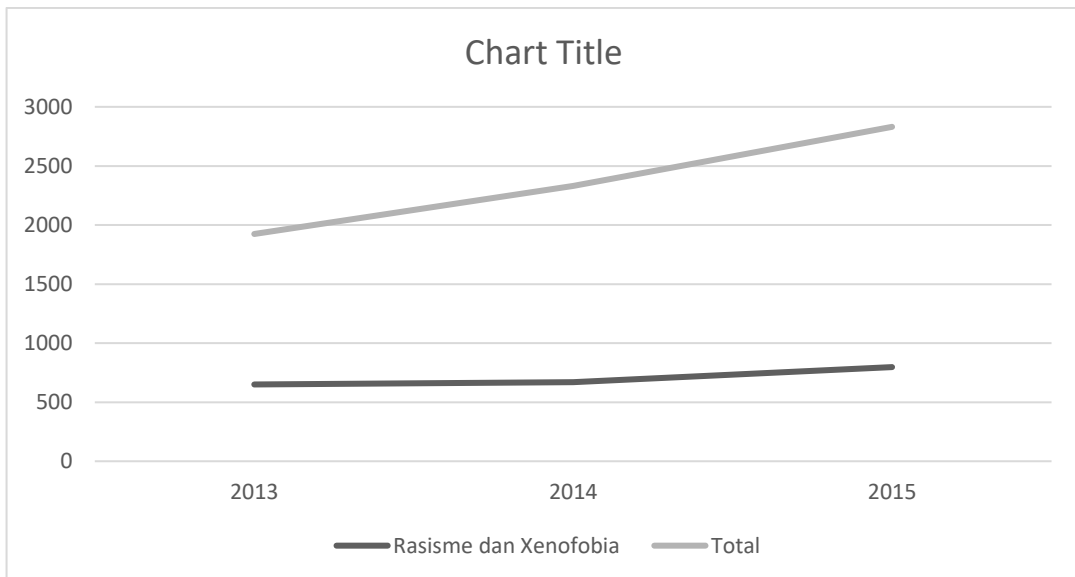
Kedua artikel tersebut hanya menyebut masyarakat menggunakan kata individu bukan komunitas atau kelompok. Sebagai hasilnya, otoritas Prancis telah menolak segala bentuk tindakan kepada kelompok etnis, agama atau bahasa. Hal tersebut secara tidak langsung membentuk diskriminasi sistematis bagi para minoritas (Gilbert, 2016).

Hukum Prancis juga melarang adanya pengambilan data apapun berdasarkan ras, etnis atau agama. Seperti contohnya tidak ada data status sosial ekonomi dari suatu kelompok yang berdasarkan ras, etnis agama atau lainnya bahkan konsensus penduduk sama sekali tidak menyinggung ras atau etnisitas (Oppenheimer, 2008, p. 745).

Gagasan mengenai kata ‘minoritas’ tidak ada secara legal di Prancis. Padahal faktanya, jumlah penduduk Yahudi sebanyak 500.000 jiwa atau sekitar 1% dari jumlah populasi dan menurut PEW Research Survei jumlah populasi Muslim diperkirakan sebanyak 4,7 juta jiwa atau sekitar 7,5% dari populasi yang mana

angka tersebut cukup besar. Pemerintah sendiri bahkan menyebut generasi kedua atau ketiga masyarakat kewarganegaraan Prancis yang masih memiliki latar belakang Muslim dengan sebutan “people from Muslim background” (Hackett, 2017).

Selain imigran tentu minoritas selalu menjadi sasaran masyarakat dalam melampiaskan sikap xenofobianya. Berikut perubahan aksi xenofobia masyarakat tahun 1992 – 2015:



Grafik 1. Grafik peningkatan tindakan xenofobia masyarakat asli hingga tahun 2015 (CNCDH, 2015).<sup>1</sup>

Menurut menteri dalam negeri Prancis, aksi atau ancaman anti-Muslim dan anti-semitis mengalami peningkatan 22,4% pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2014, aksi rasis tersebut berjumlah 1.662 aksi dan pada tahun 2015 sebanyak

<sup>1</sup> Grafik dengan kategori total menunjukkan gabungan serangan dari rasisme, xenofobia, anti-semitisme, anti-Muslim. Tren dari grafik ini menyimpulkan sikap xenofobia yang terus meningkat.



2.304 aksi yang menjadi jumlah terbanyak data di atas. Ada tiga poin penting data kelanjutan dari grafik di atas:

1. Kekerasan anti-Semitis menurun hingga 5,1% dari total 808 aksi kriminal dibandingkan 851 pada tahun 2014
2. Kekerasan anti-Muslim meningkat lebih dari tiga kali lipat (bertambah 223%) dengan angka mencapai 429 aksi kriminal dibandingkan 133 di tahun 2014
3. Kejahatan kriminal lainnya yang tergolong kekerasan rasisme anti-Semitis ataupun anti-Muslim meningkat sebanyak 17,5% hingga berjumlah 797 kekerasan.

Tahun 2015 merupakan tahun tersulit bagi masyarakat Muslim terutama tahun 2014 setelah serangan Charlie Hebdo dan Paris Attack. Bukan hanya menggeneralisasi Muslim sebagai pelaku teroris, masyarakat menyalahkan pemerintah dan juga pemerintah negara-negara Arab untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut (Birnbaum M. , 2016). Masyarakat semakin takut terhadap eksistensi Muslim di Prancis. Dari poling yang dilakukan oleh Lembaga survei Prancis ditemukan sebanyak 50% orang menilai Islam adalah ancaman bagi keamanan nasional. Lalu ada 67% masyarakat takut akan ekstremis dapat menyamar sebagai imigran. Kemudian 63% orang yang menganggap bahwa budaya Islam tidak cocok dengan nilai Prancis dan budaya Islam akan menenggelamkan budaya Eropa (France24, 2014)

Dari data Grafik 1 menunjukkan terdapat 429 ancaman dan serangan anti-Muslim. Angka ini meningkat 223% dibandingkan tahun lalu dan 808 ancaman dan

serangan antisemitismes yang menunjukkan penurunan sebanyak 5% dari tahun sebelumnya. Akibat serangan jihadis menjadikan Muslim secara umum target akan sikap xenofobia yang meningkat terutama setelah foto anak kecil bernama Aylan yang menjadi korban beredar menjadikan sejumlah Walikota terutama dari Roanne dan Belfort menyatakan lebih memprioritaskan pengungsi Kristen dibandingkan yang lain (CNCDH, 2015). Lembaga survei Sputnik di Prancis melakukan survei kepada masyarakat tahun 2016 lalu dengan pertanyaan “Apakah imigran dari Afrika dan Timur Tengah menjadi alasan peningkatan kejahatan?”. Sebanyak 8% mengatakan tidak tau, 28% tidak dan 64% menjawab iya (Sputnik, 2016).

Pemerintah sendiri sudah mulai melarang hal-hal yang dianggap mencolok untuk digunakan oleh kaum Muslim. *Head scarf* atau kerudung yang merupakan identitas utama Muslimah telah dilarang penggunaannya di lingkungan sekolah pada tahun 2004. Dilanjutkan pelarangan menggunakan niqab atau cadar di tempat umum pada tahun 2011. Tak hanya itu, pada musim panas 30 kota melarang Muslim untuk menggunakan burkini atau pakaian renang tertutup untuk Muslimah pada tahun 2016 (Weaver, 2018). Ini merupakan pelanggaran bagi hak dasar Muslim.

Masyarakat yang menganggap diri mereka superior cenderung membenarkan diri dalam mengekspresikan pendapat misalnya kasus kartun Danish yang menggambar tokoh Nabi Muhammad pada tahun 2005 lalu. Mereka membenarkan tindakan mereka sebagai kebebasan berekspresi namun menganggap Muslim sebagai teroris hanya dengan menggunakan pakaian yang berbeda dari mereka. pandangan masyarakat telah jauh menyimpang ketika merendahkan simbol agama lain sebagai kebebasan berekspresi (Szabo, 2015). Muslim tetap menjadi minoritas yang paling sulit diterima di Prancis.

Selain Muslim, Yahudi merupakan minoritas kedua yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat Prancis. Dari Grafik 1 terlihat Walau anti-semitis mengalami penurunan, 808 serangan dalam 1 tahun ini terhitung merupakan 40% dari segala aksi rasis pada tahun tersebut. Padahal populasi Yahudi di Prancis hanya sebanyak 1% dari total jumlah penduduk (Glasser, 2016). Masyarakat memiliki prasangka tersendiri terhadap Yahudi. Sebanyak 20% masyarakat menganggap Yahudi terlalu banyak memiliki kekuasaan pada ranah politik dan 20% masyarakat menilai bahwa Yahudi lebih kaya dibandingkan rata-rata masyarakat Prancis. Kepala hubungan eksternal Yahudi Inggris mengatakan bahwa 1 dari 10 orang masyarakat Prancis menganggap bahwa sudah terlalu banyak Yahudi di Prancis yang notabene hanya 1% dari populasi (Vulliamy, 2016). Bahkan semenjak tahun 2004, Yahudi dilarang untuk menggunakan *skullcaps* sejenis topi keagamaan yang menjadi identitas mereka.

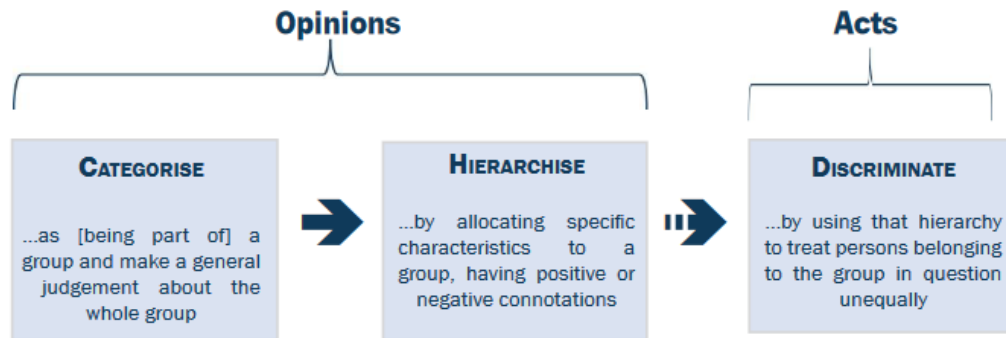
Lalu ada komunitas Roma di Prancis yang merupakan campur aduk dari beberapa etnis dengan status kependudukan yang berbeda-beda (kewarganegaraan Prancis, kewarganegaraan luar negeri, tidak memiliki kewarganegaraan, dll) yang menyusahakan keadaan mereka selanjutnya. Orang-orang Romany asli merupakan imigran yang awalnya berasal dari negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur sedangkan yang lainnya adalah wisatawan yang masuk ke Prancis dalam keadaan administratif tertentu. Kebanyakan dari mereka adalah warga negara Prancis yang jauh dari globalisasi. Populasi mereka diperkirakan sebanyak 15.000 hingga 20.000 atau setara dengan 0,03% jumlah populasi keseluruhan. Karena jumlah mereka yang begitu sedikit, menjadikan komunitas Roma tidak begitu dipentingkan oleh

masyarakat lainnya. Dengan pemukiman kumuh sebagai tempat menetap mereka, populasi komunitas Roma dikatakan stabil (Kearney, 2017).

Masyarakat Prancis melihat orang-orang Roma sebagai orang-orang yang homogen dan nomaden, menyalahgunakan tunjangan kesejahteraan sosial dan tidak ingin berintegrasi. Selain itu, mereka dikenal sebagai orang-orang yang jorok, miskin dan suka mengemis. 57% masyarakat Prancis memiliki anggapan buruk terhadap kelompok Roma pada tahun 2015, tetapi angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 sebanyak 77%. Komunitas Roma sering mendapatkan serangan diskriminasi seperti kebencian verbal dan juga aksi vandalisme dengan tulisan *Sales Juifs et Roms* yang artinya “orang Yahudi dan Romani kotor” di pagar sekolah Anne Frank (Safdar, 2017).

Suatu hal baru muncul di pemerintahan mengenai komunitas masyarakat keturunan Tionghoa yang berjumlah setengah juta di Prancis. Setelah terjadinya pembunuhan seorang Tionghoa yang bekerja pada industri garmen terbunuh pada tahun Agustus 2016 lalu di daerah Aubervilliers. Kasus pembunuhan ini menjadi pemicu protes yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa dengan masa ribuan orang. Protes ini justru menjadi boomerang bagi masyarakat Tionghoa pasalnya, akibat dari protes tersebut banyak kejadian pencurian dan penganiayaan yang menargetkan pedagang Tionghoa di daerah Paris dan sekitarnya. Aksi kriminal ini diketahui dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pandangan bahwa orang-orang Tionghoa mendapatkan upah kerja dengan jumlah yang tinggi dan bisnis mereka selalu menggunakan uang kas sehingga menjadi sasaran yang menguntungkan. Pemerintah lokal menyebut peristiwa ini sebagai kampanye dari tindakan xenophobia yang baru muncul kepada Tionghoa (Louison, 2016).

Dilihat dari serangan-serangan xenophobia yang telah terjadi, prasangka merupakan sebab dari awalnya terbentuk diskriminasi.

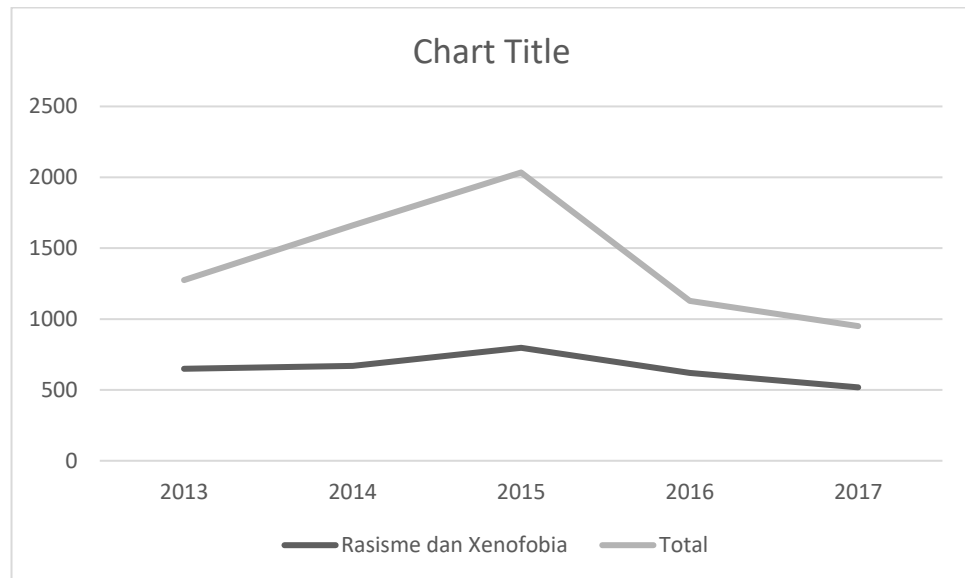


Gambar 1. Proses terbentuknya sikap xenophobia masyarakat asli (CNCDH, 2015).

Masyarakat cenderung mengkategorikan orang lain yang berbeda dengan mereka dalam berbagai kelompok. Lalu masyarakat kemudian memberikan karakteristik masing-masing pada setiap kelompok yang kemudian menjadi alasan setiap aksi yang dilakukannya.

Pada laporan CNCDH tahun 2017 lalu menyatakan adanya penurunan di beberapa aksi xenophobia masyarakat. Polisi mengatakan aksi xenophobia pada tahun 2016 menurun sebanyak 44,7% yaitu hanya 1125 kasus dibandingkan dengan tahun 2015. Kasus antisemitis berjumlah 335 kejadian, anti-Muslim berjumlah 182 kejadian dan rasisme sebanyak 608 kejadian. Selain itu, ada hampir 750 keluhan kata-kata ofensif (provokasi, hinaan, fitnah) yang terdaftar dengan alasan “karena ras, tempat asal, etnis atau agama” setiap bulannya. Total keseluruhan pada tahun 2017, ada sekitar 8.700 laporan tercatat pada tahun 2017 yang 59% diantaranya merupakan kejahatan ofensif dan 41%nya merupakan level-4 dan level-5 kata-kata

ofensif singkat. Keluhan-keluhan tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempat umum dan lebih sering terjadi di wilayah urban (CNCDH, 2015).



Grafik 2. Grafik peningkatan tindakan xenofobia masyarakat asli hingga tahun 2017 (CNCDH, 2017)<sup>2</sup>

Dari Grafik 2 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata aksi xenofobia cenderung menurun pada tahun 2017. Sebesar 16% penurunan terjadi pada tahun ini dengan 950 aksi pada tahun 2017 dan 1.128 aksi pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, tingkat xenofobia pada tahun 2017 cenderung rendah namun hal ini tetap saja harus menjadi perhatian masyarakat umum karena serendah apapun xenofobia tetap saja merupakan sikap yang merugikan. Oleh karena itu, pemerintah Francois Hollande dan Emmanuel Macron tentunya harus

---

<sup>2</sup> Grafik dengan kategori total menunjukkan gabungan serangan dari rasisme, xenofobia, anti-semitisme, anti-Muslim. Tren dari grafik ini menyimpulkan sikap xenofobia yang terus meningkat dari tahun 2013-2015. Penurunan terjadi pada tahun 2016-2017.

mengupayakan berbagai cara agar sikap xenofobia di masyarakat Prancis terus mengalami penurunan.

**BAB III**

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN FRANCIS DALAM MENANGANI  
PENINGKATAN XENOFobia MASYARAKAT DI FRANCIS**

**3.1 Prinsip Dasar Republik Prancis**

Prancis adalah negara Republik yang merdeka pada tanggal 14 Juli 1789. Prancis menjadi negara yang paling banyak memiliki keberagaman etnis di Eropa yang menjadikan minoritas juga berasal dari banyak keturunan (Library of Congress, 2007, p. 9). Prancis pada dasarnya adalah negara yang hanya mengakui eksistensi ras manusia (*human race*) bukan ras yang berbeda-beda. Prancis bahkan membatasi kebebasan untuk berbicara dengan tujuan untuk mengkriminalisasi siapapun yang melakukan pembicaraan mengenai kebencian dalam berbagai aspek. Dengan keadaan tersebut tentu sulit membayangkan negara Prancis menyimpan sentimen xenofobia. Tetapi pada kenyataannya sikap masyarakat sulit untuk dikendalikan. Seorang penulis di Prancis beralal dari Maroko, Tahar Ben Jelloun mengatakan bahwa Prancis merupakan negara yang paling xenofobik dibandingkan dengan negara di Eropa lainnya (Poirier, 2013).

Prancis adalah negara republik yang mengedepankan tiga pilar sebagai pendekatan terhadap imigran (Liogier, 2009, pp. 29-30):

1. Sekuler yang berarti segala aktivitas praktik budaya dan agama yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi selalu dihargai oleh negara dan negara tidak akan mengintervensi terhadap aktivitas tersebut.
2. Hak individu lebih utama dibandingkan hak kolektif yang berarti tidak ada hak kelompok yang terpisah seperti komunitas etnis atau minoritas



didiskriminasi atau bahkan diakui oleh Prancis. Prancis hanya melihat masyarakat sebagai individu saja dan bukan kelompok.

3. Adanya pemisahan antara bidang publik dengan bidang swasta serta penekanan pada peran inklusi sosial dari sekolah-sekolah yang ada di setiap penjuru Prancis.

Pendekatan ini telah ditetapkan dari tahun 1905 lalu. Dengan ketiga prinsip tersebut, Prancis ingin mencapai tujuan negaranya yaitu masyarakat homogen yang tinggi tanpa ada pemisah antar kelompok. Setiap masyarakat Prancis harus menghargai ketiga hal tersebut. Begitu pula dengan pendatang baru yang ingin menetap sebagai warga negara Prancis. Pendatang tersebut harus berusaha untuk berintegrasi bersama dengan masyarakat asli Prancis.

Integrasi juga menjadi suatu hal yang penting dimiliki oleh baik masyarakat Prancis maupun pendatang. Namun sebelum berintegrasi, para pendatang harus berusaha untuk mendapatkan naturalisasi kewarganegaraan terlebih dahulu. Naturalisasi penduduk dapat dilakukan dalam kurun waktu lima tahun. Dalam waktu tersebut, para pendatang harus melakukan segala prosesnya hingga mendapatkan suaka yang diinginkan. Sementara itu, ketika berada di Prancis, pemerintah memberikan kebijakan bahwa setiap pendatang baru dengan izin satu tahun dapat melakukan masa pembaruan kartu izin setiap tahunnya hingga diberikannya kartu izin 10 tahun (Migrant Integration Policy Index, 2015).

Pada awal dari proses lima tahun tersebut utamanya satu tahun pertama, para pendatang harus melakukan kontrak integrasi atau Contract of Integration (CAI) yang bersifat mandatory dan telah disediakan oleh pemerintah. Hal tersebut

agar usaha naturalisasi yang dilakukan oleh para pendatang dapat diawasi CAI ketika dilakukannya perpanjangan izin tinggal oleh para pendatang setiap tahunnya.

Kebijakan ini menyediakan beberapa bantuan bagi para pendatang seperti:

1. Formasi kewarganegaraan. Akan adanya presentasi seputar negara Prancis mengenai nilai yang dimiliki oleh Prancis hingga peran-peran lembaga pemerintahan.
2. Formasi linguistik. Pendatang dapat mengejar Pendidikan di Prancis hingga ke jenjang diploma dan akan mendapat pengakuan pendidikan secara formal oleh negara.
3. Ringkasan kompetensi profesional. Imigran dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pekerjaan.

CAI ini merupakan kebijakan bagi setiap pendatang baru. Namun tetap ada masyarakat yang dapat menjadi warganegara tanpa melalui CAI dengan syarat sudah mendapatkan sekolah berbasis Prancis di luar negeri selama tiga tahun, anak keturunan pendatang yang lahir di Prancis, pekerja luar negeri yang ditempatkan di Prancis, orang luar negara yang memiliki kontrak kerja minimal satu tahun di Prancis (Ferrando, 2105, pp. 150-152).

Bagi imigran yang sudah dewasa dan belum bisa berbahasa Prancis atau tidak mengetahui budaya Prancis, akan diberikan kursus gratis Bahasa Prancis selama dua bulan (180 jam) ditambah kursus orientasi kewarganegaraan selama setengah hari sebelum datang ke Prancis (Senat, 2016). Setelah itu, jika para imigran berhasil dalam tes tersebut maka akan diberikan jaminan *Intermediate multi-annual permit* atau izin untuk menetap dalam tahunan. Izin ini diharap dapat

memberi keuntungan bagi imigran dan mempermudah ketika menetap. Kartu ini merupakan kartu yang harus diperbarui setiap tahunnya hingga para imigran mendapatkan kartu izin 10 tahun. Selain itu, untuk imigran generasi muda ada tiga pendekatan yang ditetapkan pemerintah terutama generasi muda telah menjadi fokus utama sasaran integrasi Prancis (Escafé-Dublet, 2014, pp. 1-2):

1. Pendidikan, selain membantu dengan belajar Bahasa, Prancis membantu imigran untuk belajar di luar sekolah mengenai keadaan sosial Prancis.
2. Pekerjaan, kebijakan ini lebih dalam penanganan diskriminasi pada tempat kerja (perekrutan pekerja)
3. Kohesi sosial, bekerja sama dengan badan kohesi Prancis Acse non pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia di asosiasi komunitas lokal selain itu orang dewasa juga menjadi target kebijakan ini sebagai fasilitator dalam daerahnya.

Ketiga hal di atas berlaku kepada semua imigran. Sebelum sah menjadi warga negara ada masa kohabitasi dan kepatuhan pada CAI selama tiga tahun. Anak yang lahir di Prancis akan menjadi warga negara saat usianya 18 tahun dan harus dapat membuktikan bisa menjadi warganegara Prancis yang konstan atau tetap tinggal di Prancis selama lima tahun berturut-turut. Integrasi tidak hanya dilakukan oleh imigran yang baru datang saja, namun masyarakat minoritas juga harus berusaha dalam mencapai tujuan bersama ini.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konstitusi Prancis tidak mengakui adanya kelompok kecil di sekitar masyarakat sehingga membuat kelompok minoritas tidak terlihat di hadapan hukum. Undang-undang Prancis hanya melihat

masyarakatnya sebagai warganegara dan non-warganegara selain itu sebagai individu. Oleh karena itu, Prancis melihat minoritas tentu melalui basis dari prinsip republik sebagai negara Republik. Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut (General Commissariat of Strategy and Prosperity, 2013):

1. Badan nasional dilihat sebagai homogen
2. Partisipasi publik pada dasarnya didasarkan pada suara dan representasi
3. Inklusi sosial melalui sekolah, tentara, tempat kerja, keluarga dll
4. Negara yang terpusat

Hal tersebut menjelaskan bahwa minoritas harus tetap percaya pada Prancis dan pemerintah agar dapat terbentuknya negara yang bersatu. Kebijakan ini telah dijalani selama 40 tahun oleh Prancis termasuk tetap dijalankan Hollande dan Macron (France24, 2018). Selain itu partisipasi setiap orang baik dalam kelompok maupun tidak akan selalu dipertanggung jawabkan dan peran mereka untuk negara harus terlihat. Inilah yang menjadi dasar bagi setiap pemerintah Prancis dalam membentuk kebijakan integrasi masyarakat. Integrasi juga perlu dilakukan agar Prancis dapat terpisah dari sikap xenofobia yang sedang meningkat.

### **3.2 Kebijakan Presiden Francois Hollande**

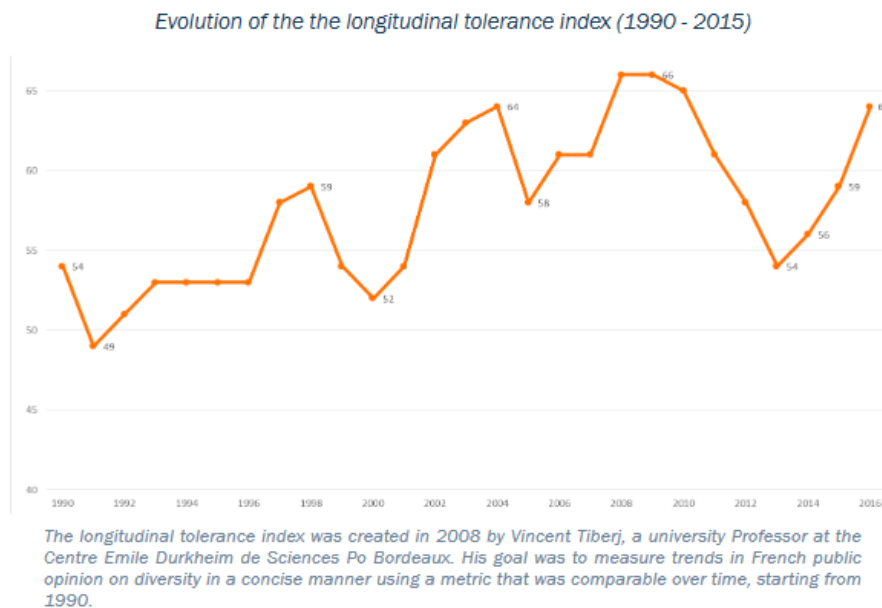
Francois Hollande adalah presiden aliran sayap kiri ke dua Prancis setelah Francois Mitterrand menjabat pada tahun 1981 lalu. Tepat pada tanggal 6 Mei 2012, Presiden yang berasal dari partai Sosialis ini berhasil menjabat sebagai Presiden ke-9 Prancis dengan jumlah suara 51,6% melawan Nicolas Sarkozy (Abis & Coustillere, 2013, p. 169). Pada awal kepemimpinannya, Hollande telah disugahi dengan krisis ekonomi yang dialami oleh Prancis yang mulai terjadi pada tahun

2007 dan belum mengalami pemulihan. Sebagai negara dengan ekonomi tertinggi ke-5 di dunia, Hollande ingin mulai berusaha memperbaiki kegagalan Sarkozy dalam meningkatkan ekonomi sebelumnya (Spence, 2016).

Menurut Hollande beragam aspek dapat mempengaruhi krisis kali ini selain kegagalan Presiden sebelumnya. Hollande bahkan menyebutkan arus imigrasi yang tidak ditangani dengan baik juga menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Prancis. Oleh karena itu, melihat keadaan ini Hollande menginginkan agar arus imigrasi dikelola lebih baik lagi dengan memperbaiki kuota imigran dan memperketat pengawasan daerah perbatasan (Reuters, 2012)

Keadaan masyarakat sebelum Hollande terpilih juga sedang tidak stabil. Sarkozy yang menyebarkan kebencian dengan mengatakan imigran hanya berdampak buruk bagi negara tentunya membuat masyarakat terpengaruhi. Masyarakat menjadi terbelah-belah dan saring memberi stereotip kepada yang lain terutama kepada imigran dan minoritas. karena hal tersebut, Hollande melihat perlunya integrasi bersama dalam segala level karena menurutnya jika ingin Prancis bangkit, maka masyarakat harus bersatu dengan meninggalkan segala perbedaan dan harus bekerja sama dengan pemerintah sehingga akan tercapai globalisasi yang baik dan menyeluruh (Meunier, 2013, p. 236).

Toleransi di masyarakat yang sempat menurun di era kepemimpinan Sarkozy akhirnya kembali membaik setelah berada di bawah pimpinan Hollande. Data yang ditemukan oleh CNDC mengenai tingkat toleransi antar masyarakat adalah sebagai berikut:



Grafik 3. Grafik peningkatan sikap toleransi masyarakat asli (CNCDH, 2015).<sup>3</sup>

Dapat dilihat dari Grafik 3, toleransi yang ada di masyarakat Prancis sempat merosot jauh kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang berkelanjutan. Kenaikan yang jelas dimulai pada November 2014 dengan poin 56 dan Maret 2015 dengan poin 59 pada setiap kelompok masyarakat. Tentunya pemerintah juga turut berperan sedikit banyaknya dari peningkatan ini (CNCDH, 2015, pp. 3-4).

Selain masalah ekonomi yang terjadi, Prancis saat itu juga dalam keadaan krisis keamanan. Serangan-serangan yang menewaskan banyak korban jiwa dan berkelanjutan terjadi di Prancis meninggalkan kepanikan di kalangan masyarakat. Kepanikan ini berpuncak setelah serangan Paris Attack yang terjadi pada November

<sup>3</sup> Survei dilakukan oleh CNCDH yang menunjukkan tingkat toleransi masyarakat dengan Angka 0 menandakan masyarakat yang tidak toleransi sedangkan angka 100 menunjukkan masyarakat yang sangat toleransi.

2015 lalu. Hollande akhirnya mendeklarasi *state of emergency* pada tanggal 14 November 2015 hingga 26 Juli 2016 di Prancis. Dari deklarasi tersebut, langkah pertama yang dilakukan oleh Hollande adalah memberikan otoritas lebih kepada aparat kepolisian. Polisi diberikan otoritas oleh pemerintah untuk melakukan pencarian tanpa surat perintah jika terdapat kecurigaan tinggi terhadap tingkah laku masyarakat yang dapat membahayakan keamanan publik. Selain itu polisi juga diberikan otoritas untuk mengakses dan menyalin data digital yang ditemukan di tempat pencarian. Ditambah juga polisi dapat memberikan hukuman 12 jam sebagai tahanan rumah dan harus meninggalkan aktivitas luar dengan melakukan laporan pada stasiun polisi terdekat setiap tiga kali sehari (Hurriyet Daily News, 2017).

Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, polisi telah berhasil menjadikan 69 masyarakat sebagai tahanan rumah yang dicurigai. Selain itu, melalui 3.427 pencarian telah ditemukan 588 senjata dan 528 tindak kriminal. Namun keberhasilan ini tidak hanya meninggalkan jejak yang baik bagi polisi. Masyarakat yang menjadi target pencarian oleh polisi juga merasa dirugikan. Menurut Human Rights Watch, ada 40 orang datang memberikan keluhan bahwa polisi tiba-tiba saja muncul ke rumah, restoran atau tempat ibadah para terduga dan menghancurkan barang-barang yang ada serta menakuti anak-anak mereka dan melarang mereka melakukan aktivitas sehari-hari yang menghasilkan hilangnya pemasukan rumah tangga pada hari tersebut. Tidak sedikit juga dari sejumlah pencarian yang dilakukan oleh polisi merupakan pencarian yang salah target dan hanya menyisakan kerugian (Human Rights Watch, 2016)

Ada hal yang menarik dari Grafik 3 terutama jika disandingkan dengan serang-serangan yang ada di Prancis. Seiring dengan maraknya serangan yang

terjadi tetapi angka toleransi tetap meningkat. Ini menunjukkan serangan tersebut tidak begitu memberi pengaruh terhadap tingkat toleransi masyarakat. Serangan-serangan tersebut hanya menimbulkan kecemasan yang akan menentukan tingkah laku seseorang ketika bertemu dengan kelompok yang dicurigai saja.

Kebijakan-kebijakan Hollande dalam membentuk integrasi masyarakat begitu beragam terutama setelah terjadinya krisis imigran. Dengan membeludaknya imigran yang datang, Hollande tetap berjanji untuk menjaga komitmennya yaitu membuka Prancis kepada para imigran. Prancis bersama dengan Jerman menjadi negara yang paling terbuka dan mengajak negara Eropa lainnya untuk turut serta. Hollande juga membantu mengawasi keselamatan imigran dengan mengirim kapal-kapal patroli di antara Turki dan Mesir (Marlowe, 2016).

### **3.2.1 Kebijakan Terhadap Imigran dan Minoritas**

Tidak jauh seperti yang diinginkan oleh negara Prancis sebagai negara Republik, Hollande juga menginginkan agar masyarakat tetap bersatu dan terbentuk masyarakat yang homogen. Setelah menjadi presiden, pidato pertama yang dilakukan oleh Hollande mengenai imigran adalah keinginannya untuk melawan sikap anti-imigran yang sedang berkembang di masyarakat (yang menganggap imigran hanya menjadi beban negara dan merampas segala hak warga negara Prancis). Selain itu, Hollande tidak menyetujui pendapat-pendapat orang yang menuntut agar aturan perbatasan lebih dipersulit lagi karena prinsip dari *free movement* ingin ditegakkan. Hollande juga menekan EU untuk lebih tegas terhadap penanganan imigran yang masuk ke Eropa dan mengontrol batas-batas eksternal yang ada (UNIAN, 2016).



Hollande melihat keadaan Prancis saat itu mudah diprovokasi. Provokasi di sini lebih mengarah kepada meningkatnya xenofobia baik karena pihak-pihak sayap kanan hingga kepada serangan-serangan yang menghasilkan kebencian. Hollande menekankan kepada masyarakat seharusnya masyarakat Prancis saat ini dapat bersatu dengan tidak memberikan ruangan terhadap wacana-wacana yang dapat memanipulasi ketakutan kepada orang asing (Samuel H. , 2014).

Hollande pun berbicara tegas dalam merespon tuntutan serentak masyarakat yang ingin menutup gerbang untuk imigran. Hollande mengatakan bahwa jika Eropa memilih untuk menutup diri dari imigran berarti sama saja ingin membawa negara jauh dari globalisasi. Hollande ingin menunjukkan bahwa Prancis bisa menjadi lebih baik dengan membuka pintu bagi para imigran. Prancis harus menjadi negara yang mewakili segala individu tidak peduli faktor apapun yang membedakan. Hollande juga berjanji memberikan hak memilih kepada minoritas yang haknya belum tersalurkan. Menurut Hollande, konstitusi Prancis harus direvisi dengan melibatkan dua pertiga mayoritas di parlemen agar konstitusi yang ada dapat merepresentasikan seluruh masyarakat (McPartland, 2014).

Prancis akan terus menerima imigran terutama dalam masa krisis imigran pada tahun 2015 dan berjanji bahwa Prancis akan selalu menjadi negara yang bebas. Hollande hanya akan melakukan limitasi kepada imigran dengan tujuan ekonomi bukan yang mencari suaka. Dengan segala penerimaan ini, Hollande akan tetap meningkatkan keamanan daerah perbatasan dengan tetap menjaga nilai negara dan tanpa mempersulit proses masuknya imigran (ABC News, 2015). Penerimaan ini dikatakan sebagai pekerjaan moral dan harus dilakukan terutama dalam menerima pencari suaka. Bahkan Prancis bersedia menerima 1.000 imigran yang seharusnya

ke Jerman sebagai aliansi terdekat di dalam EU. Prancis juga bertekad untuk menangani penyebab eksodus pengungsi dari Timur Tengah, Asia dan Afrika dengan meningkatkan tindakan terhadap gerakan militan Islam. Selain itu, peningkatan hubungan koalisi juga dirasa penting bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam memerangi gerakan ekstremis di Timur Tengah (Pineau, 2015).

Bersama dengan Jerman, Hollande berkomitmen untuk tetap mendukung keputusan EU dalam menerima imigran dengan permanen dan sistem mandatory. Hollande menekankan bahwa imigran yang masuk ke Eropa akan lebih baik lagi jika distribusi dengan lebih adil lagi pada setiap negara. Namun Hollande tidak menyetujui penyebaran tersebut menggunakan sistem kuota dari EU karena daerah perbatasan Prancis menetapkan aturan-aturan dan kebijakan bagi tiap imigran sendiri, sehingga tidak sembarang imigran dapat memasuki Prancis. Keputusan ini dilakukan meninjau dari angka pengangguran yang sedang dialami Prancis. Prancis tidak ingin menambah pengungsi masuk ketika belum bisa memberikan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi para pengungsi. Hal tersebut hanya akan menjadi pelayanan buruk bagi mereka. Hollande hanya akan menerima imigran dengan prospek ke depan yang lebih baik dan bukan hanya menganggap bahwa Eropa merupakan kontinen yang menjanjikan namun tidak berusaha untuk memperbaiki kehidupan sendiri (Borger, Kassam, & Neslen, 2015).

Selain itu, pada masa Hollande Prancis sedang mengalami keamanan yang tidak stabil diakibatkan adanya ancaman teroris, efek *spillover* dari kegagalan negara tetangga dan pemberontakan Rusia di Ukraina. Dengan keadaan tersebut, Hollande mempertegas bahwa kebijakan dalam negeri dan luar negeri Prancis tidak akan jauh berbeda dalam menanggapi ketidakstabilan tersebut. Dengan

menambah peran militer di dalam negeri dan meningkatkan angka tentara yang dikirim serta misil yang diluncurkan dalam melawan gerakan ekstrem, Hollande bertujuan untuk menjauhkan negaranya dari teroris-teroris yang mengancam bersama dengan aliansi (Galbert, 2015).

Prancis juga merupakan negara yang memiliki kelompok radikal Islam dengan angka tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Karena hal tersebut, Hollande mencoba mengeluarkan kebijakan *Security and Counter Terrorism Act pada Desember 2012*. Kebijakan ini memperbolehkan pihak otoritas menyita paspor dan melarang orang bepergian ke Suriah dan Irak dengan tujuan mengikuti organisasi yang berbau radikal. Selain itu, pemberian hukuman yang lebih berat juga ditetapkan kepada pelaku teroris agar timbulnya efek jera. Pemerintah juga akan memblokir setiap website Islam yang dapat diakses di Prancis (Pineau, 2015)

Selain itu, setelah serangan kereta api Thalys Amsterdam-Paris, Hollande menekankan Prancis untuk mempersiapkan diri jika ada serangan lainnya. Dengan *Operation Sentille*, Prancis ingin meningkatkan keamanan di daerah perbatasan. Mobilisasi aparat polisi dan gendarmerie (polisi militer) 7000. Memperbanyak agen intel dan modernisasi undang-undang aksi lebih efektif. Dirasa akan membantu dalam lokasi dan melawan gerakan fundamental dan *foreign fighters*. Prancis harus beraksi secara manusiawi pada tingkat Eropa dan internasional tetapi tetap tegas terhadap imigran (France Embassy, 2015)

Kemudian kebijakan Hollande selanjutnya yaitu adopsi *surveillance act* atau meningkatkan legislasi anti-ekstremis yang memperoleh otoritas

menggunakan “black-boxes” pada penyedia layanan internet dengan tujuan memonitor aktivitas yang dapat dicurigai sebagai teroris. Selain itu, bagi para pencari suaka, Hollande melakukan transformasi legislasi imigran dengan mempercepat aplikasi formulir pencari suaka yang semula hingga 24 bulan menjadi 9 bulan. Para pencari suaka ditempatkan di kamp spesial di seluruh penjuru negara. Dengan tujuan mempercepat integrasi imigran legal yang ada di Prancis.

Keberhasilan Hollande dengan layanan keamanan Prancis telah melarang 200 orang meninggalkan Prancis dan penolakan terhadap catatan 50 orang yang ingin masuk ke Prancis dikarenakan adanya kecurigaan aktivitas kelompok ekstremis. Selain itu, aparat Prancis juga telah melakukan 3.336 pencarian administratif, 290 orang menjadi tahanan rumah dan 344 telah ditahan (le Figaro, 2016).

### **3.2.2 Usaha dalam Meredam Sikap Xenofobia Masyarakat**

Dari awal menjabat, Hollande berkomitmen untuk memerangi sikap xenofobia yang ada di masyarakat terutama hingga menimbulkan diskriminasi. Hollande berjanji untuk memerangi segala tindakan diskriminasi dalam sektor perumahan dan perekrutan. Hollande memilih untuk melakukan operasi “tes” untuk mengetahui tingkat diskriminasi yang ada pada perusahaan yang memiliki lebih dari 1.000 pegawai. Selain itu, akan dilakukan dialog bersama dengan perusahaan tersebut mengenai proses penerimaan pekerja. Bagi para pekerjanya, pemerintah mencoba meminta para pendaftar kerja dengan “blind CVs”. Dari CV tersebut, perusahaan menerima lamaran kerja tanpa mengetahui nama dan alamat para pelamar. Walaupun terbukti adanya diskriminasi dari perusahaan, hukuman tetap

tidak bisa dijatuhkan karena adanya pembatasan tuntutan hukum individu (Vinocur, 2015)

Dengan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan, Hollande memiliki beberapa prioritas dalam melawan diskriminasi, gerakan radikal dan xenofobia:

- Pencegahan aktivitas ekstremis baik dalam media Online maupun turun di lapangan.
- Mencegah terjadinya imigrasi secara ilegal.
- Pembuatan infrastruktur yang memadai bagi para imigran legal.
- Melawan xenofobia dan rasisme dengan cara apapun.
- Memastikan terjalinnya hubungan antar etnis yang ada di Prancis dengan damai.
- Mendorong proses integrasi antara pengungsi dan orang lain (*travellers*)

Pada 17 April 2015, Hollande telah melakukan langkah yang cukup signifikan dengan *New National Plan of Action to Counter Racism and Anti-Semitism* hingga 2017. Kebijakan ini berisikan mengenai perlawanan terhadap sikap xenofobia, mobilisasi sosial terhadap penentangan sikap xenofobia dan revisi kebijakan kewarganegaraan dalam melawan xenofobia. Selain itu, pemerintah juga menjamin pemahaman situasi di Prancis sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik lagi terutama pada konsekuensi sikap tersebut dengan lebih efektif dan mendidik. Memberi Pendidikan melalui sekolah mengenai nilai Prancis juga menjadi sasaran penting bagi minoritas (Premier Ministre, 2014, pp. 5-7).

Kampanye organisasi ini berkaitan dengan kesadaran publik dalam mendukung minoritas. Selain itu, perlindungan fiskal juga diberikan kepada

sekolah-sekolah agama Yahudi dan Islam, tempat-tempat beribadah dan infrastruktur-infrastruktur milik minoritas lainnya. Hollande juga membentuk departemen nasional khusus yang menangani provokasi kebencian dan hal-hal yang berkaitan di media sosial. Hollande juga menganggap perubahan segera dibutuhkan mengenai hukum kriminal Prancis dan mulai memperkenalkan rasisme dan anti-Semitisme sebagai keadaan yang mengganggu di dalam setiap pelanggaran. Peraturan tersebut juga melibatkan sikap sexism sebagai hal yang mengganggu publik dan akan dijadikan sebagai tindak kriminal (Gilles, 2015).

Tidak hanya itu, Prancis banyak menghadiri konferensi-konferensi dalam level nasional, level Eropa hingga level internasional. Prancis memilih untuk melakukan kerja sama dengan Lembaga-lembaga lainnya dalam pembahasan isu ras dan diskriminasi. Prancis juga turut aktif dalam mempromosikan hak asasi manusia dan juga aktif dalam konferensi internasional mengenai hak asasi manusia.

Dalam level nasional, Prancis telah berkomitmen untuk menandatangani konvensi mengenai *Elimination of Racial Discrimination*. Sesuai dengan konvensi tersebut, Prancis membentuk rencana kebijakan nasional untuk melawan segala bentuk rasisme dan anti-semitisme yang akan dipimpin oleh Menteri di Prancis. Cara kerjanya, setiap Menteri harus mengkoordinasikan sejumlah departemen pemerintahan dengan memiliki perwakilan dalam konsistensinya memerangi xenofobia di lapangan serta membuat proposal dan mendorong masyarakat dalam bekerja sama dan menilai kemajuan usaha tersebut. Setiap delegasi juga bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi dari rencana nasional Prancis serta mengkoordinasi pertemuannya bersama dengan *Inter-Ministrial Committee to Fight Racism and Anti-Semitism* (CILRA) yang sudah ada sedari tahun 2003.

Rencana ini dikeluarkan pada Februari 2012 lalu. Keberhasilan lain adalah Prancis telah membentuk suatu badan legislasi kriminal yang fokus dalam menangani kebijakan perkembangan Pendidikan, budaya dan olahraga. Kebijakan-kebijakan tersebut harus menentang segala tindakan xenofobia dan mempromosikan kesetaraan kesempatan bagi siapapun. Badan ini menjadi contoh bagi dunia dalam memerangi xenofobia dan juga ketidak setaraan.

Dalam level Eropa, Prancis mendukung Council of Europe yang menangani isu xenofobia melalui *European Commission against Racism and Intolerance*. Selain itu kerjasama juga dilakukan bersama *Organisation for Security and Cooperation in Europe* dengan mendukung program-program yang dijalankan yaitu the Tolerance and Non-Discrimination Department. Prancis juga mendukung diadopsinya keputusan kerangka kerja dalam melawan bentuk-bentuk tertentu dalam ekspresi rasisme dan xenofobia melalui hukum pidana. Kemudian dalam level internasional, Prancis merupakan bagian dari *International Convention on All Forms of Racial Discrimination*. Berbagai laporan sikap xenofobia yang berkelanjutan harus dikumpulkan oleh Prancis dan juga implementasi dalam menangani hal tersebut (France Diplomatie, 2013).

Komitmen dari segala bagian yang diambil Prancis ditunjukkan utamanya dalam level nasional. Pemerintah tidak segan melarang segala aktivitas yang berkaitan dengan xenofobia dan yang mengancam keamanan serta perdamaian nasional agar pemikiran xenofobia tidak cepat menyebar seperti pelarangan segala aktivitas perkumpulan yang pernah dilakukan oleh kelompok Pegida yang merupakan kelompok anti-imigran 2016 lalu (Glasser, 2016). Selain itu pemerintah Prancis turut mempromosikan hak asasi manusia sesuai dengan aturan EU dengan

dipermudahnya kependudukan bagi Pencari suaka. Pencari suaka bahkan diberikan jaminan hak oleh pemerintah (The Law Library of Congress, 2016).

### **3.3 Kebijakan Presiden Emmanuel Macron**

Pada tanggal 7 Mei 2017 lalu, Presiden Emmanuel Macron dilantik menjadi presiden Prancis setelah berhasil mengalahkan partai sayap kanan Marie Le Pen suara 66,1%. Dengan partai barunya La Republique En Marche, Macron berjanji untuk mengembalikan keadaan Prancis menjadi negara yang aman dan damai terutama keadaan masyarakat Prancis yang penuh dengan kecemasan akibat kampanye anti-imigran Le Pen. Selain itu, ancaman teroris dan krisis imigran juga masih menjadi isu yang belum terselesaikan hingga Macron menjabat (Walt, 2017).

Menurut CNCDH, tingkat toleransi pada tahun 2017 di Prancis sebanyak 64 poin. Poin sebanyak ini dikatakan sebagai poin yang stabil meningkat dari tahun 2016. Penurunan hanya dialami oleh minoritas kulit hitam dan komunitas Roma. Namun penurunan ini tidak dianggap berarti karena hanya sebesar 2 hingga 3 poin saja. Tingkat ini juga dikatakan cukup tinggi mengingat keadaan Prancis yang telah diserang oleh beberapa teror, peningkatan pengangguran, lawan dalam pekerjaan hingga meningkatnya xenofobia. Data menandakan hal-hal tersebut tidak langsung berpengaruh terhadap tekanan toleransi antar masyarakat (CNCDH, 2017, pp. 8-9).

#### **3.3.1 Kebijakan Terhadap Minoritas dan Imigran**

Langkah pertama yang dilakukan oleh Macron setelah menduduki kursi pemerintah adalah membentuk *National Assembly* atau majelis nasional. Dalam majelis nasional, Macron juga telah melibatkan minoritas untuk mengambil andil



dalam pemerintahan. Macron berhasil mengangkat 35 anggota parlemen sebagai perwakilan rakyat yang berasal dari minoritas. Hal tersebut merupakan peningkatan dibandingkan pada masa Hollande yang hanya menduduki 18 kursi (Marmouyet & Houeix, 2017).

Tujuannya didirikannya majelis nasional inti tentu untuk mempercepat implementasi segala janji yang dikatakan ketika kampanye. Salah satu janji tersebut berkaitan dengan krisis imigran. Sama halnya dengan Hollande, Macron juga menerima imigran datang ke Prancis. Macron menganggap bahwa Prancis harus memberi andil terhadap permasalahan dunia terutama peran dalam memberikan kesempatan bagi imigran. Walaupun Prancis membuka negara bagi para pencari suaka, namun Macron menginginkan agar penerimaan tersebut dibatasi. Macron mengatakan bahwa tidak ada budaya Prancis melainkan yang ada hanya budaya yang beragam di Prancis (Joseph, 2017).

Di tahun pertama menangani gelombang migrasi yang belum stabil. Melalui kebijakan *balance* yang mana merupakan gabungan antara *humanity* yaitu menghargai obligasi internasional Prancis mengenai hukum suaka dan *firmness* yaitu menimbang secara koersif terutama dalam hal pengusiran. Kebijakan jangka Panjang harus dipikirkan dengan matang jika terlalu cepat ditakutkan akan melawan kepentingan negara terutama sistem imigrasi yang kompleks dan interdependen (Bertossi & Tardis, 2018, pp. 25-27).

Keinginan untuk tetap tegas namun tidak menyalahi hak terus dilakukan oleh Macron. Melihat keadaan jalanan Prancis yang dipenuhi oleh imigran membuat Macron menjadikan 62 Motel dengan harga murah sebagai tempat

penampungan para imigran tersebut dapat menampung 6.000 imigran. Melihat penutupan kamp Calais tahun lalu juga membuat Macron memilih kebijakan tersebut agar tensi di masyarakat juga menurun. Polisi menemukan sebanyak 2.771 imigran yang terlantar di jalan. Bahkan setelah kamp ditutup, sekitar 600 imigran mencoba untuk kembali mendirikan kamp sendiri bahkan hingga tidur di kayu-kayu dan taman di Calais. Macron mengatakan kebijakan ini agar dapat mempermudah pencari suaka masuk ke Prancis dengan alasan perang dan kekerasan serta mendeportasi imigran dengan alasan ekonomi. Macron menginginkan dibangun tempat penampungan pada daerah-daerah krusial Prancis agar tidak ada imigran yang tidur di jalan (Sage & Magnanville, 2017).

Selain di dalam negeri, Macron juga berusaha menanggulangi masalah imigrasi di luar negara. Seperti menanggulangi penyelundupan orang yang terjadi di perbatasan, meningkatkan stabilitas di Libia sebagai salah satu negara yang menyumbang banyak imigran di Prancis dan meningkatkan bantuan pada negara-negara transit sebelum imigran menuju Prancis. Libia, Nigeria dan Chad juga harus bersedia membantu Prancis dalam proses permintaan suaka yang dilakukan oleh imigran di ketiga negara. Selain diskusi bersama dengan ketiga negara tersebut, Prancis juga mengajak Italia, Jerman serta Spanyol membahas mengenai penempatan 10.000 pengungsi di Prancis (BBC, 2017). Pertemuan tersebut membahas mengenai arus imigran yang datang ke Eropa karena kemiskinan, perang dan keadaan politik dari Timur Tengah dan Afrika. Macron menekankan harus adanya kerja sama antar EU dan Uni Afrika melalui pendekatan “solidaritas, kemanusiaan dan efisien” terhadap arus imigrasi ini. Dalam akhir pertemuan ini, ketujuh negara akhirnya menemukan kesepakatan bersama. Salah satunya adalah

Prancis, Jerman, Italia dan Spanyol bersedia untuk mengirimkan bantuan kepada Chad dan Nigeria dalam mengatur masalah perbatasan dengan syarat diberhentikannya imigran dari Afrika Utara menuju Eropa (Wintour & Willsher, 2017).

Kemudian, Macron juga terlibat aktif dalam perumusan rencana-rencana yang akan diadopsi oleh EU mengenai imigran. Pada tanggal 26 September 2017, Macron melakukan pidato *Initiative for Europe* di hadapan negara-negara Eropa lainnya. Dalam pidatonya ini, Macron berpendapat bahwa selain integrasi domestik di dalam negara, perlu adanya juga integrasi yang lebih ketat lagi pada EU dalam menghadapi isu-isu bersama. Dua hal yang menjadi pokok pembahasan dari pidato Macron merupakan isu keamanan dan pertahanan dalam konteks aliansi bersama Amerika Serikat dalam melawan teroris dan isu imigrasi. Bekerja sama akan sangat penting baik untuk mencegah masalah di dalam negeri sendiri ataupun di luar.

Macron juga akan bersedia menerima imigran di Prancis bersama dengan Merkel sebagai pencetus dari keterbukaan ini. Menurutnya, pilihan untuk menutup daerah perbatasan adalah pilihan yang salah dan tidak efektif karena melawan nilai kesetaraan EU. Macron menekankan kepada negara-negara EU untuk lebih harmonis lagi dalam membentuk kebijakan nasional atas imigran dan pencari suaka sesuai dengan nilai EU. Selain itu, data mengenai situasi imigran dan program dengan tujuan integrasi harus selalu diperbarui agar kebijakan juga dapat berkembang menyesuaikan keadaan (Wiley Online Library, 2017, p. 759).

Kelanjutan dari pertemuan ini dilaksanakan di Brussels pada tanggal 24 Juni 2018. Pertemuan ini membahas mengenai perbedaan setiap negara dalam mengatasi

imigran yang datang serta mengenai imigran dengan alasan ekonomi yang datang ke Eropa. Perlu adanya reformasi rencana kebijakan imigran selanjutnya. Merkel dan Macron memiliki tujuan yang sama dengan mengajak 28 negara EU lainnya dalam pembentukan *single immigration plan*. Rencana ini masih perlu menempuh jalan yang Panjang karena belum adanya konsekuensi ataupun kesimpulan apapun dalam pertemuan tersebut terutama karena penolakan imigran dari negara-negara Eropa timur masih tinggi. Bahkan Republik Czech, Hungaria, Polandia dan Slovakia memilih untuk tidak menghadiri pertemuan ini karena kebijakan yang diusung tidak sesuai dengan kepentingan negara. Selain itu, pembicaraan ini melibatkan kerja sama negara-negara transit imigran sebelum masuk ke Eropa seperti Turki. Pertemuan ini masih akan berlanjut terutama rencana bersama yang masih belum menemukan titik terang (France24, 2018).

Prancis merupakan negara dengan kebijakan yang paling terbuka terhadap imigran bersama dengan Jerman. Walaupun membuka diri, Macron tidak ingin penjagaan dikurangi atas perbatasan. Macron ingin memperkuat kebijakan imigran namun tetap terbuka melalui proposal yang disusun dan dipublikasi pada Februari 2018 dan akan dirundingkan oleh parlemen selanjutnya. Proposal ini berisikan mengenai isu imigran, pencari suaka dan integrasi utamanya memperbaiki prosedur imigrasi ilegal, pencari suaka hingga kriminalisasi bagi pihak manapun yang membantu imigran ilegal (Lotem, 2018).

Proposal ini fokus dalam menggaris bawahi dipercepatnya prosedur suaka bagi para imigran yang membutuhkan, meningkatkan infrastruktur kamp-kamp pengungsi serta mempercepat deportasi bagi mereka yang tidak memenuhi syarat suaka misalnya hanya datang karena alasan ekonomi (Chassany, 2017). Selain itu

di dalam proposal tersebut, pihak otoritas dapat menggandakan waktu penahanan suaka yang gagal hingga 90 hari serta mengurangi masa penangguhan yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin segala hak pencari suaka di Prancis terjamin. Kebijakan ini ditekan oleh Macron karena tahun 2017 lalu, Prancis menerima aplikasi suaka terbanyak hingga mencapai 100.000 aplikasi. Proposal ini telah diserahkan kepada parlemen untuk dirundingkan. Proposal ini telah dibahas dalam tujuh hari debat hingga lulus seleksi pertama dari Majelis Nasional pada tanggal 23 April 2018. Proposal masih dirundingkan dalam seleksi ke dua oleh Senat untuk disetujui (Sayer, 2018).

Banyak yang tidak setuju dengan jalur yang Macron pilih terutama karena sikap xenofobia masyarakat yang sedang meningkat. Banyak NGO, pengacara hingga pekerja pemerintahan tidak setuju dengan kebijakan Macron. Bahkan, Sonia Krimi yang merupakan pembuat undang-undang dari partai Macron mengatakan kebijakan kali ini “bermain dengan ketakutan masyarakat”. Sama halnya dengan Krimi, Mathieu Orphelin juga mengkritik kebijakan ini. Kebijakan ini dianggap tidak sesuai dengan hak pencari suaka. Kebijakan ini menjadi kebijakan yang populer di kalangan masyarakat xenofobik dilihat dari survei yang dilakukan oleh ABVA yang menunjukkan 63% masyarakat menganggap di Prancis sudah terlalu banyak imigran (Carriat & Melander, 2018). Macron disebut telah mencoreng nilai kemanusiaan Prancis akibat kebijakan ini. Tetapi Macron tetap meyakinkan pilihan ini adalah pilihan yang terbaik bagi masyarakat dan imigran.

Selain itu, dalam proposal ini Prancis juga mendeskripsikan mengenai langkah lima tahun ke depan dalam melawan teroris. Setelah melihat keadaan Prancis, Macron berpendapat bahwa adanya beberapa ancaman negara. Keamanan

internal yang berhubungan dengan keamanan eksternal dan imigrasi. Macron telah menyusun rencana lima tahun ke depan administrasinya dalam melawan terorisme. *Melalui daily security force* yang melibatkan polisi dan gendarmerie dalam melawan gerakan radikalisme dan reformasi prosedur suaka. Sebanyak 10.000 polisi dan gendarmerie tambahan dikerahkan dengan teknologi dalam operasi. Polisi dan gendarmerie juga bertanggung jawab terhadap penanganan segala ancaman verbal maupun fisik terhadap publik (France24, 2017). Prancis juga bekerja sama dengan Inggris dalam melawan gerakan radikal di media sosial. Melalui konferensi yang dilakukan kedua negara, Prancis dan Inggris ingin agar platform seperti Google dan Facebook melarang penyebaran konten radikal dalam situs mereka. Inggris dan Prancis juga ingin membentuk hukum wajib bagi platform dengan memberi hukuman jika terjadi kegagalan (BBC, 2017).

### **3.3.2 Usaha dalam Meredam Sikap Xenofobia Masyarakat**

Terpilihnya Macron sebagai Presiden menurut masyarakat merupakan langkah menjauhi xenofobia. Namun, usaha untuk memerangi sikap xenofobia tidak cukup hanya itu saja. Macron harus berani dalam bertindak cepat mewujudkan segala hal yang dijanjikan saat kampanye. Sedari kampanye, Macron sudah menunjukkan dukungannya terhadap keberagaman budaya di Prancis (Kupe, 2018). Macron bahkan mengatakan keinginannya untuk membantu integrasi minoritas terutama Muslim sebagai minoritas terbanyak di Prancis.

Dari awal kampanye, Macron sudah menarik perhatian masyarakat. saingannya adalah seorang dari partai sayap kanan yaitu Marine LePen yang terkenal dengan kebijakan anti-imigrannya. Selain berhasil dalam menjauhkan Prancis dari xenofobia, Macron juga berhasil menegakkan nilai-nilai EU yaitu

institusi demokratis, hak asasi dan aturan hukum. Macron juga mengkritisi negara-negara dengan pemerintah sayap kanan seperti Hungaria dan Polandia. Kedua negara tersebut tidak ingin menerima imigran kembali karena xenofobia juga telah meningkat.

Macron memerangi diskriminasi dalam dua sektor yaitu perumahan dan perekrutan. Sama halnya dengan Hollande, Macron juga akan melakukan tes bagi perusahaan-perusahaan besar dan sektor-sektor negara di Prancis mengenai hal pekerjaan dan keberagaman mereka dalam menerima pekerja. Macron memanggil 120 perusahaan dan menuntut mereka untuk memerangi diskriminasi kepada minoritas manapun. Tes yang sudah dilakukan Macron yaitu mengirim CV satu identitas dalam perusahaan yang berbeda dan dengan nama yang berbeda untuk membandingkan respon. Selain itu Macron berjanji untuk melawan *house sentencing* yang memerangkap minoritas di daerah yang tidak menguntungkan (France24, 2018).

Awalnya masyarakat Prancis percaya bahwa Macron akan mengurangi peningkatan xenofobia di Prancis. Prancis bahkan mendukung aktivis anti rasisme di Amerika Serikat (First Post, 2017). Namun kebijakan Macron menjadi bias dan menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Proposal yang diajukan baru-baru ini dinilai sebagai tindakan yang tidak mencerminkan negara demokrasi dan mencoreng hak asasi manusia. Namun, partai Macron tetap bersikukuh bahwa harus ada yang dikorbankan jika ingin mencapai suatu hasil yang lebih baik. Media mainstream tidak terlalu menggali xenofobia yang terjadi pada masa ini. Faktanya yang tertinggal seperti diskriminasi terhadap generasi muda masih terjadi terutama dari polisi. Diskriminasi bahkan terjadi hanya dari nama dan area tempat

tinggal (Raj & Ward, 2018). Selain itu, Hukum baru anti-terorisme Prancis yang baru disahkan pada tanggal 1 November lalu resmi sebagai akhir dari *state of emergency* setelah dua tahun. Tapi menurut masyarakat, hukum ini tidak berjalan sesuai yang dijanjikan Macron. Hukum ini sama dengan hukum sebelumnya yaitu hanya menjatuhkan hukuman kepada kriminal biasa.

Setelah memimpin selama satu tahun lebih sejauh ini, belum banyak terlihat rencana-rencana Macron dalam memerangi xenofobia di Prancis. Macron masih memiliki tugas-tugas lainnya dalam memenuhi janjinya sebagai partai sayap kiri dan terbuka terhadap imigran. Macron harus menyusun segala rencana dalam memerangi sikap xenofobia masyarakat dalam sisa masa kepemimpinannya sehingga janji kampanyenya dapat terpenuhi.

Tabel perbandingan kebijakan Hollande dan Macron:

**Tabel 1**

<b>Kebijakan</b>	<b>Hollande</b>	<b>Macron</b>
Kebijakan Imigran dan Minoritas	Membuka perbatasan bagi para imigran dan menghargai <i>free movement</i>	Membuka perbatasan bagi para imigran dan menghargai <i>free movement</i>
	Menerima sistem EU dalam menyebarkan seluruh imigran yang datang pada setiap negara EU sesuai dengan kuota negara masing-masing	Berperan dalam perumusan kebijakan imigran bersama dengan EU dan reformasi menuju <i>single immigration plan</i>



Membuka Prancis terhadap imigran pencari suaka dan membatasi imigran dengan tujuan ekonomi	Membuka Prancis terhadap imigran pencari suaka dan mempercepat masa deportasi imigran dengan tujuan ekonomi
Aturan perbatasan harus ditegakkan dengan baik	Aturan perbatasan harus dipersulit agar imigran ilegal tidak bisa masuk ke Prancis
Memberikan otoritas bagi militer, polisi, gendarmerie di dalam dan di perbatasan Prancis	Menambah jumlah polisi, militer dan gendarmerie di dalam dan perbatasan Prancis
Fokus kerjasama dengan Timur Tengah, Asia dan Afrika	Fokus kerjasama dengan Libia, Nigeria, Chad
Menutup kamp Calais yang dikatakan tidak pantas	Menjadikan 62 motel sebagai tempat tinggal imigran yang tidak memiliki rumah akibat ditutupnya kamp di Calais
Security and Counter Terrorism Act pada Desember	Tergabung dalam Proposal dengan menambah peran polisi, militer dan gendarmes disertai teknologi yang lebih canggih

	<p><i>Surveillance act</i> pengawasan melalui black-boxes</p>	<p>Bekerja sama dengan Inggris melalui hukum wajib bagi Facebook dan Google dalam melarang penyebaran konten radikal</p>
	<p>Meningkatkan koalisi bersama Amerika Serikat</p>	<p>Meningkatkan koalisi bersama Amerika Serikat dan membentuk kerjasama antara EU dengan Uni Afrika</p>
Melawan xenofobia	<p>Sektor perumahan dan perekrutan: Operasi Tes kepada perusahaan-perusahaan dengan pegawai di atas 1.000 orang</p>	<p>Sektor perumahan dan perekrutan: Operasi tes kepada perusahaan-perusahaan besar dan sektor-sektor Prancis Memberikan tempat penampungan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Departemen nasional melawan provokasi media sosial</li> <li>- Konferensi mengenai anti xenofobia di lokal, regional dan internasional</li> </ul>	

## **BAB IV**

### **FAKTOR-FAKTOR UTAMA PENYEBAB TERJADINYA**

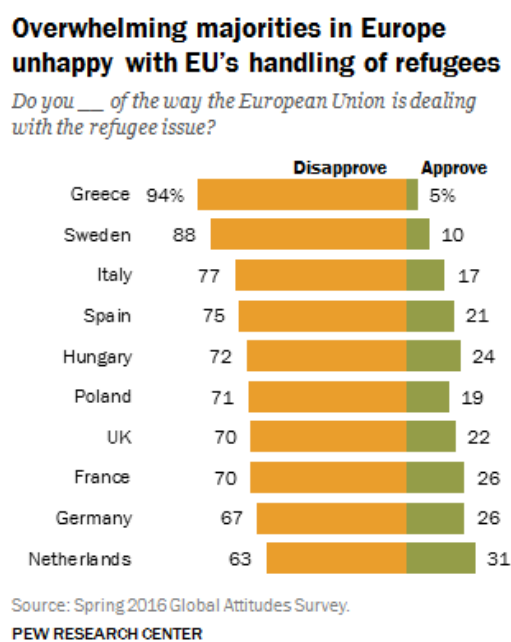
#### **PENINGKATAN XENOFOBIA DI PRANCIS**

Dalam bab IV ini akan dijelaskan mengenai beberapa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya peningkatan xenofobia di Prancis melalui perspektif *Realistic Conflict Theory* (RCT). RCT merupakan teori kombinasi antara sosiologi dan psikologi yang diusung oleh seorang psikologis, Muzafer Sherif. Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya pada masa kepemimpinan Francois Hollande dan Emmanuel Macron di mana keduanya telah melakukan berbagai kebijakan dalam mewujudkan integrasi antar masyarakat dan memerangi segala hal yang dapat menyebabkan terbentuknya sikap xenofobia. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum dapat menekan angka xenofobia. Oleh karena itu, pada bab ini akan lebih dielaborasi kembali alasan utama dari terjadinya peningkatan xenofobia ini.

#### **4.1 Konflik Intergroup Masyarakat asli Prancis dengan Orang Asing**

Dasar-dasar dari pemikiran RCT sudah terpenuhi dalam peristiwa xenofobia di Prancis. Jika dilihat dari penerapan teorinya, *In group* di sini dimaksudkan kepada masyarakat asli Prancis yang memiliki sentimen xenofobia baik sebagai individu maupun termasuk dalam suatu kelompok anti-orang asing. Sedangkan *Out group* di sini dimaksudkan kepada orang asing, minoritas dan imigran yang ada di Prancis. Pada awal masuknya imigran dan menjadi minoritas di Prancis, Prancis selalu menganggap bahwa mereka merupakan pekerja yang akan membantu Prancis dalam meningkatkan ekonomi negara. Namun, setelah pendatang bertambah mulailah masyarakat asli menganggap mereka sebagai cadangan pekerja dengan

menempatkan diri sendiri sebagai pekerja utama yang harus lebih dulu terpilih (Dustmann, Glitz, & Tommaso, 2008, pp. 477-479). Lambat laun pandangan ini mengakar terhadap masyarakat asli sehingga muncul penilaian bahwa pendatang hanya merupakan ancaman bagi kehidupan masyarakat asli Prancis. Prancis yang selalu setuju dalam kebijakan EU mengenai imigran pada masa Hollande dan Macron berbeda dengan masyarakat asli.



Gambar 2. Tingkat ketidakpuasan masyarakat Eropa terhadap kebijakan EU mengenai imigran (Poushter J. , 2016).

Hal yang menarik dapat dilihat dari gambar 2 karena ke 10 negara Eropa masyarakatnya kebanyakan setuju bahwa kebijakan EU masih buruk dalam menangani imigran (Poushter, 2016).

Menurut masyarakat asli, akibat dari kebijakan pemerintah mereka harus bersaing dalam perebutan sumber daya. Padahal faktanya, Prancis tidak mengalami kekurangan sumber daya dan hal tersebut hanya merupakan pikiran

masyarakat asli saja (CCFD, 2014, p. 13). Timbulnya pikiran tersebut karena rasa tidak rela akan layanan-layanan negara yang didapatkan oleh para orang asing yang seharusnya layanan tersebut eksklusif bagi mereka. Prancis akhirnya percaya adanya persaingan di antara kedua kelompok tersebut. Persaingan ini pun menimbulkan aksi verbal bahkan hingga menuju diskriminasi bagi masyarakat asing. Para minoritas bahkan dilarang untuk menggunakan atribut-atribut agama mereka di lingkungan publik (Sciolino, 2004). Atribut-atribut tersebut padahal merupakan identitas bagi mereka dan hak yang harusnya mereka dapatkan. Etnis Prancis juga sebagai etnis dominan tentunya tidak ingin merasa ada etnis lain yang lebih superior dibanding mereka. Masyarakat asli hanya ingin nilai dan budaya Prancis saja yang diterapkan di Prancis tanpa ada budaya lain yang bisa mengganggu. Masyarakat asli tidak ingin adanya minoritas yang mengatur mereka dalam kehidupannya (Piser, 2018). Prasangka-prasangka lain juga turut membekas pada masyarakat asli.

Peningkatan xenofobia terutama pada tahun 2015 menjadi hal yang berbeda dibandingkan peningkatan-peningkatan sebelumnya. Dengan tingkat toleransi yang terus melonjak, sikap xenofobia masyarakat juga turut melonjak. Peningkatan ini juga lebih terfokus kepada imigran terutama ketika krisis imigran terjadi. Krisis imigran mengambil peran penting dalam peningkatan kali ini dibandingkan faktor lainnya. Perpindahan imigran pada tahun 1880 lalu juga dapat dikatakan menjadi pemicu munculnya sikap xenofobia, tetapi kali ini krisis imigran bukan sebagai pemicu saja, melainkan juga sebagai faktor utama melonjaknya peningkatan sikap xenofobia masyarakat. Kali ini ancaman dan teror bukan sebagai faktor utama seperti yang sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya (Beltran, 2017, pp. 13-15).

Kesimpulan ini dapat dilihat pada Grafik 1. bahwa teror-teror yang telah terjadi memang menambah angka xenofobia di masyarakat namun peningkatan drastis selanjutnya terjadi ketika krisis imigran terjadi. Sikap xenofobia masyarakat kali ini juga lebih terfokus kepada imigran dibandingkan sebelumnya yang terfokus pada minoritas karena keterlibatan mereka dalam aksi teror.

Walaupun Prancis menjadi negara ke-tiga paling banyak menerima imigran, tetapi Prancis juga adalah negara yang paling dihindari oleh para imigran akibat sikap xenofobia masyarakat yang terus berlanjut ini (Samuel, 2015). Krisis ini akhirnya membuat retorika xenofobia masyarakat menyerap hingga menjadi kebencian terhadap imigran. Tidak hanya itu, sikap ini juga muncul terhadap minoritas yang notabene pernah memiliki status sebagai imigran. Akhirnya bagi masyarakat Prancis, imigran dan orang yang memiliki identitas berbeda dengan mereka dianggap sebagai ancaman (Kingsley, 2015).

Dalam sebuah interaksi antar kelompok yang berbeda, wajar halnya seseorang memiliki prasangka terhadap kelompok lainnya baik itu merupakan prasangka yang baik atau buruk. Masyarakat asli di sini cenderung memiliki prasangka buruk terhadap masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran Prancis yang biasanya ditinggali oleh masyarakat minoritas. Masyarakat pinggiran sering dikatakan sebagai masyarakat kriminal padahal tidak ada bukti bahwa kelompok tersebut melakukan tindak kriminal. Prasangka tersebut timbul karena adanya ancaman-ancaman yang sebelumnya mereka rasakan (Brown & Turner, 1981, p. 33). Ada empat macam ancaman yang menjadi faktor dalam terbentuknya prasangka buruk masyarakat asli terhadap minoritas, imigran dan orang asing yang

menyebabkan terjadinya peningkatan xenofobia di Prancis. Ancaman-ancaman tersebut sebagai berikut:

#### **4.2.1 Ancaman Realistik**

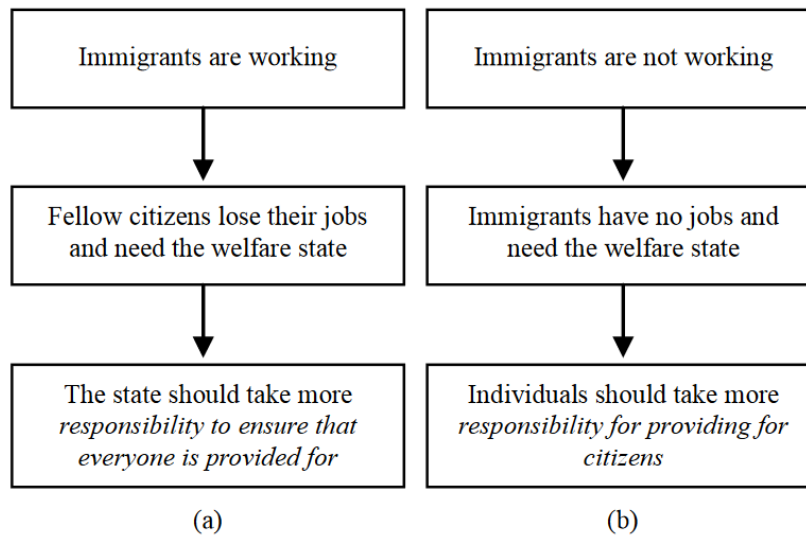
Ancaman realistik di sini terbentuk dari rasa cemburu yang timbul pada masyarakat asli terhadap orang asing. Selain cemburu, adanya rasa terancam yang dirasakan oleh masyarakat asli terhadap orang asing yang dapat merugikan mereka. Rasa ini identik dengan aspek keselamatan, kesehatan, keberlangsungan hidup, ekonomi dan politik yang dirasa sebagai keutamaan hak masyarakat asli dibandingkan orang asing (Kendall, 1998). Bobo juga mengatakan: *“The idea that realistic threats can cause prejudice is a fundamental premise of realistic group conflict theories”* (Bobo, 1988, pp. 85-116). Ancaman realistik menjadi alasan fundamental terbentuknya prasangka pada masyarakat asli.

Masyarakat asli merasakan bahwa para pendatang baru lebih diperhatikan oleh pemerintah dibandingkan dengan masyarakat asli sendiri. Pendapat ini dikemukakan karena melihat angka pengangguran Prancis yang terus bertambah. Survei terakhir pada tahun 2017 lalu menunjukkan data sebanyak 2,7 juta jiwa. Angka ini membuat anggapan seharusnya pemerintah lebih memperhatikan pengangguran di Prancis terutama masyarakat asli dahulu dibandingkan menerima imigran. Masyarakat akhirnya menilai bahwa pemerintah tidak adil dalam membentuk kebijakan. Sekitar 60% hingga 80% masyarakat asli tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dalam menangani imigran (Barysch, 2016). Sebanyak 46% masyarakat asli berpendapat untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah juga harus mengurangi orang asing masuk ke Prancis (Insee, 2017).

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah baik Hollande maupun Macron dalam mencapai kesetaraan antar tiap golongan justru menimbulkan protes dari masyarakat. Masyarakat berpendapat adanya “perenggutan” hak ekonomi yang seharusnya untuk mereka tetapi disalurkan kepada para pendatang. Masyarakat asli sendiri berpendapat pemerintah harus lebih fokus terhadap kesejahteraan mereka terlebih dahulu dibandingkan pendatang baru (French Culture, 2011).

Ketakutan masyarakat asli juga terbentuk terhadap kompetisi yang ada dalam aspek kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja. Imigran dianggap telah mengambil kesempatan kerja yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat. Status pekerjaan imigran dapat mempengaruhi masyarakat dengan dua cara. **Pertama**, jika imigran tidak memiliki pekerjaan maka masyarakat menganggap bahwa imigran hanya akan mengambil keuntungan dari sistem kesejahteraan yang ada di Prancis. **Kedua**, jika imigran memiliki pekerjaan maka masyarakat menyimpulkan bahwa para imigran telah mengambil kesempatan pekerjaan yang seharusnya milik mereka (Maddux, Polifroni, & Galinsky, 2006, p. 151). Berikut penggambarannya:





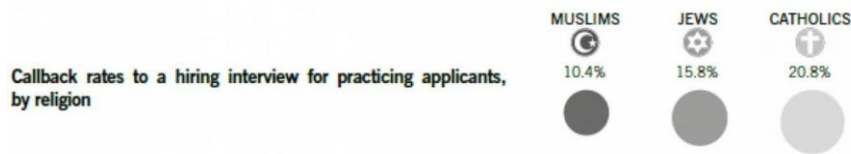
Gambar 3. Peta pendapat masyarakat (Berton, 2013)

Imigran dirasa akan menjadi ancaman bagi ekonomi negara sehingga masyarakat asli selalu menyalahkan kebijakan pemerintah. Masyarakat asli juga tidak ingin direpotkan oleh imigran yang menurut mereka malas dengan memberi tunjangan melalui pajak setiap tahunnya. Menurut survei yang dilakukan oleh SciRes, 1 orang masyarakat berpendapat kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab individu sedangkan 10 masyarakat menjawab bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah (Berton, 2013, pp. 31-2). Ini mengartikan bahwa masyarakat asli tidak ingin bertanggung jawab terhadap kesejahteraan imigran di sana karena merepotkan bagi mereka. Mereka hanya menginginkan agar pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para imigran. Imigran juga dikatakan sebagai beban bagi kesejahteraan negara.

Masyarakat asli juga menganggap bahwa imigran telah “mencuri” pekerjaan yang seharusnya untuk mereka. Biasanya yang memiliki pendapat ini biasanya berasal dari masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah (Verbosky, 1997,

p. 51). Ini membuktikan bahwa masyarakat hanya menyalahkan imigran atas status ekonomi yang dimiliki padahal hingga saat ini, Jean-Christophe Dumont sebagai perwakilan OECD dari Paris mengatakan bahwa belum ada kajian yang membuktikan imigran telah mengambil kesempatan pekerjaan dari masyarakat asli (Dumont, 2015). Di sisi lain menurut World Values Survey, masyarakat asli lebih takut terhadap imigran akan menekan sistem kesejahteraan Prancis dibandingkan mereka mengambil pekerjaan (Reeskens & Oorschot, 2015, pp. 1-2).

Persaingan pekerjaan hanya merupakan persepsi di kalangan masyarakat asli. Menurut data statistik survei oleh Insee, angka pengangguran imigran sebesar 17,3% hampir 80% lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran non-imigran yaitu sebesar 9,7%. Sebanyak 20% keturunan imigran hidup di bawah garis kemiskinan, 10% orang Prancis yang memiliki orang tua imigran (Gorodzeisky & Semyonov, 2017, pp. 6-15). Kenyataan lain adalah keturunan Afrika lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Keadaan ini terjadi karena memang sejatinya masyarakat asli Prancis lebih diuntungkan dengan bahasa, pendidikan dan juga lebih memiliki kemampuan dalam bekerja dibandingkan pendatang baru. Selain itu, hal ini juga menandakan imigran masih belum sepenuhnya dapat menikmati kesempatan sosio-ekonomi yang harusnya telah dijamin oleh pemerintah (Tainturier, Halasa, & Baba, 2008, pp. 28-43).



Gambar 4. Perbandingan bagi panggilan pekerjaan berdasarkan agama (Briancon, 2017).<sup>4</sup>

Gambaran di atas merupakan tingkat panggilan resmi tahap selanjutnya dari perusahaan tempat minoritas mendaftar pekerjaan. Masyarakat yang berpotensi paling rendah mendapatkan panggilan tahap selanjutnya dalam lamaran pekerjaan adalah minoritas Muslim sebanyak 10,4%. Kemudian 15,8% adalah nama yang identik dengan Yahudi. Masyarakat yang mendaftar pekerjaan menggunakan nama yang terdengar orang asing lebih berpeluang untuk menerima panggilan wawancara. Ini menandakan, bahkan perusahaan Prancis sudah menandakan adanya prasangka yang negatif dalam tahap lamaran pekerjaan.

Selain itu aspek politik juga menjadi sorotan dalam prasangka masyarakat asli. Ketakutan yang dimiliki masyarakat asli di sini merupakan ketakutan akan hak politik yang seharusnya hanya milik masyarakat menjadi terbagi kepada masyarakat pendatang yang notabeneanya bukan keturunan Prancis (Briancon, 2017). Selain itu masyarakat tidak ingin adanya minoritas menduduki kursi-kursi pemerintahan. Menurut mereka, tidak pantasanya “orang baru” menjadi perwakilan rakyat di pemerintahan. Mereka dirasa tidak mengerti latar belakang

<sup>4</sup> Survey oleh Marie-Anne Valfort mengenai “Religious Discrimination in Access to Employment: a Reality”. Angka 0% menunjukkan tidak ada panggilan untuk interview lebih lanjut bagi pendaftar dan semakin besar angka menunjukkan semakin besar presentasi panggilan untuk interview sedangkan angka 100% menunjukkan panggilan diterima oleh seluruh pendaftar.

negara Prancis dan tidak memahami betul nilai-nilai Prancis. Mereka juga “baru saja” ada dan menyaksikan jalannya perkembangan negara Prancis sehingga mereka tidak cocok untuk dijadikan sebagai bagian dari pemerintahan Prancis (Nationalia, 2015). Tentunya hal tersebut terjadi karena masyarakat asli tidak ingin adanya minoritas yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.

#### **4.2.2 Ancaman Simbolis**

Ancaman simbolis di sini terkait dengan adanya perbedaan nilai, moral, tingkah laku, standar dan kepercayaan antara masyarakat asli dengan pendatang (Oskamp, 2000). Ancaman ini bentuknya tidak terlihat berbeda dengan ancaman realistik. Ancaman ini lebih dirasakan terhadap masyarakat asli dengan menganggap orang asing lainnya memiliki nilai dan kepercayaan yang berbeda. Nilai dan kepercayaan di sini hal yang paling menonjol memiliki perbedaan dibandingkan yang lainnya di Prancis. Perbedaan tersebut cenderung dianggap sebagai ancaman atas nilai dan kepercayaan yang ada di Prancis. Hal ini tentu membuat masyarakat asli segan menerima pendatang terutama karena adanya rasa nasionalisme yang kuat dan tinggi. Selain itu penolakan ini dilakukan agar nilai, kepercayaan, moral dan sikap masyarakat asli tetap bertahan seperti sedia kala (Nossiter, 2016). Masyarakat asli mengatakan penolakan ini dilakukan semata untuk melindungi identitas nasional yang mereka miliki. Ini menyebabkan Prancis lebih proteksionis terhadap orang asing terutama ketika mengetahui asal mereka.

Dalam konteks yang sudah berkembang, minoritas memiliki budaya dan tradisi agama yang berbeda dibandingkan masyarakat asli. Hal tersebut merupakan ancaman simbolik terhadap identitas nasional dan budaya Prancis (Huddy & Sears,

1995, pp. 133-43). Ancaman simbolik ini menjadi momok terjadinya sikap xenofobia dan anti-imigran masyarakat asli terutama masyarakat dengan nasionalisme tinggi.

Masuknya masyarakat dengan budaya baru ditakutkan akan mempengaruhi budaya di Prancis bahkan hingga menggantikan budaya di Prancis. Budaya-budaya yang sangat berbeda seperti budaya Muslim sangat ditakutkan oleh masyarakat karena dapat membentuk proses Islamisasi terutama minoritas Islam merupakan minoritas terbanyak di Prancis. Bahkan menurut survei Ipsos, sebanyak 74% masyarakat asli mengatakan bahwa budaya Muslim tidak cocok dengan budaya Prancis (Burrows-Taylor, 2017). Selain karena Muslim merupakan minoritas terbanyak di Prancis, alasan ini juga tentu ditambah Muslim merupakan agama terbesar di dunia. Masyarakat juga tidak ingin adanya proses Islamisasi di Prancis terutama karena menganggap hukum Islam tidak memberikan kesetaraan pada wanita dan membatasi hak-hak setiap penganutnya (Osborne, 2016) . Minoritas Muslim juga dinilai selalu lebih terikat dengan budaya dan agamanya dibandingkan budaya dan nilai-nilai di Prancis. Menurut masyarakat asli, para Muslim lebih memperhatikan budaya mereka dibanding budaya Prancis.

Perbedaan budaya dan agama ini menjadi salah satu contoh alasan terbentuknya ketakutan masyarakat terhadap Muslim. Bahkan, proses ini juga dapat menjadi generalisasi bagi minoritas lainnya yang terlihat melaksanakan budaya-budaya kepercayaannya. Agama fundamental juga selalu menjadi perhatian bagi 77% masyarakat asli (McPartland, 2013). Budaya yang berbeda dirasa bisa menjadi pelenyapan dari budaya asli masyarakat asli (Roemer & Straeten, 2005, pp. 95-144).

Selain itu melihat semakin banyak imigran yang masuk, masyarakat menganggap bahwa imigran merupakan pemecah komunitas dan melemahkan solidaritas (Semotiuk, 2018). Belum lagi proses integrasi selalu membuat masyarakat asli pesimis terhadap baik minoritas maupun imigran. Masyarakat melihat bahwa minoritas tidak berjuang keras dalam melakukan integrasi sebagai masyarakat asli. Terutama mereka yang masih membawa budaya negara lamanya ke Prancis. Bahasa juga menjadi momok bagi integrasi para minoritas. Tidak semua minoritas dapat dengan lancar berbahasa Prancis mengakibatkan kesulitan komunikasi dengan masyarakat asli (CBC, 2007).

Pendapat publik komunitas nasional kebanyakan menganggap imigran dan minoritas sebagai ancaman untuk nasionalisme negara. Lebih spesifiknya, masalah imigran sering terjadi di dalam lingkungan sekolah, pendapatan rumah tangga yang sedikit, jumlah pengangguran hingga peredaran ekonomi. Salah satu contohnya adalah orang asing yang berasal dari Afrika kesulitan dalam hal pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal. Adanya batasan kepada imigran yang muda tetapi kurang memiliki bakat juga menjadi hambatan integrasi. Pendidikan sendiri tidak dijamin kepada seluruh generasi muda minoritas maupun imigran. Bagi yang beruntung mendapatkan pendidikan, masalah lain yaitu pencapaian prestasi susah untuk diraih (Barr, 2010). Kesulitan-kesulitan ini juga menjadi faktor bagi minoritas kesulitan untuk melakukan integrasi dan adaptasi budaya. Akhirnya mereka terlihat hanya melakukan budaya-budaya mereka saja. Rasa takutpun dirasakan minoritas jika ikut dalam merayakan budaya-budaya Prancis. Hal tersebut terjadi karena budaya Prancis masih dirasa asing dan juga masyarakat

masih gelisah tidak diterimanya mereka dalam komunitas (Karouni, 2012, pp. 45-51).

Seperti halnya percobaan Robbers Cave, identitas masyarakat asli di sini terbangun akibat adanya interaksi yang sudah terbentuk sejak lama antar masyarakat asli. Masyarakat akhirnya memiliki identitas kolektif yang ingin dipertahankan. Identitas tersebut juga tidak lepas aturan hidup masyarakat sesuai dengan konstitusi dan hukum serta nilai-nilai yang telah ditetapkan negara. Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana konstitusi negara Prancis yang tidak mengakui adanya gagasan kata minoritas di Prancis. Hal tersebut memiliki makna bahwa Prancis tidak mengakui adanya minoritas menurut etnis, agama, bahasa atau hal lainnya. Konstitusi Prancis tidak mengakui adanya kelompok kecil di sekitar masyarakat sehingga membuat kelompok minoritas tidak terlihat di hadapan hukum. Undang-undang Prancis hanya melihat masyarakatnya sebagai warganegara dan non-warganegara selain itu sebagai individu.

Tidak sedikit masyarakat asli ingin mengetahui sejauh mana negaranya memiliki sentimen xenofobia. Keinginan tersebut diperhatikan oleh badan survei nasional Prancis Ipsos dan jurnal dari *Le Journal Du Dimanche*. kedua institusi ini melakukan survei kepada masyarakat asli dengan kuesioner yang menanyakan pendapat mereka dalam melakukan interaksi dengan minoritas lainnya (Noack, 2016). Survei yang dilakukan sepanjang tahun 2006 hingga 2013 menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa masyarakat asli memiliki sentimen xenofobia. Kedua institusi ini dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah atas langkah yang dilakukan karena pemerintah sendiri melarang adanya survei yang berhubungan dengan etnis (France24, 2014). Terlihat dari peristiwa ini, pemerintah ingin menutupi fakta

bahwa masyarakat memiliki sentimen buruk terhadap etnis atau agama lain. Pemerintah juga tidak ingin adanya data mengenai fakta bahwa Prancis adalah negara yang xenofobik dengan data kuantitatif. Pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya dan dapat dengan mudah menarik hal-hal yang berbau etnis dan agama yang beredar di internet.

Semua warga negara memiliki hak yang sama dan undang-undang tidak dimaksudkan untuk memberikan hak khusus kepada “kelompok” tertentu berdasarkan asal, budaya, kepercayaan atau bahasa (Queen's University, n.d.). Jadi tidak ada aturan khusus yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan kelompok minoritas melainkan Prancis menggunakan kata *diversity* atau keberagaman (Prancis Patent No. LHAL1528110L, 2017).

Prancis melihat minoritas tentu melalui basis dari prinsip republik sebagai negara Republik. Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut (General Commissariat of Strategy and Prosperity, 2013):

1. Badan nasional dilihat sebagai homogen
2. Partisipasi publik pada dasarnya didasarkan pada suara dan representasi
3. Inklusi sosial melalui sekolah, tentara, tempat kerja, keluarga dll
4. Negara yang terpusat

Hal tersebut menjelaskan bahwa minoritas harus tetap percaya pada Prancis dan pemerintah agar dapat terbentuknya negara yang bersatu. Kebijakan ini telah dijalani selama 40 tahun oleh Prancis termasuk tetap dijalankan Hollande dan Macron (France24, 2018). Selain itu partisipasi setiap orang baik dalam kelompok



maupun tidak akan selalu dipertanggung jawabkan dan peran mereka untuk negara harus terlihat.

Kesetaraan dan sekuler menjadi dua nilai yang dikedepankan oleh Prancis bagi setiap individu. Keduanya telah menjadi nilai yang signifikan dibandingkan multikulturalisme (Malik, 2015). Tetapi konstitusi yang mengatakan “*all citizens are equal*” telah berjalan di arah sebaliknya. Dilihat dari Prancis sendiri menjadi negara yang enggan bergabung dalam *Framework Convention for the Protection of National Minorities* dan *European Charter for Regional or Minority Languages*. Padahal notabeneanya sekitar 15% dari masyarakat asli merupakan minoritas (WPR, 2018). Hal tersebut menyebabkan kehadiran mereka tidak diakui secara hukum dan hak mereka sebagai etnis lain tidak terjamin.

Idealnya seluruh masyarakat asli harus setara dengan hukum yang ada. Namun, hukum ini menjadi tidak terlihat akibat nilai yang dijunjung oleh Prancis sendiri. Nilai setara justru dijalankan dengan sebaliknya ditunjukkan dengan kurangnya data masyarakat berdasarkan agama, ras atau etnis. Kurangnya data ini juga berakibat sulitnya dilakukan analisis diskriminasi di Prancis dengan tujuan implementasi sebuah program yang menghapuskan diskriminasi dalam aspek pekerjaan hingga memilih pendidikan. Bahkan lembaga survei di Prancis tidak jarang memilih untuk tidak mempublikasi hasil survei yang dilakukan dengan angka melainkan hanya mempublikasi menggunakan metode deskriptif. Konstitusi yang telah dijalankan selama bertahun-tahun ini ditambah dengan nilai-nilai yang ada di Prancis tentu turut membentuk pemikiran masyarakat hingga memiliki prasangka sendiri terhadap orang lain.

### 4.2.3 Kegelisahan Antar Kelompok

Kegelisahan akibat dua ancaman di atas pasti terbentuk. Kegelisahan tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok melainkan keduanya. Rasa gelisah dirasakan baik oleh masyarakat asli maupun orang asing. Kegelisahan ini menimbulkan rasa takut hingga tidak percaya diri jika melakukan interaksi antar kelompok. Rasa tidak percaya diri bisa timbul dalam masyarakat asli karena adanya generalisasi yang buruk mengenai orang-orang asing. Karena adanya kegelisahan ini, masyarakat asli selalu mencoba untuk tidak berhubungan dengan orang asing. Bahkan beberapa masyarakat asli tidak ingin melibatkan orang asing dalam integrasi negara. Masyarakat asli akan merasakan ancaman terhadap *self-image* jika melakukan interaksi dengan orang asing.

Jika melakukan interaksi dengan orang asing yang dirasa malas, tidak pintar atau agresif maka perasaan gelisah tersebut meningkat (Hovey & Magana, 2003, pp. 274-280). Ini mengartikan bahwa masyarakat asli tidak ingin adanya campur tangan orang asing terhadap hal-hal yang dilakukan. Ini timbul akibat adanya pikiran pesimis, gengsi, malu dan lain-lain yang timbul terhadap orang asing.

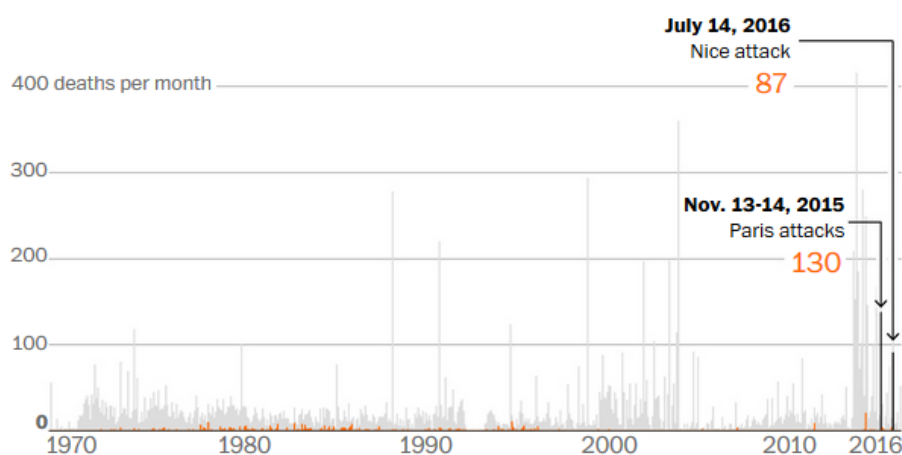
Selain itu, sebaliknya minoritas juga memiliki kegelisahan jika melakukan interaksi dengan masyarakat asli. Kegelisahan-kegelisahan tersebut tentu terbentuk akibat aksi-aksi xenofobia yang telah terjadi sepanjang tahun dan terus meningkat seperti yang telah dijelaskan pada bab II. Aksi protes yang sering dilakukan oleh masyarakat asli juga menambah kegelisahan mereka. Rasa takut dirasakan hingga para minoritas lebih memilih untuk tinggal secara berkelompok bersama dengan minoritas yang satu latar belakang (Khan, 2018).

Kegelisahan antar kelompok ini mengakibatkan kedua belah pihak saling menghindari interaksi satu sama lain. Jika interaksi terjadi maka peningkatan kegelisahan juga ikut terjadi. Mereka akan mencoba untuk mempersingkat interaksi tersebut dan berusaha untuk saling mengintimidasi.

#### **4.2.4 Stereotip yang negatif**

Stephan mengatakan bahwa stereotip negatif timbul sebelum adanya ancaman realistik, ancaman simbolik dan kegelisahan antar kelompok (Stephan, 1977). Akibatnya, stereotip negatif termediasi melalui tiga ancaman di atas. Namun, stereotip yang negatif berhubungan juga dengan kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Tingkat stereotip Negatif dapat berbanding lurus terhadap kegelisahan masyarakat. Generalisasi ini timbul dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya dan berkaitan dengan orang-orang asing bahkan minoritas yang ada di Prancis (Stokes B. , 2016).

Serangan-serangan yang selalu menjadi perbincangan dan paling banyak terjadi di Prancis adalah serangan teroris kelompok radikal. Berikut hasil perhitungan terhadap serangan tersebut:



Grafik 4. Grafik serangan yang melibatkan kelompok radikal Islam (Alcantara, 2017).<sup>5</sup>

Serangan yang paling mematikan terjadi di Prancis adalah pada tahun 2015 dengan memakan korban hingga 140 jiwa pada peristiwa *Paris Attack*. Lalu 10 bulan kemudian, serangan teroris paling buruk yang pernah terjadi ketika anggota dari Islamic State mengkoordinasi beberapa serangan penembakkan dan bom di Paris yang menewaskan 130 orang (Alcantara, 2017). Tentu hal ini menjadi trauma sendiri bagi masyarakat asli dan meninggalkan kesan buruk terhadap pelakunya. Akibatnya kebencian masyarakat asli meningkat terutama kepada Muslim dengan generalisasi bahwa seluruh Muslim adalah ancaman.

Serangan yang paling banyak diperbincangkan di Prancis pada kurun waktu 2012 hingga 2018 adalah serangan terorisme radikal. Radikal Muslim menjadi sorotan utama bagi segala teror yang terjadi di Prancis bahkan Muslim secara umumnya sering disalahkan. Serangan tersebut membuat masyarakat semakin anti

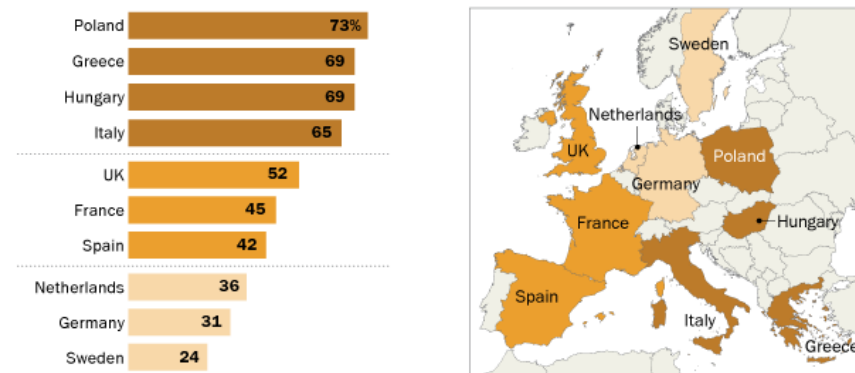
<sup>5</sup> Survei ini menggambarkan serangan-serangan yang terjadi dari tahun 1972 hingga tahun 2016. Serangan tersebut melibatkan pelaku yang berasal dari: The Islamic State, Anti-Terrorist Liberation Group, Armenian Secret Army for the Liberation of Armenian, Corsican National Liberation Front dengan jumlah korban sebanyak 492 jiwa.

terhadap Muslim. Bahkan serangan-serangan anti-Muslim juga turut meningkat. Walaupun serangan terhadap masjid telah meningkat dua kali namun, serangan lebih ditujukan kepada orang terutama wanita karena pakaian yang lebih terlihat agamis bukan kepada masjid, kuburan atau toko-toko milik Muslim. Retorika mengenai anti-Muslim pun menyebar dan menjadi suatu hal yang umum dalam dunia politik maupun bisnis di Prancis (Char, 2013). Jadi, stereotip negatif ini menyebabkan terciptanya perasaan terancam dibandingkan merupakan tipe dari ancaman itu sendiri (Myres, Abrams, Roshental, & Christian, 2013, pp. 76-77).

Mayoritas serangan tersebut berasal dari radikal teroris. Serangan ini berujung memperburuk stereotip masyarakat terutama pada Muslim. Menurut survei Sebanyak 34% masyarakat asli berfikir bahwa Islam merupakan masalah dan 50% mengatakan Islam merupakan ancaman bagi negara. Ancaman di sini bukan hanya bagi nilai yang dimiliki Prancis juga sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Masyarakat asli juga memiliki stereotip negatif terhadap kelompok Roma yang merupakan masyarakat dari banyak kewarganegaraan dengan 57% mengatakan bahwa kelompok Roma tidak berusaha dalam melakukan integrasi. Kedua angka ini memiliki peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (Waters, 2016).

### Many Europeans see refugees from Syria and Iraq as a major threat

*% saying large number of refugees leaving Iraq and Syria is a major threat to their country*



Source: Spring 2016 Global Attitudes Survey.

PEW RESEARCH CENTER

Gambar 5. Peta penyebaran imigran dari Suriah dan Irak (Bruce, 2015)<sup>6</sup>

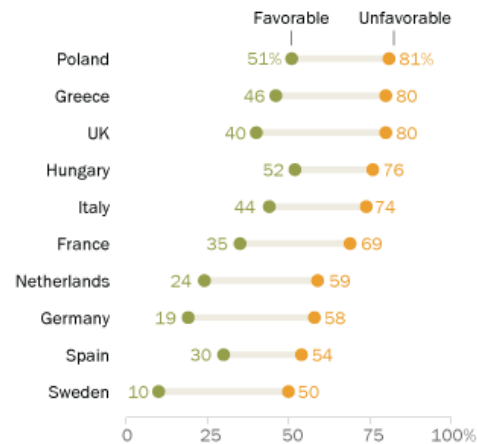
Dari survei di atas, sebanyak 45% masyarakat asli banyak yang beranggapan pengungsi dari Suriah dan Irak merupakan ancaman bagi negara. Kedua negara tersebut merupakan asal dari minoritas-minoritas Muslim di Prancis. Mereka hanya akan menambah tingkat kejahatan kriminal di Prancis. Walaupun angka tersebut tidak mencapai setengah dari jumlah survei, namun angka 45% tetap menjadi angka yang tinggi terutama pendapat masyarakat menjadi pendapat yang diskriminatif. Masyarakat dengan prasangka buruk terhadap Muslim juga lebih berpotensi menganggap pengungsi sebagai ancaman seperti berikut:

<sup>6</sup> Survey dilakukan oleh PEW Research terhadap 10 negara anggota Uni Eropa

---

**Perceived refugee threat higher among those with negative view of Muslims**

*Among those with a \_\_\_ view of Muslims in their country, % saying large number of refugees leaving Iraq and Syria is a major threat*



Note: Differences shown are statistically significant.

Source: Spring 2016 Global Attitudes Survey.

PEW RESEARCH CENTER

---

Gambar 6.

Kemudian Gambar 6 di atas menunjukkan ada 69% masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap Muslim. Jika dibandingkan antara gambar 9 dan gambar 10, pandangan tersebut juga mempengaruhi pendapat sebelumnya yang pada gambar ke 9. masyarakat dengan pandangan negatif terhadap Muslim lebih memiliki ketakutan terhadap imigran.

Prasangka buruk yang meningkat bukan hanya terjadi terhadap Muslim melainkan juga Yahudi. Prasangka buruk yang sudah terbentuk sedari tahun 1970 ini berkembang hingga Prancis memiliki kelompok anti-Zionis. Prasangka burukpun meningkat ketika konflik antara Israel dan Palestina terjadi dan pasca Perang Dunia II. Bahkan perkembangannya sudah mulai tumbuh pada anak-anak dengan orang tua masyarakat asli. Karena prasangka ini, orang tua terpaksa

menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah Yahudi (Peiron, 2016). Prancis merupakan negara kedua yang memiliki banyak penduduk Yahudi setelah Israel bahkan Amerika Serikat berada di posisi ke tiga. Baik minoritas Muslim dan Yahudi mayoritas berasal dari Afrika Utara yang dahulu merupakan pekerja cadangan di Prancis.

Prasangka masyarakat asli juga terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh Yahudi. Salah satu serangan yang paling membuat masyarakat asli marah adalah pada tahun 2014 lalu salah seorang Yahudi melakukan vandalisme terhadap *the statue of Marianne*. *The statue of Marianne* merupakan lambang yang dihormati oleh seluruh masyarakat asli sebagai kebanggaan mereka. Masyarakat asli merasa Prancis telah dilecehkan sehingga terjadilah demonstrasi besar-besaran di Paris. Para demonstran dengan meneriakkan “*Mort aux juifs! mort aux juifs!*” yang artinya kematian untuk Yahudi dan juga “*Kill the Jews*” menandakan kemarahan mereka terhadap seluruh Yahudi (Brenner, 2015). Peristiwa ini mencerminkan bahwa memang sudah ada kebencian terhadap Yahudi di masyarakat asli dan kesalahan satu orang bisa digeneralisasi menjadi kesalahan seluruh kelompok.

Protes ini juga dipenuhi oleh masyarakat pro-Palestina. Masyarakat asli menyalahkan Yahudi atas segala tragedi yang menimpa Palestina hingga menelan ribuan korban (IPT, 2018). Mereka juga membawa bendera Hamas dan ISIS di tengah-tengah para demonstran. Mereka menginginkan akan Yahudi segera menyudahi penyiksaan yang dilakukan. Ini juga menandakan bahwa jika salah satu oknum bersalah maka prasangka buruk juga akan timbul secara keseluruhan terhadap Yahudi (AFP, 2016). Masyarakat berpikir bahwa Yahudi lebih setia terhadap Israel dibandingkan negaranya sendiri. Masyarakat asli juga berpendapat



bahwa Yahudi terlalu banyak menduduki kursi pemerintahan yang mana seharusnya tidak terjadi terutama sebagai politisi dengan ekonomi menengah ke bawah (Donadio, 2018). Dengan kesalahan satu orang dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan protes besar-besaran. Ini tentu tidak akan meluas jika tidak karena prasangka yang memang sudah ada dan meningkat. Sehingga vandalisme ini hanya meningkatkan prasangka buruk yang dimiliki oleh masyarakat asli terhadap Yahudi.

Data survei yang dilakukan terhadap masyarakat asli mengenai Yahudi juga membuktikan prasangka tersebut. Sebanyak 20% masyarakat asli berfikir bahwa mereka memiliki kekuasaan lebih di bidang politik dan pemerintahan tetapi bukan merupakan masyarakat menengah ke atas. Menurut masyarakat asli, hal ini tidak seharusnya terjadi terlebih mereka hanya minoritas kecil jika dibandingkan Muslim. Masyarakat tetap merasakan bahwa di Prancis sudah terlalu banyak imigran datang dan Prancis sudah tidak terasa seperti rumah sendiri terutama 79% masyarakat tersebut menjelaskan bahwa mereka terlibat dalam pertumbuhan ekonomi Prancis (Reynie, 2014).

Menurut poling yang dilakukan *Odoxa Instituse for Le Parisien* juga menggambarkan peningkatan stereotip negatif terhadap orang asing. Sebanyak 56% masyarakat mengatakan bahwa gereja Katolik memiliki imej yang buruk terhadap masyarakat asli. Selain itu, 83% masyarakat mengatakan gereja tersebut terlalu konservatif dengan segala aktivitasnya dan 64% menganggap gereja tersebut sia-sia karena tidak terlalu memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah masyarakat pada kesehariannya. Poling ini dilakukan setelah terjadinya skandal

ketika beberapa orang melakukan laporan atas beberapa pendeta. Pendeta-pendeta tersebut dikatakan telah melakukan aktivitas pedofilia (Medina, 2016).

Peristiwa-peristiwa tersebut menghasilkan kebencian menjadi generalisasi terhadap seluruh minoritas yang ada. Dilihat dari sebagian kecil kasus ini dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya baik serangan, kejadian hingga skandal dapat mempengaruhi dan meningkatkan stereotip buruk masyarakat asli terhadap orang asing. Masyarakat menjadi pesimis kepada minoritas yang ada terutama dalam proses integrasi negara dan memilih mengisolasi diri mereka karena prasangka buruk yang ada.

Seluruhnya peningkatan xenofobia ini diawali dari rasa ketakutan masyarakat asli terhadap orang asing. Rasa takut ini bisa disebabkan oleh serangan-serangan, peristiwa yang merugikan hingga skandal-skandal yang melibatkan minoritas, imigran atau orang asing sebagai pelakunya. Kemudian ditambah dengan ancaman-ancaman lainnya hingga stereotip negatif menjadikan tingkat xenofobia masyarakat semakin tinggi. Sikap xenofobia ini akan menghasilkan diskriminasi verbal hingga kekerasan dan menciptakan konflik antar kedua pihak. Jika peristiwa ini tetap terjadi tanpa adanya *cooling down* seperti yang dilakukan Sherif pada penelitian fase ketiganya, maka konflik ini akan tetap berjalan.

Berikut penjelasan mengenai variabel-variabel teori terhadap temuan pada skripsi ini:

**Tabel 2**

Variabel		Deskripsi
<i>Independent</i>	Ancaman realistik	<p><b>Ekonomi:</b></p> <p>Orang asing lebih diperhatikan oleh pemerintah, Masyarakat asli takut orang asing akan mencuri kesempatan kerja karena masih banyak pengangguran, Orang asing merugikan masyarakat asli karena harus membayar pajak untuk orang asing,</p> <p><b>Keberlangsungan hidup:</b> menyalah gunakan sitem kesejahteraan negara, Orang asing merupakan beban negara karena menurut mereka imigran malas</p> <p><b>Politik:</b></p> <p>Hak politik yang diberikan kepada orang asing, minoritas berperan dalam pemerintahan</p>

	<p>Ancaman simbolik</p>	<p><b>Nilai:</b></p> <p>Konstitusi dan nilai negara Prancis yang telah membentuk identitas masyarakat asli tidak mengakui minoritas,</p> <p><b>Nasionalisme masyarakat yang tinggi</b></p> <p><b>Budaya:</b></p> <p>Budaya yang berbeda dan tidak cocok di Prancis,</p> <p>Minoritas lebih dominan mempraktekkan budayanya dibanding budaya Prancis</p> <p><b>Moral:</b></p> <p>Memecah solidaritas masyarakat asli, tidak ada perjuangan keras dalam berintegrasi,</p> <p><b>Kepercayaan:</b></p> <p>Agama fundamental menjadi ancaman</p>
--	-------------------------	---

	Kegelisahan antar kelompok	<p><b>Self-image terancam:</b></p> <p>Kedua kelompok merasakan kegelisahan dalam berinteraksi satu sama lain, menghindari terjadinya proses interaksi, rasa segan, gengsi hingga pesimis dalam interaksi</p>
	Stereotip Negatif	Terbentuk dari serangan-serangan, skandal hingga peristiwa yang dilakukan oleh orang asing dan merugikan masyarakat asli
<i>Dependent</i>	Xenofobia masyarakat Prancis terhadap minoritas, imigran dan orang asing	
<i>Moderator</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan serangan terhadap minoritas, imigran dan orang asing</li> <li>- Semakin tinggi jumlah angka terhadap poling maupun survei mengenai penolakan imigran oleh masyarakat asli</li> <li>- Peningkatan terhadap Protes mengenai kebijakan pemerintah terhadap imigran</li> </ul>	

<i>Intervening</i>	Masyarakat dengan Pendidikan tinggi biasanya lebih kecil tingkat xenofobia dibandingkan masyarakat dengan Pendidikan rendah,  Masyarakat yang toleransi dan tidak memiliki pengalaman buruk dengan orang asing
--------------------	--

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Xenofobia belakangan ini marak menjadi perhatian di Eropa terutama peristiwa ini telah terjadi dan mengakar pada masa lalu terutama di Prancis. Sikap xenofobia masyarakat Prancis telah terbentuk semenjak tahun 1880. Saat itu sedang terjadi krisis ekonomi dengan kebutuhan imigran sebagai pekerja yang diupah murah dan dilema nasionalisme masyarakat. Nasionalisme masyarakat terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, nasionalisme asimilasionis atau nasionalisme yang ingin melibatkan integrasi dengan seluruh golongan masyarakat termasuk para imigran. *Kedua*, nasionalisme eksklusionis atau asimilasi yang tidak ingin melibatkan imigran dalam integrasi. Nasionalisme eksklusionis ini akhirnya berkembang dan menjadi cikal bakal sikap xenofobia masyarakat asli Prancis.

Angka xenofobia di Perancis selalu mengalami kenaikan dan penurunan sejak kemunculan. Tetapi dimulai pada tahun 2012, angka xenofobia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 dengan tingkat tertinggi pada tahun 2015. Pada tahun ini, titik peningkatan merupakan titik paling tinggi yang pernah terjadi di Prancis disebabkan krisis imigran yang terjadi di Eropa. Prancis juga menjadi negara terbanyak ketiga setelah Jerman dan Inggris dalam menerima imigran dan hal tersebut mempengaruhi peningkatan xenofobia secara besar-besaran.

Sikap xenofobia tersebut memiliki dampak buruk terhadap minoritas, imigran dan orang asing yang berada di Prancis. Aski diskriminasi dari yang berupa verbal hingga berupa kekerasan dilakukan oleh masyarakat asli. Bahkan aksi

xenofobia ini tidak mengenal kelas dari masyarakat pinggiran hingga yang menjabat dalam pemerintahan. Selain itu, persepsi masyarakat yang selalu menghubungkan imigran dengan kriminal juga semakin meningkatkan sikap xenofobia terutama

Peristiwa yang dapat menjadi konflik berkelanjutan ini membuat pemerintah mau tidak mau harus turun tangan dalam mengatasinya. Presiden Hollande dan Macron sama-sama memiliki perhatian tinggi terhadap konflik antar kelompok ini. Hollande yang sempat memberikan status *state of emergency* pada tahun 2015 lalu akibat krisis imigran menjadikan polisi dan gendarmerie menjadi sebagai otoritas yang paling berperan. Sama halnya dengan Macron juga turut melibatkan keduanya sebagai aktor penting mencegah teror-teror berkelanjutan sehingga dapat mengurangi ketakutan masyarakat. Keduanya juga meningkatkan peran intelijen dalam melawan konten-konten kebencian di internet. Selain itu, konten-konten yang berbau provokasi akan mudah untuk dicabut dari internet. Selain keamanan internet, daerah-daerah perbatasan juga akan ditingkatkan keamanannya.

Hollande dan Macron begitu terbuka kepada para imigran. Keduanya hanya tidak ingin imigran dengan tujuan ekonomi masuk dan memanfaatkan layanan negara dengan bermalasan sehingga lebih baik dideportasi. Bedanya, Macron mempercepat masa deportasi tersebut hingga 90 hari. Keduanya berjanji untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dalam sektor perumahan dan pekerjaan. Hal yang berbeda di sini Hollande terlihat lebih aktif dalam konferensi mengenai pemberantasan xenofobia dibandingkan Macron. Hal ini terjadi karena Macron



baru menjabat pada 2017 lalu. tetapi Macron berjanji akan meningkatkan segala usaha hingga tahun masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 nanti.

Dapat dilihat di sini bahwa kedua pemerintah memiliki arah kebijakan yang sama dengan perwujudan tidak terlalu berbeda. Keduanya bahkan sama-sama bekerja sama dengan EU dalam penanganan imigran yang masuk ke negara. Toleransi pada kedua kepemimpinan ini juga cenderung meningkat. Namun, tingkat toleransi tidak menandakan sikap xenofobia menurun. Sikap xenofobia masyarakat tetap saja meningkat walaupun pemerintah telah mengerahkan kebijakan sedemikian rupa. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki prinsip sendiri dalam menghadapi baik minoritas maupun imigran hingga orang baru yang datang ke Prancis. Ada beberapa faktor yang memang pemerintah tidak bisa mengintervensi jika tidak ada kemauan dari masyarakat dalam meredam tingkat xenofobia ini.

Berdasarkan analisis penulis menggunakan *Rational Conflict Theory* yang diusung oleh Muzafer Sherif, Sikap ini dibangun karena adanya empat variabel independen. Variabel tersebut adalah ancaman realistik, ancaman simbolik, kegelisahan antar kelompok dan stereotip negatif. Dari analisis, telah ditemukan jawaban penelitian mengenai faktor-faktor utama yang sebenarnya menjadi alasan terjadinya peningkatan xenofobia di Prancis pada era kepemimpinan Hollande dan Macron.

**Ancaman realistik** yang dirasakan oleh masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, keberlangsungan hidup dan politik. Masyarakat merasa pendatang baru hanya ingin memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan oleh Prancis terhadap mereka. Pendatang baru menjadi perhatian bagi pemerintah dan mereka bebas

untuk mencuri kesempatan kerja yang dirasa harusnya merupakan hak masyarakat asli. Masyarakat asli menyambungkan kejadian ini dengan angka pengangguran di Prancis yang masih sangat tinggi. Tetapi pada faktanya, tidak ada pendatang baru yang mencuri pekerjaan dari masyarakat asli. Bahkan tingkat pengangguran minoritas lebih tinggi 80% jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran masyarakat asli.

Masyarakat juga geram melihat pendatang baru hanya memanfaatkan sistem kesejahteraan negara. Masyarakat asli menilai pendatang baru hanya akan menodai sistem tersebut dan merugikan mereka. Karena harus membayar pajak yang sebagiannya akan disalurkan bagi kehidupan pendatang baru membuat masyarakat asli merasa dirugikan. Menurut mereka imigran malas hanya menjadi tanggung jawab pemerintah yang telah menerimanya dan bukan tanggung jawab seluruh individu. Selain itu hak politik yang diberikan kepada pendatang baru menjadi kemarahan bagi masyarakat asli. Menurut mereka, pendatang baru tidak memahami latar belakang Prancis sama sekali jadi tidak perlu terlibat dalam memberikan suara politik. Selain itu, menempatkan minoritas dalam pemerintahan juga dirasa sebagai hal yang salah oleh masyarakat asli.

**Ancaman simbolik** juga dirasakan oleh masyarakat asli. Nilai yang tertanam di masyarakat menjadi suatu hal yang mendorong peningkatan xenofobia ini. Nilai tersebut terbentuk dari identitas kolektif dari konstitusi dan nilai-nilai negara yang telah ada sejak dulu. Konstitusi Prancis sendiri tidak mengakui adanya minoritas di Prancis berdasarkan etnis atau agama. Mereka hanya diakui sebagai individu yang harus berperan aktif dalam kepentingan Prancis. Ini menyebabkan minoritas tidak terlihat di hadapan hukum dan mereka hanya ditindak

sesuai dengan hukum untuk individu biasa tanpa melihat nilai-nilai dan budaya dalam kelompok minoritas mereka.

Prancis juga merupakan negara yang sekuler. Sekulerisme ini membatasi masyarakat untuk melakukan segala budaya agama mereka secara privat. Pelarangan menggunakan atribut agama yang terlihat mencolok bagi seluruh agama juga suatu hal yang merugikan bagi minoritas pasalnya atribut tersebut merupakan identitas mereka. konstitusi dan nilai yang diterapkan oleh masyarakat Prancis ini membentuk identitas dan sikap masyarakat asli terhadap pendatang baru. Keduanya juga membentuk nasionalisme masyarakat Prancis semakin kuat terhadap negara mereka sendiri.

Selain itu, masyarakat Prancis juga tidak ingin adanya budaya yang mengintervensi bahkan hingga menghilangkan budaya Prancis. Menurut mereka budaya-budaya minoritas terlalu berbeda untuk dijalankan di Prancis seperti budaya masyarakat Muslim dan Yahudi. Masyarakat asli tidak ingin adanya proses penggantian budaya di Prancis terutama minoritas lebih dominan dalam mempraktikkan budaya mereka dibandingkan budaya Prancis sendiri yang notabene mereka memiliki kewarganegaraan Prancis. Hal ini membuat masyarakat asli takut minoritas akan tetap memiliki kecenderungan terhadap budaya mereka yang bisa mengakibatkan budaya Prancis tenggelam dalam arus. Agama-agama yang fundamental juga hanya akan menjadi ancaman di mata masyarakat asli.

Masyarakat asli juga berpendapat bahwa pendatang baru hanya menimbulkan masalah-masalah baru pada Prancis. Mereka dapat menimbulkan

pecahnya solidaritas masyarakat yang ada di Prancis. Pendatang baru juga dirasa tidak memberikan usaha yang tinggi terhadap proses integrasi yang ada. Hal ini menyebabkan masyarakat asli menjadi pesimis terhadap pendatang baru hingga menginginkan untuk pemerintah tidak menerima pendatang baru lagi.

**Kegelisahan antar kelompok** juga terbentuk pada kedua kelompok. Kegelisahan ini membuat kedua kelompok tidak ingin melakukan interaksi satu sama lain, sehingga menyebabkan penghindaran interaksi terjadi terutama adanya rasa segan, gengsi hingga pesimis jika melakukan interaksi. Masyarakat asli yang tidak ingin pendatang baru menjadi bagian dari kelompok mereka, tak jarang rasa malu juga dirasakan dalam lingkup yang lebih kecil seperti melakukan suatu proyek. Masyarakat mereka malu, segan hingga pesimis terhadap pendatang baru yang terlibat dalam proyek tersebut karena menganggap mereka hanya malas dan hanya akan menghambat jalannya proyek.

**Stereotip Negatif** akhirnya tetap tumbuh dalam pikiran masyarakat. stereotip negatif ini merupakan awal terbentuknya rasa takut masyarakat dan jika ditambah dengan ancaman-ancaman di atas terbentuklah sikap xenofobia masyarakat asli. Stereotip negatif biasanya timbul akibat serangan-serangan yang terjadi di Prancis yang melibatkan pendatang baru sebagai pelakunya. Ini membangun tanggapan di masyarakat asli bahwa pendatang baru hanya akan menimbulkan teror di negara. Skandal hingga peristiwa yang tidak menyenangkan bagi masyarakat asli juga memberi dampak terhadap stereotip negatif ini. Akibatnya generalisasi terbentuk bagi seluruh pendatang baru walaupun faktanya yang memberikan kerugian hanya beberapa oknum saja.

Ke-empat ancaman tersebut menjadi faktor dasar terbentuknya sikap xenofobia di masyarakat. Rasa takut yang berubah hingga menjadi diskriminasi terhadap masyarakat dapat terjadi dengan cepat. Rasa takut ini bisa disebabkan oleh serangan-serangan, peristiwa yang merugikan hingga skandal-skandal yang melibatkan minoritas, imigran atau orang asing sebagai pelakunya. Kemudian ditambah dengan ancaman-ancaman lainnya hingga stereotip negatif menjadikan tingkat xenofobia masyarakat semakin tinggi. Sikap xenofobia ini akan menghasilkan diskriminasi verbal hingga kekerasan dan menciptakan konflik antar kedua pihak. Jika peristiwa ini tetap terjadi tanpa adanya *cooling down* seperti yang dilakukan Sherif pada penelitian fase ketiganya, maka konflik ini akan tetap berjalan.

## **5.2 Saran dan Rekomendasi**

Penelitian selanjutnya akan lebih menarik bila difokuskan terhadap xenofobia dalam kategori olahraga di Prancis terutama sepak bola. Topik ini lebih menarik setelah Prancis memenangkan Piala Dunia bulan Juli 2018 ini. Setelah kemenangan tersebut, banyak tren mengenai xenofobia yang masih terjadi di Prancis dengan menghubungkan pemain-pemain dengan latar belakang non-Prancis. Banyak masyarakat yang pro dan kontra akan hal tersebut. Ada yang mengatakan xenofobia dalam kategori olahraga sudah biasa terjadi dan ada juga yang menganggap hal tersebut merupakan hal yang direkayasa.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat difokuskan terhadap kebijakan yang sedang dibangun Emmanuel Macron bersama Merkel di dalam EU. Kebijakan tersebut mengenai *immigrant one policy* yang sedang diusahakan oleh Macron agar dijalankan oleh seluruh negara anggota EU.



## Daftar Pustaka

- Abis, S., & Coustillere, J.-F. (2013). *Francois Hollande and the Mediterranean Region*. Panorama, 169.
- AFP. (2016, Desember 27). *French slavery monument vandalized with Nazi slogan*. Retrieved from The Time of Israel: <https://www.timesofisrael.com/french-slavery-monument-vandalized-with-nazi-slogan/>
- Agence France-Presse. (2017, November 26). *France's Macron vows to combat 'shameful' violence against women*. Retrieved from INQUERER: <http://newsinfo.inquirer.net/947701/frances-macron-vows-to-combat-shameful-violence-against-women>
- Alcantara, C. (2017, Juli 17). *46 years of terrorist attacks in Europe, visualized*. Retrieved from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/graphics/world/a-history-of-terrorism-in-europe/>
- Assemblée Nationale. (n.d.). *Constitution of October 4, 1958*. Retrieved from English Website of the French National Assembly: <http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly>
- Barr, E. (2010, September 7). *My son's experience in a French school was not a good one*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2010/sep/07/sons-experience-in-french-school>
- Barysch, K. (2016, Februari 23). *Is migration a threat or an opportunity for Europe?* Retrieved from World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2016/02/is-migration-a-threat-or-an-opportunity-for-Europe/>
- Baumeister, R., & Vohs, K. D. (2015). *Encyclopedia of Pshycology*. San Francisco: Sage Publication.
- BBC. (2012, Agustus 3). *Nicolas Sarkozy says France has too many foreigners*. Retrieved from BBC News: <http://www.bbc.com/news/world-europe-17280647>
- BBC. (2016, Maret 4). *Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>
- BBC. (2017, Agustus 28). *Migrant crisis: Macron unveils plans after meeting*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-41071796>
- Berton, R. M. (2013). *Lazy or Greedy? Impact of Xenophobic Beliefs on Natives'*. *Journal of Politic Science*, 3, 31-2.
- Bertossi, C., & Tardis, M. (2018). Emmanuel Macron and the Megration Question. In T. Gomart, & M. Hecker, *Macron, Diplomat: A New French Foreign Policy* (pp. 25-27). Paris: Institut Francais des Relations Internationales.
- Beverly Hancock, E. O. (2009). An Introduction to Qualitative Research. *National Institute for Health Research (NHS)*, 6-7.
- Birnbaum, M. (2016, Juli 17). *Nice attack propels anti-immigrant sentiments into France's mainstream*. Retrieved from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com>

com/world/nice-attack-propels-anti-immigrant-sentiments-into-frances-mainstream/2016/07/17/fb3e0532-4bb0-11e6-8dac-0c6e4acc5b1\_story.html

- Bobo, L. (1988). *Group Conflict, Prejudice and the Paradox of Contemporary Racial Attitudes*. New York: Plenum.
- Brenner, M. (2015, Juli 8). *The Troubling Question in the French Jewish Community: Is It Time to Leave?* Retrieved from Vanity Fair: <https://www.vanityfair.com/news/2015/07/anti-semitism-france-hostage-hyper-cacher-kosher-market>
- Briancon, P. (2017, Agustus 6). *France pledges to improve asylum seekers' fate, keep economic migrants out*. Retrieved from Politico: <https://www.politico.eu/article/france-pledges-to-improve-asylum-seekers-fate-keep-economic-migrants-out/>
- Brown, R. J., & Turner, J. C. (1981). *Interpersonal and Intergroup Behavior*. Chicago: University of Chicago Press, 33.
- Brubaker, R. (1992). *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. London: Harvard University Press, 112.
- Bruce. (2015, Februari 6). *Anti-Minority Sentimen not Rising*. Retrieved from Pew Research : <http://www.pewglobal.org/2015/06/02/chapter-anti-minority-sentiment-not-rising#europeans-mostly--positive-on-muslims>
- Bunzl, M. (2005). Between Anti-Semitism and Islamophobia: Some Thoughts on the New Europe. *American Ethnologist*, 32, 499-501.
- Burrows-Taylor, E. (2017, Juli 4). *Too many foreigners in France and Islam not compatible, majority of French say*. Retrieved from The Local Fr: <https://www.thelocal.fr/20170704/sixty-five-percent-of-french-say-there-are-too-many-foreigners-in-france>
- Carriat, J., & Melander, I. (2018, Februari 21). *Macron plans tighter asylum rules in test of parliamentary majority*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-france/macron-plans-tighter-asylum-rules-in-test-of-parliamentary-majority-idUSKCN1G5005>
- CBC. (2007, Oktober 29). *Immigrants can't be forced to learn French: Quebec language watchdog*. Retrieved from CBC News: <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/immigrants-can-t-be-forced-to-learn-french-quebec-language-watchdog-1.675010>
- CCFD. (2014). *Natural resources at the Heart of Conflict*. Paris: Comite catholique contre la faim et pour le developpement - terre solidaire, 13.
- Chan, S. (2015, Desember 22). *How a Record Number of Migrants Made Their Way to Europe*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2015/12/23/world/europe/migrant-crisis-europe-million.html>
- Char, P. (2013, Juli 4). *Anti-Muslim acts rising in France, rights group says*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-france-islam-idUSBR E9620Z420130703?feedType=RSS&feedName=worldNews>



- Chassany, A.-S. (2017, Desember 19). *Macron government plans to tighten French immigration policy*. Retrieved from Financial Times: <https://www.ft.com/content/efac20e0-e3db-11e7-97e2-916d4fbac0da>
- Chazan, D. (2014, September 07). *Far-right extremists lead hundreds in Calais anti-migrant protests*. Retrieved from The Telegraph News: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11080428/Far-right-extremists-lead-hundreds-in-Calais-anti-migrant-protests.html>
- CNCDH. (2015). *Rapport Sur la Lutte Contre Le Racisme L'Antisemitisme et la Xenophobie*. Paris: Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme.
- CNCDH. (2015). *Report on the Prevention of Racism, Anti-Semitism and Xenophobia*. Paris: Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme.
- CNCDH. (2017). *Report on the Fight Against Racism, Antisemitism and Xenophobia*. Paris: Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme.
- CNN. (2017, Desember 25). *2015 Charlie Hebdo Attacks Fast Facts*. Retrieved from CNN News: <https://edition.cnn.com/2015/01/21/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts/index.html>
- CNN. (2018, Mei 2). *2015 Paris Terror Attacks Fast Facts*. Retrieved from CNN News: <https://edition.cnn.com/2015/12/08/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts/index.html>
- Cochran, M. Q. (2007). A Guide To Using Qualitative Research Methodology. *Medecins Sans Frontieres*, 21.
- Cook, M. (2003). Banished for Minor Crimes: The Aggravated Felony Provision of the Immigration and Nationality Act as a Human Rights Violation. *Boston Third World Law Journal*, 306.
- Dictionary.com. (2016, November 5). *Dictionary.com's 2016 Word of the Year: Xenophobia | Dictionary.com Blog*. Retrieved from Dictionary Blog: <http://blog.dictionary.com/xenophobia/>.
- Dodson, B. (2010). Locating Xenophobia: Debate, Discourse, and Everyday Experience in Cape Town, South Africa. *Geography Publication*, 5. Retrieved from AlleyDog.com: <https://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Realistic+Conflict+Theory+%28RCT%29+>
- Donadio, R. (2018, Maret 29). *The Meaning of France's March Against Anti-Semitism*. Retrieved from The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/03/the-murder-of-mireille-knoll-in-france-might-be-the-last-straw-for-french-jews/556796/>
- Dumont, J.-C. (2015, September). *We are entering a new era of migration*. Retrieved from OECD Observer: [http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5010/We\\_are\\_entering\\_a\\_new\\_era\\_of\\_migration.html](http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5010/We_are_entering_a_new_era_of_migration.html)
- Dustmann, C., Glitz, A., & Tommaso, F. (2008). The labour market impact of immigration. *Oxford Review of Economic Policy*, 24, 477-479.

- Ember, M., Ember, C. R., & Skoggard, I. (2005). *Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World*. New York: Springer Science-Business Media.
- Escafé-Dublet, A. (2014). *Mainstreaming Immigrant Integration Policy in France*. Brussels: Migration Policy Institute.
- European Commission. (2017, April 10). *File:Foreign-born population by country of birth, 1 January 2016*. Retrieved from Euro Statistics: [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign-born\\_population\\_by\\_country\\_of\\_birth,\\_1\\_January\\_2016\\_\(%C2%B9\).png](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Foreign-born_population_by_country_of_birth,_1_January_2016_(%C2%B9).png)
- European Commission. (2017, Maret). *Migration and migrant population statistics*. Retrieved from Euro Statistics: [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration\\_and\\_migrant\\_population\\_statistics](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics)
- Ferrando, V. C. (2105). The Language Debates on Immigrant Integration in France. Immigrant Integration or Immigrant Control. *Journal of Language and Law*, 63, 150-152.
- First Post. (2017, Agustus 17). *Charlottesville violence: Emmanuel Macron condemns xenophobia, backs anti-racism activists in US*. Retrieved from First Post: <https://www.firstpost.com/world/charlottesville-violence-emmanuel-macron-condemns-xenophobia-backs-anti-racism-activists-in-us-3942793.html>
- Fisher, M. (2013, Mei 15). *A fascinating map of the world's most and least racially tolerant countries*. Retrieved from The Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/15/a-fascinating-map-of-the-worlds-most-and-least-racially-tolerant-countries/?utm\\_term=.47ccda67e4ae](https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/15/a-fascinating-map-of-the-worlds-most-and-least-racially-tolerant-countries/?utm_term=.47ccda67e4ae)
- France 24. (2014, Januari 22). *Poll finds xenophobia on the rise in France*. Retrieved from France 24: <http://www.france24.com/en/20140121-france-poll-finds-xenophobia-rise-racism-muslims-islam-hollande-death-penalty>
- France Diplomatie. (2013, Januari 3). *Fight against racism, anti-Semitism and xenophobia*. Retrieved from France Diplomatie: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/fight-against-racism-anti-semitism-and-xenophobia/>
- France Embassy. (2015, Agustus 25). *President Hollande outlines French foreign policy*. Retrieved from France in the United Kingdom: <http://www.ambafrance-uk.org/President-Hollande-outlines-French-foreign-policy>
- France24. (2014, Januari 22). *Poll finds xenophobia on the rise in France*. Retrieved from France 24: <http://www.france24.com/en/20140121-france-poll-finds-xenophobia-rise-racism-muslims-islam-hollande-death-penalty>
- France24. (2018, Juni 24). *EU papers over differences after 'frank' migration talks*. Retrieved from France 24: <http://www.france24.com/en/20180624-eu-papers-over-differences-merkel-macron-conte-frank-migration-talks>
- France24. (2018, Januari 2018). *France received record 100,000 asylum requests in 2017*. Retrieved from France 24: <http://www.france24.com/en/20180108-france-record-100000-asylum-requests-2017-migrants-macron>

- France24. (2018, Mei 22). *Macron shuns another 'new' plan, wants more jobs to tackle deprived suburbs*. Retrieved from France24: <http://www.france24.com/en/20180522-france-macron-suburbs-poverty-discrimination-jobs>
- Freedman, J. (2004). *Immigration and Insecurity in France*. New York: Routledge.
- French Culture. (2011, Oktober 9). *Foreigners in France: Fewer Opportunities for Employment*. Retrieved from Ielanguages: <http://ielanguages.com/blog/foreigners-in-france-fewer-opportunities-for-employment/>
- Friedberg, A. L. (2005). The Future of U.S – China Relations : Is Conflict Inevitable? *International Security*, 20-21.
- Gee, O. (2017, Maret 30). *French people are less xenophobic but still wary of Islam*. Retrieved from The Local fr: <https://www.thelocal.fr/20170330/french-become-more-tolerant-as-number-of-racist-acts-drop>
- General Commissariat of Strategy and Prosperity. (2013, September). *Which Social Model?* Paris: Premier Ministre. Retrieved from General Commissariat of Strategy and Prosperity: [http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/CGSP-note-model-social\\_EN-le-20-12-OK.pdf](http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/CGSP-note-model-social_EN-le-20-12-OK.pdf)
- Gilbert, J. (2016, November 14). *How French law makes minorities invisible*. Retrieved from Independent News: <https://www.independent.co.uk/news/world/politics/how-french-law-makes-minorities-invisible-a7416656.html>
- Gilles, R. (2015, Oktober 8). *Francois Hollande Veut Davantage Punir le Racisme*. Retrieved from LeMonde: [https://www.lemonde.fr/politique/article/2015/10/08/hollande-veut-davantage-punir-le-racisme\\_4785604\\_823448.html](https://www.lemonde.fr/politique/article/2015/10/08/hollande-veut-davantage-punir-le-racisme_4785604_823448.html)
- Glasser, A. (2016, Februari 5). *French Government Denies Xenophobic Pegida Movement a Platform in Calais*. Retrieved from Human Rights First: <https://www.humanrightsfirst.org/blog/french-government-denies-xenophobic-pegida-movement-platform-calais>
- Glasser, A. (2016, Mei 6). *New French Report Shows Rise in Attacks on Muslims, Sustained Targeting of Jews*. Retrieved from Human Rights First: <https://www.humanrightsfirst.org/blog/new-french-report-shows-rise-attacks-muslims-sustained-targeting-jews>
- Gorodzeisky, A., & Semyonov, M. (2017). Labor Force Partisipation, Unemployment and Occupational Attainment among Immigrants in West European Countries. *PLOS One*, 12, 6-15.
- Greenhouse, E. (2013, Januari 25). *Twitter's Speech Problem: Hashtags and Hate*. Retrieved from The New Yorker: <https://www.newyorker.com/news/news-desk/twitters-speech-problem-hashtags-and-hate>
- Hackett, C. (2017, November 29). *5 facts about the Muslim population in Europe*. Retrieved from Pew Research Center: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/>
- Hargreaves, A. J. (2007). *Multi-Ethnic France: Immigration, Politics, Culture and Society*. New York: British Library.

- Hovey, J. D., & Magana, C. J. (2003). Psychosocial predictors of anxiety among immigrant Mexican migrant farmworkers: Implications for prevention and treatment. *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*, 8, 274-280.
- Huddy, L., & Sears, D. O. (1995). Opposition to Bilingual Education: Prejudice or the Defense of Realistic Interest? *Social Psychology Quarterly*, 58, 133-43.
- Human Rights Watch. (2016, Februari 3). *France: Abuses Under State of Emergency*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2016/02/03/france-abuses-under-state-emergency>
- Human Rights Watch. (2017). *European Union: Events of 2016*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/european-union>
- Hurriyet Daily News. (2017, November 2). *New law puts 20 under house arrest in France*. Retrieved from Hurriyet Daily News: <http://www.hurriyetaidailynews.com/new-law-puts-20-under-house-arrest-in-france-121777>
- Inhae, Y. (2016, Januari 13). *France's Attitude Toward Minorities Is Increasingly Unstable*. Retrieved from Stanford Politics: <https://stanfordpolitics.org/2016/01/13/france-attitude-toward-minorities-increasingly-unstable/>
- Initiative, T. F. (2009). *The Obama Administrations's Pivot to Asia* . Retrieved from A Conversation with Assistant Secretary Kurt Campbell and Moderated by Robert Kagan: <http://www.foreignpolicyi.org/content/obama-administrations-pivot-asia>
- Insee. (2017, November 16). *The unemployment rate increased by 0.2 points in Q3 2017*. Retrieved from Insee: <https://www.insee.fr/en/statistiques/3200572>
- IPT. (2018, Agustus 9). *Israel-Palestine Timeline*. Retrieved from Israel Palestine Timeline: <https://israelpalestinetimeline.org/charts/>
- Jansen, D. (2016, November 13). *How French law makes minorities invisible*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/how-french-law-makes-minorities-invisible-66723>
- Jones, S., & Stan, H. (2017, Desember 1). *Op-Ed: Negative opinions expressed on social media embolden xenophobes*. Retrieved from Daily Maverick: <https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-12-01-op-ed-negative-opinions-expressed-on-social-media-embolden-xenophobes/#.WkYNEVOYPDc>
- Joseph, Y. (2017, Mei 5). *In Their Own Words: Marine Le Pen and Emmanuel Macron*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/05/05/world/europe/emmanuel-macron-marine-le-pen-quotes.html>
- Judith Butler, E. L. (2000). *Contingency, Hegemony, Universality : Contemporary Dialogues on the Left*. London, New York: Biddles Ltd, King's Lynn, Norfolk.
- Karouni, I. e. (2012). Ethnic Minorities and Integration Process in France and the Netherlands: An Institutional Perspective. *The American Journal of Economics and Sociology*, 45-51.
- Kearney, S. (2017, Agustus 1). *Who are the Roma People?* Retrieved from Euro News: <http://www.euronews.com/2017/08/01/who-are-the-roma-people>

- Kendall, R. (1998). *Anxiety, Fear Contribute to Prejudice, Say NMSU Professors*. Retrieved from NMSU: <http://www.nmsu.edu/~ucomm/Releases/1998/Nov98/stephan2.html>
- Khan, S. (2018, Februari 21). *Emmanuel Macron unveils controversial immigration crackdown in France*. Retrieved from Independent: Emmanuel Macron unveils controversial immigration crackdown in France
- Kingsley, P. (2015, Agustus 10). *10 truths about Europe's migrant crisis*. Retrieved from The Guardian : <https://www.theguardian.com/uk-news/2015/aug/10/10-truths-about-europes-refugee-crisis>
- Kupe, L. (2018, April 15). *Under Macron, France has yet to Tackle Racism & Xenophobia in French Society*. Retrieved from Women of Color Advancing Peace and Security: <https://www.wcaps.org/blog/2018/4/15/wurdofteday-under-macron-france-has-yet-to-tackle-racism-xenophobia-in-french-society>
- le Figaro. (2016, Februari 9). *France: 3336 perquisitions administratives*. Retrieved from Le Figaro: <http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/09/97001-20160209-FILWWW00269-etat-d-urgence-3336-perquisitions-administratives.php>
- Library of Congress. (2007). *Country Profile: France*. Library of Congress - Federal Research Division.
- Library of Congress. (2016, Juni 21). *Refugee Law and Policy: France*. Retrieved from Library of Congress: <https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/france.php>
- Liogier, R. (2009). Laïcité on the Edge in France: Between the Theory of Church-State Separation and the Praxis of State-Church Confusion. *Macquarie Law Journal*, 9, 29-30.
- Lotem, I. (2018, April 26). *Macron's France presents new immigration bill as a centrist compromise – it's nothing of the sort*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/macrons-france-presents-new-immigration-bill-as-a-centrist-compromise-its-nothing-of-the-sort-95550>
- Louison, F. (2016). *Agression d'Aubervilliers : les Chinois disent stop à la violence*. Retrieved from La Parisien: <http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/les-chinois-disent-stop-a-la-violence-17-08-2016-6048777.php>
- Maddux, W. W., Polifroni, M., & Galinsky, A. (2006). *Realistic Threat Explains Negativity Resulting from the Model Minority Stereotype*. Manuscript Submitted for Publication.
- Malik, K. (2015, November 15). *Terrorism has come about in assimilationist France and also in multicultural Britain. Why is that?*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/15/multiculturalism-assimilation-britain-france>
- Marlowe, L. (2016, Maret 4). *France and Germany in show of unity on migrant crisis*. Retrieved from The Irish Times: <https://www.irishtimes.com/news/world/europe/france-and-germany-in-show-of-unity-on-migrant-crisis-1.2560696>

- Marmouyet, F., & Houeix, R. (2017, Juni 21). *Diversity gains ground in France's new-look National Assembly after vote*. Retrieved from France24: <http://www.france24.com/en/20170621-france-diversity-gains-ground-new-look-national-assembly-after-legislative-election>
- Marozzi, M. (2015). Construction, Robustness Assessment and Application of an Index of Perceived Level of Socio-Economic Threat from Immigrants: A Study of 47 European Countries and Regions. *Social Indicator Research* vol 128, 1.
- McClain, P. D., Carter, N. M., Lyle, M. L., Grynawski, J. D., Nunnally, S. C., Scotto, T. J., . . . Cotton, K. D. (2006). Racial Distancing in a Southern City: Latino Immigrants' Views of Black Americans. *The Journal of Politics*, 575.
- McDonald, J. R. (1969). Labor Immigration in France, 1946-1965. *Annals of the Association of American Geographers*, 59, 1.
- McGuinness, R. (2018, Januari 18). *'He's playing a CYNICAL GAME' Macron SLAMMED over 'violent' attitude towards migrants*. Retrieved from Express News: <https://www.express.co.uk/news/world/906678/emmanuel-macron-france-migrants-immigration-policy-le-touquet-calais>
- McPartland, B. (2013, Januari 25). *'Too many foreigners in France', French say*. Retrieved from The Local: <https://www.thelocal.fr/20130125/too-many-foreigners-in-france-french-say>
- McPartland, B. (2014, Desember 16). *Immigration in France: Hollande slams alarmists*. Retrieved from The Local Fr: <https://www.thelocal.fr/20141216/immigration-france-hollande-museum>
- Medina, M. (2016, Maret 19). *Sondage: 56% des Français ont une mauvaise image de l'Eglise catholique*. Retrieved from l'Express Style: [https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/sondage-56-des-francais-ont-une-mauvaise-image-de-l-eglise-catholique\\_1775021.html](https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/sondage-56-des-francais-ont-une-mauvaise-image-de-l-eglise-catholique_1775021.html)
- Merriam-Webster. (n.d.). *The History of the Word 'Xenophobia'*. Retrieved from World History: <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/a-short-history-of-xenophobia>
- Messina, A. M. (2007). *The Logics and Politics of Post-WWII Migration to Western Europe*. Indiana: CambridgeUniversity Press.
- Meunier, S. (2013). France and the Global Economic Order. *Development in France Politics*, 236.
- Migrant Integration Policy Index. (2015). *Migrant Integration Policy Index*. Barcelona: Barcelona Center of International Affairs (CIDOB).
- Murphy, H. (2017, mEI 8). *Macron's policies on Europe, trade, immigration and defence*. Retrieved from Financial Times: <https://www.ft.com/content/37223e92-3319-11e7-bce4-9023f8c0fd2e>
- Myres, C., Abrams, D., Roshental, H. E., & Christian, J. (2013). Threat, Prejudice and Stereotyping in the Context of Japanese, North Korean and South Korean Intergroup Relations. *Current Research in Social Psychology*, 76-77.

- Nationalia. (2015, Oktober 28). *French Senate buries ratification of European Charter for Regional and Minority Languages*. Retrieved from Nationalia News: <https://www.nationalia.info/new/10635/french-senate-buries-ratification-of-european-charter-for-regional-and-minority-languages>
- Noack, R. (2016, Februari 4). *Some French wanted to find out how racist their country is. They might get sued for it*. Retrieved from The Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/04/why-it-can-be-illegal-to-ask-people-about-their-religion-or-ethnicity-in-france/?utm\\_term=.af4864730787](https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/04/why-it-can-be-illegal-to-ask-people-about-their-religion-or-ethnicity-in-france/?utm_term=.af4864730787)
- Nossiter, A. (2016, Oktober 25). *Shouts Greet Migrants in the Streets of France: 'We Don't Want Them'*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2016/10/26/world/europe/calais-france-migrants.html>
- Nossiter, A. (2018, Januari 16). *Macron Defends Migration Policy in France, Walking a Fine Line*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2018/01/16/world/europe/macron-calais-migrants-france.html>
- O'Brien, P. (2016, Maret 23). *The Brussels attacks are exposing Europe's identity crisis. Here's how*. Retrieved from The Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/23/the-brussels-attacks-are-exposing-europes-identity-crisis-heres-how/?utm\\_term=.9dd39bba41da](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/23/the-brussels-attacks-are-exposing-europes-identity-crisis-heres-how/?utm_term=.9dd39bba41da)
- Oppenheimer, D. B. (2008). Why France Needs to Collect Data on Racial Identity.. in a French Way. *31 Hasting Int'l & Comp*, 31, 745.
- Osborne, S. (2016, Desember 7). *The most anti-immigrant countries in Europe*. Retrieved from Independent News: <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/europe-immigration-most-anti-immigrant-countries-italy-france-germany-uk-a7460301.html>
- Osborne, S. (2016, Desember 7). *The most anti-immigrant countries in Europe*. Retrieved from Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/europe-immigration-most-anti-immigrant-countries-italy-france-germany-uk-a7460301.html>
- Oskamp, S. (2000). *Reducing Prejudice and Discrimination*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Patnistik, E. (2010, Desember 14). *China Menggurita di Afrika*. Retrieved Mei 10, 2018, from Kompas: <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/12/14/11314412/china.menggurita.di.afrika>
- Peiron, D. (2016, Maret 11). *Pourquoi les familles juives désertent des écoles publiques*. Retrieved from Judaïsme: <https://www.la-croix.com/Religion/Judaïsme/Pourquoi-familles-juives-desertent-ecoles-publiques-2016-03-11-1200745971>
- Pineau, E. (2015, September 7). *Hollande opens French doors to refugees despite opposition*. Retrieved from Reuters: [https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-france/hollande-opens-french-doors-to-refugees-despite-opposition-idUSKCN0R70WC20150907?utm\\_source=twitter](https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-france/hollande-opens-french-doors-to-refugees-despite-opposition-idUSKCN0R70WC20150907?utm_source=twitter)

- Pineau, E. (2015, Januari 15). *Hollande reassures Muslims, Islamists hack French websites*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/france-shooting-hollande/hollande-reassures-muslims-demands-respect-for-french-values-idINKBN0KO1GN20150115>
- Piser, K. (2018, Januari 8). *French Secularism Is in Crisis. What Does That Mean for Muslim Youth?* Retrieved from The Nation News: <https://www.thenation.com/article/french-secularism-is-in-crisis-what-does-that-mean-for-muslim-youth/>
- Poirier, A. (2013, November 29). *Is France racist? Abuse shocks nation*. Retrieved from CNN News: <https://edition.cnn.com/2013/11/29/opinion/opinion-poirier-racism-in-france/index.html>
- Poushter. (2016, September 16). *European opinions of the refugee crisis in 5 charts*. Retrieved from Pew Research Center: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/>
- Poushter, J. (2016, September 16). *European opinions of the refugee crisis in 5 charts*. Retrieved from Pew Research Center: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/>
- Premier Ministre. (2014). *Mobilizing France Against Racism and Anti-Semitism 2015 - 2017 Action Plan*. Premier Ministre Republique Francaise.
- Raj, K., & Ward, B. (2018, Mei 17). *Saving European Democracy Starts at Home*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2018/05/17/saving-european-democracy-starts-at-home/>
- Reeskens, T., & Oorschot, W. v. (2015). Immigrants' Attitudes towards Welfare Redistribution. An Exploration of Role of Government Preferences among Immigrants and natives across 18 European Welfare States. *European Sociology Review*, 1-2.
- Republique Francaise. (1978). *Loi Informatique et Libertes*. Paris: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertes.
- Reynie, D. (2014). *Anti-Semitic Attitudes in France*. Paris: The Fondation pour l'innovation politique.
- Roemer, J. E., & Straeten, K. V. (2005). Xenophobia and the size of the Public Sector. *Journal of Economics*, 86, 95-144.
- Roemer, J. E., Lee, W., Yi, U.-j., & Straeten, K. v. (2007). *Racism, Xenophobia, and Distribution: Multi-issue Politics in Advanced Democracies*. London: Harvard University Press.
- Rubin, A. J., & Breeden, A. (2015, April 17). *France Announces Stronger Fight Against Racism and Anti-Semitism*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2015/04/18/world/europe/france-announces-stronger-fight-against-racism-and-anti-semitism.html>



- Safdar, A. (2017, Februari 8). *Thousands of Roma 'made homeless' in France in 2016*. Retrieved from Al Jazeera News: <https://www.aljazeera.com/news/2017/02/thousands-roma-homeless-france-2016-170207204706535.html>
- Sage, A., & Magnanville. (2017, Juli 28). *Emmanuel Macron vows to clear migrants from streets of France*. Retrieved from The Times: <https://www.thetimes.co.uk/article/emmanuel-macron-vows-to-clear-migrants-from-streets-of-france-c0bzzhhfb>
- Samuel, H. (2012, Maret 6). *Nicolas Sarkozy appeals to far-Right saying 'too many immigrants' in France*. Retrieved from Telegraph News: [http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nicolas-sarkozy/9127441/Nicolas-Sarkozy-appeals-to-far-Right-saying-too-many-immigrants-in-France.html?cid=nlc-dailybrief-daily\\_news\\_brief-link18-20120307](http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nicolas-sarkozy/9127441/Nicolas-Sarkozy-appeals-to-far-Right-saying-too-many-immigrants-in-France.html?cid=nlc-dailybrief-daily_news_brief-link18-20120307)
- Samuel, H. (2012, mARET 6). *Nicolas Sarkozy Appeals to Far-Right Saying 'too many immigrants' in France*. Retrieved from The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nicolas-sarkozy/9127441/Nicolas-Sarkozy-appeals-to-far-Right-saying-too-many-immigrants-in-France.html?cid=nlc-dailybrief-dailynewsbrief-link18-20120307>
- Samuel, H. (2014, Desember 15). *Hollande warns of 'discourse of fear' on immigration*. Retrieved from The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11295529/Hollande-warns-of-discourse-of-fear-on-immigration.html>
- Sayer, Z. (2018, Februari 2). *Macron proposes tougher migration policies*. Retrieved from Politico: <https://www.politico.eu/article/france-emmanuel-macron-proposes-tougher-migration-policies/>
- Sciolino, E. (2004, Februari 11). *French Assembly Votes to Ban Religious Symbols in Schools*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2004/02/11/world/french-assembly-votes-to-ban-religious-symbols-in-schools.html>
- Semotiuk, A. J. (2018, Januari 17). *France Struggles with its Immigrants in the Midst of National Security Concern*. Retrieved from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/andyjsemotiuk/2018/01/17/france-struggles-with-its-immigrants-in-the-midst-of-national-security-concerns/#2346a0cc5efc>
- Senat. (2016). *Projet de loi relatif au droit des étrangers en France*. Retrieved from un Site au Service des Citoyens: <http://www.senat.fr/rap/114-716/114-7169.html>
- Sherif, M. (1954). Experimental study of positive and negative intergroup attitudes between experimentally produced groups: robbers cave study. *American Journal of Sociology*, 143.
- Sherif, M. (1958). Superordinate goals in the reduction of intergroup conflict. *American Journal of Sociology*, 349-356.
- Sherif, M., O., H., White, B. J., & Hood, W. R. (1988). *The Robbers Cave Experiment: Intergroup Conflict and Cooperation*. London: Routledge.
- Spence, P. (2016, Januari 18). *Francois Hollande pledges to 'redefine' the French economic model to tackle unemployment crisis*. Retrieved from The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/finance/economics/12105368/Francois-Hollande->

pledges-to-redefine-the-French-economic-model-to-tackle-unemployment-crisis.html

- Sputnik. (2016, April 26). *Most French Citizens Consider Migrants Main Factor in Increased Crime Rate*. Retrieved from Sputnik News: <https://sputniknews.com/infographics/201604261038610454-most-french-citizens-consider-migrants-main-factor-in-increased-crime-rate/>
- Stephan, W. (1977). Stereotyping: the Role of Intergroup-Outgroup Difference in Casual Attribution for Behavior. *Journal of Social Psychology*, 101, 225-266.
- Stokes, B. (2016, Juli 22). *The Immigration Crisis Is Tearing Europe Apart*. Retrieved from Foreign Policy: <http://foreignpolicy.com/2016/07/22/the-immigration-crisis-is-tearing-europe-apart/>
- Szabo, S. (2015, November 12). *Europe's identity crisis*. Retrieved from The Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2015/11/12/the-european-identity-crisis/?utm\\_term=.39b804321ad2](https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2015/11/12/the-european-identity-crisis/?utm_term=.39b804321ad2)
- Tainturier, P., Halasa, A., & Baba, N. (2008). Economic and Social Rights of migrants and Refugees in the Euro-Med Region. *Euro-Mediterranean Human Rights Network*, 28-43.
- Taras, R. (2012). *Xenophobia and Islamophobia in Europe*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- The Law Library of Congress. (2016, Juni 21). *Refugee Law and Policy: France*. Retrieved from The Law Library of Congress: <https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/france.php>
- The Local Fr. (2016, Agustus 23). *Majority in France against immigration*. Retrieved from The Local News: <https://www.thelocal.fr/20160823/immigration-negative-for-france-majority-says>
- UNIAN. (2016, Juni 29). *Hollande: free movement key to future UK access to EU market*. Retrieved from Economics UNIAN: <https://economics.unian.info/1390637-hollande-free-movement-key-to-future-uk-access-to-eu-market.html>
- United Nation. (2017, Maret 21). *Amid Rising Xenophobia, Violence, States Must Do More to Protect Migrants' Rights, General Assembly Hears on International Day for Ending Racial Discrimination*. Retrieved from Meetings Coverage and Press Releases: <https://www.un.org/press/en/2017/ga11895.doc.htm>
- United Nations General Assembly Third Committee. (2017). Elimination of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and other Related Intolerances. *General Assembly Third Committee: Social, Humanitarian and Cultural Committee (GA 3)* (pp. 19-20). Pune: United Nations.
- Vinocur, N. (2015, November 3). *Hollande's discrimination problem*. Retrieved from Politico: <https://www.politico.eu/article/hollandes-discrimination-problem-religion-labor-elections/>
- Vulliamy, E. (2016, Februari 3). *6 in 10 French people think Jews are responsible for anti-Semitism, survey finds*. Retrieved from Independent: <https://www.independent>

.co.uk/news/world/europe/6-in-10-french-people-think-jews-are-responsible-for-anti-semitism-survey-finds-a6848911.html

- Walt, V. (2017, Mei 8). *Macron Has Won a Historic French Election. Now, the Hard Work Begins*. Retrieved from Time News: <http://time.com/4769931/emmanuel-macron-wins-french-election/>
- Waters, L. (2016). French or Muslim? "Rooted" French Perseption . *Undergraduated Honors Thesis*, 51-59.
- Weaver, M. (2017, Maret 14). *Burqa bans, headscarves and veils: a timeline of legislation in the west*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2017/mar/14/headscarves-and-muslim-veil-ban-debate-timeline>
- Weaver, M. (2018, Mei 31). *Burqa bans, headscarves and veils: a timeline of legislation in the west* . Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2017/mar/14/headscarves-and-muslim-veil-ban-debate-timeline>
- Wiley Online Library. (2017). Union, French President Emmanuel Macron on the European Migration Crisis and the Future of the European. *Population and Development Review*, 43(4), 759.
- Wintour, P., & Willsher, K. (2017, Agustus 28). *African and European leaders agree action plan on migration crisis* . Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2017/aug/28/emmanuel-macron-hosts-summit-to-tackle-migration-crisis>
- Wistrich, R. S. (1999). *Demonizing the Other: Antisemitism, Racism, and Xenophobia*. Jerusalem: Harwood Publisher. Retrieved from Encyclopedia.com.
- WPR. (2018, Juni 16). *France Population 2018*. Retrieved from World Population Review: <http://worldpopulationreview.com/countries/france-population/>
- WTO, W. T. (2001). *Member Information*. Retrieved Mei 10, 2018, from China and the WTO: [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/china\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm)